



MAJALAH

Parlementaria

EDISI 146 TH. XLVII 2017



PILKADA SERENTAK SEMARAK BERDEMOKRASI



Gratis
TIDAK DIPERJUALBELIKAN





PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH

Achmad Djuned, S.H., M.Hum (Sekjen DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Pesisdangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Mastur Prantono, Suciati, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI

Bagus Mudjiharjanto

ANGGOTA REDAKSI

Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Agung Sulistiono, SH,

Rahayu Setowati, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha,

Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman,

R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI FOTO

Hasri Mentari

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto - Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341

email : dpr.pemberitaan@gmail.com

www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djustiawan Wijaya, S.Sos. M.AP
(Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E
(Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S.Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR

Mujiono

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Remon, Yuliana Puspita, Ifan, Siti Rondiyah, Oji

Telp. 021-5715697, Fax. 021-5715421

email : penerbitandpr@gmail.com

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR
TANGGUNGJAWAB BAGIAN PENERBITAN**



Pengantar Redaksi

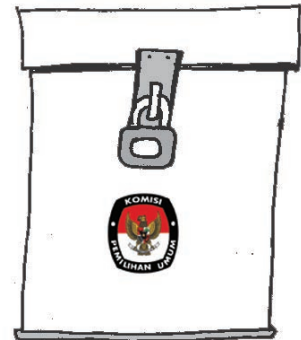
Seuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), telah ditetapkan mekanisme pilkada serentak. Pilkada serentak dibagi dalam tiga gelombang, tahun 2015, 2017 dan 2018. Setelah itu nantinya akan menjadi pilkada serentak di seluruh Indonesia.

Dengan pilkada serentak ini diharapkan bisa memberikan efisiensi dari sisi anggaran maupun usaha-usaha politik yang begitu masif. Sebelum ini pernah muncul kritik, hampir tiap hari ada pilkada di Indonesia, dengan pengelompokan pilkada ini diharapkan pesta demokrasi itu akan berjalan lebih baik.

Parlementaria edisi 146 kali ini menurunkan laporan utama Pilkada Serentak utamanya gelombang kedua ini. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan tanggal pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak gelombang kedua tahun 2017, yaitu 15 Februari 2017. Pemilihan akan digelar di 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten atau khusus bagi daerah yang akhir masa jabatan kepala dan wakil kepala daerahnya berakhir antara Juli 2016 dan Desember 2017.

Patut dicermati pesan Wakil Ketua DPR Korpolkam Fadli Zon bahwa yang harus menjadi perhatian semua adalah suksesi kepemimpinan di 101 daerah. Pemilu yang disebut pesta demokrasi itu mesti digaransi berlangsung aman, jujur, adil, dan demokratis. Pesan itu tidak lain dimaksudkan agar masyarakat tidak terpecah belah pasca pilkada. Dengan cara itulah menjaga wibawa demokrasi tetap tegak.

Pengalaman beberapa pemilu sebelumnya hendaknya bisa menjadi cermin dan pelajaran bagi kematangan berdemokrasi. Dengan pilkada serentak ini kita harapkan berlangsung makin jurdil dan demokratis dan menghasilkan pemimpin yang bersih, jujur dan amanah. Muara dari semua itu maka kehidupan berbangsa dan bernegara makin baik guna mewujudkan masyarakat sejahtera yang adil dan makmur, adil dalam kemakmuran dan makmur berkeadilan. ■



IKUTI AKUN MEDIA SOSIAL DPR RI
Follow, Like & Subscribe

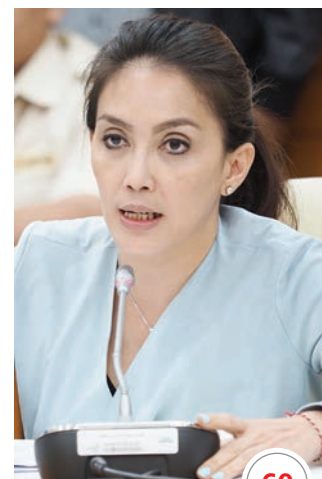


medsos@dpr.go.id

www.dpr.go.id



REFORMASI KELEMBAGAAN MENUJU PARLEMEN MODERN



DPR DAN MASYARAKAT HARUS BERSATU KONTROL KERJA PEMERINTAH

Adapun beberapa persoalan yang menjadi perhatian DPR RI adalah TKI yang diberangkatkan dengan menggunakan visa ziarah yang kemudian dipekerjakan secara rental di negara penempatan. Hal ini bermula setelah keluar Surat Keputusan (SK) Menaker No.260 Tahun 2015 yang berisi tentang pelarang mengirim TKI ke 21 negara di kawasan timur tengah.



DANANG D'ACADEMY : POLITIK TIDAK KEJAM

- 4 Aspirasi
- 6 Prolog
Pilkada Serentak, Semarak Berdemokrasi
- Laporan Utama
- 8 Menegakkan Wibawa Demokrasi Dengan Kejujuran
- 10 Calon Perempuan Masih Minim
- 12 Data dan Fakta Pilkada Serentak 2017
- 14 Penyebar Hoax Harus Dihukum Tegas
- 16 Pilkada Berintegritas Demokrasi Berkualitas
- 18 KTP Palsu Masalah Serius
- 20 Politik Dinasti Hambat Perubahan Rezim
- 22 Sumbang Saran
Quo Vadis Pilkada Serentak : Deposit atau Defisit Demokrasi ?
- 24 Pengawasan
Pulau Kecil Terluar, Garda Terdepan Kedaulatan Negara
- 27 Profil
Ketika "Oemar Bakrie" Melenggang Ke Senayan
- Legislasi
- 30 Perkuat Sistem Presidensial
- 32 Junjung Asas Keterwakilan di Parlemen

- Anggaran
- 34 Pengelolaan Keuangan Haji Harus Sesuai Hukum Islam
- 38 Foto Berita
- 46 KUNKER
- Sorotan
- 58 DPR RI Dorong Pemerintah Terbitkan PP Prodi DLP
- 60 DPR dan Masyarakat Harus Bersatu Kontrol Kerja Pemerintah
- Liputan Khusus
- 62 DPR Dorong Pembentukan Kaukus Palestina Diseluruh Negara PUIC
- 64 DAPIL
- Pernik
- 69 Reformasi Kelembagaan Menuju Parlemen Modern
- Selebriti
- 72 Danang D'Academy : Politik Tidak Kejam
- Parlemen Dunia
- 74 Koalisi Partai Supermajority di Filipina
- Kiat Sehat
- 76 Mencegah Kanker Jiwa Merajalela
- 78 Pojok Parle

Penyerobotan Tanah

Kami adalah kuasa hukum dari Aziz Masfar bin M. Yunus, menyampaikan permohonan perlindungan hukum terkait kasus dugaan penyerobotan lahan Hak Guna Bangunan Nomor 2 sesuai SK Mendagri No. 224/HGB/BA/1970 tanggal 18-09-1970 atas nama Amran Masfar yang terletak di Kmp. Tanjung Gedong, Kel. Tanjung Duren, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat. dan digunakan untuk pembangunan Apartemen Central Park Podomoro City oleh PT. Agung Podomoro Group.

Atas tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 atas nama Amran Masfar seluas 23.600 M². dan belum pernah diperjualbelikan, namun ketika Amran Masfar masih hidup banjir melanda tempat tinggalnya yang menyebabkan sertifikat asli hilang. masalah tersebut telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat. Nomor Sket/823/III/2014/Reskrim.

Diduga telah terbit sertifikat palsu atas nama Amran Masfar sebanyak 7 buku sertifikat, kemudian ada pihak lain yang mengaku sebagai Amran Masfar dan telah menjual lahan tersebut.

bahwa telah dilakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan Jakarta Barat dan lahan tersebut masih atas nama Amran Masfar.

Bahwa HGB Nomor 2 atas nama Amran Masfar tersebut berakhir masanya pada tanggal 17-09-1990, namun berdasarkan Surat Keputusan Mendagri No. 155/HGB/DA/86 tertanggal 11 Maret 1986, menerbitkan HGB No. 2457 Tanjung Duren yang diberikan kepada PT. Sinar Slipi, kemudian di beli oleh PT. Agung Podomoro Group.

Bahwa PT. Agung Podomoro Group sepakat untuk membayar ganti rugi kepada Amran Masfar atau Kuasanya namun sampai saat ini tidak pernah terlaksana.

Kami memohon agar Komisi III dapat mengundang pihak terkait untuk menindaklanjuti masalah tersebut.

Heru Lestarianto, S.H., Sleman, D.I.Yogyakarta

Pengosongan dan pembongkaran bangunan di atas lahan PT KAI, sebagai berikut :

Kami adalah kuasa hukum sdr. Parno dan Nanik Suwarni yang telah menempati tanah PT. Kereta Api Indonesia selama kurang lebih 60 tahun.

Bahwa berdasarkan putusan No. 26/Pdt.G/2014/PN.Kdr. tanggal 10 Desember 2014 jo. No. 205/Pdt/2015/PT.Sby. tanggal 04 Agustus 2015. PT.KAI akan melaksanakan pengosongan dan membongkar bangunan yang berada diatas lahan milik PT KAI sampai batas waktu tanggal 20 Januari 2016. Dan bila sampai waktu yang telah ditentukan belum juga dikosongkan, maka Tim Penertiban Aset Daop 7 Madiun akan melakukan penertiban.

Menurut kami perintah pengosongan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena tidak adanya perintah bongkar dari pengadilan Negeri Kediri, selain itu juga karena adanya putusan No. W.14./U.2268/HK.02/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 perihal permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2014/PN/Kdr.

Kami memohon agar DPR RI memberikan perlindungan hukum terkait kasus tersebut.

Rekrutmen di Polda Sulselbar Tidak Transparan

Kami mengadakan proses rekrutman casis Polri di Polda Sulselbar yang tidak transparan dan sarat rekayasa, sebagai berikut :

Kami adalah orang tua dari Sdr. Ridwan peserta seleksi penerimaan calon siswa Polri di Polda Sulsel yang diduga dilakukan secara tidak transparan dan sarat dengan rekayasa oleh panitia pelaksana.

Bahwa pada proses pemeriksaan kesehatan, anak pengadu dinyatakan tidak lulus, tanpa ada penjelasan mengenai syarat yang tidak terpenuhi. Karena kesulitan mendapatkan informasi penyebab ketidaklulusan, pengadu akhirnya mengkonfirmasi lewat sms ke Kapolda Sulsel, dan dijawab bahwa anak pengadu dinyatakan tidak memenuhi syarat karena hasil pemeriksaan kesehatan yang kurang bagus (Leukosit 12.800 yang menandakan adanya infeksi) dan Kapolda menyarankan agar mengecek ulang di laboratorium.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium di RS. Awal Bros, diketahui bahwa darah rutin (Leukosit) dalam keadaan normal. Pengadu kemudian mengkonfirmasikannya kepada Dokter Desy (panitia pelaksana tes kesehatan), namun tidak ditanggapi.

Dengan kejadian tersebut, pengadu merasa bahwa anaknya telah dirampas haknya secara paksa untuk mengabdikan diri kepada negara sebagai Polisi oleh panitia pelaksanaan seleksi, dan menduga seleksi tersebut. sarat rekayasa tidak sejalan dengan semangat reformasi mental dan reformasi birokrasi sehingga akan melahirkan polisi-polisi yang tidak jujur.

Abdul Kadir Nongko, Wajo, Sulawesi Selatan

Sawong Aries Prabowo, SH, Kediri Jawa Timur



Perilaku Buruk Hakim dan Panitera

Mohon Ketua Komisi III DPR RI maupun Ketua Komisi IX DPR RI dapat mengawal/mengikuti/memanggil Komisi Yudisial RI

Dengan hormat surat dari Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman SPSI, perihal Penyampaian Bukti Baru terkait Perilaku Buruk Hakim dan Panitera PN Cibinong yang menangani perkara No.01/Pid.B/2012/PN Cbn.

Kami adalah kuasa hukum dari Sobari Bin Suhar, Terdakwa/Terpida dalam Perkara No.01/Pid.B/2012/ PN Cbn yaitu pencurian bola besi bekas seberat 5kg di lingkungan Pabrik Semen PT. Holcim yang telah divonis hakim tanpa melalui proses persidangan.

Bahwa Majelis Hakim dan Panitera PN Cibinong telah melanggar hak asasi terdakwa karena tidak memberi kesempatan terdakwa melakukan pembelaan dan menganggap kasus terdakwa atas nama Sobari Bin Suhar (klien kami) adalah sama dengan kasus terdakwa atas nama Samuri Bin Karmin.

Bahwa kedua kasus tersebut adalah berbeda yaitu terdakwa dalam perkara No.01/Pid.B/2012/PN Cbn tentang Pencurian Bola Besi Bekas 5 kg di luar lingkungan Pabrik PT.Holcim, sedangkan Perkara Atas Nama Samuri Bin Karmin No.02/Pid.B/2012/PN Cbn tentang Pencurian Bola Besi Bekas 45 kg di lingkungan Pabrik PT. Holcim.

Bahwa kami telah melaporkan tindakan Majelis Hakim dan Panitera yang tidak cermat dalam menangani perkara dan diduga melanggar kode etik, kepada KY namun KY seolah-olah lebih mempercayai terlapor (majelis hakim).

Kami memohon agar Komisi III DPR RI dan Komisi IX DPR RI mengawal dan memanggil KY terkait permasalahan tersebut.

Muhammad Sindhu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta



Penjelasan Pencemaran Nama Baik

Surat ini mengenai permohonan pelatihan dan penjelasan terkait pelaporan LSM Ranchunit oleh CV Sonia Persada ke Polres Bandung dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Bahwa LSM Ranchunit telah dilaporkan ke Polres Bandung oleh CV Sonia Persada dan diperiksa sebagai saksi berdasarkan surat panggilan No.5 Pgl/513/VII/2016/Reskrim, karena diduga melakukan fitnah terkait penyampaian tanggapan atas testimoni CV Sonia Persada yang telah membangun rumah dengan memanfaatkan limbah B3.

CV Sonia Persada adalah perusahaan yang telah diberikan ijin oleh BLHD Kabupaten Bandung melakukan pemanfaatan limbah B3, namun diduga melakukan pelanggaran tata kelola limbah B3.

Bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengelolaan B3 Kementerian Lingkungan Hidup No.B-848/Dep-IV/LH/PDAL/01/2013, CV Sonia Persada diminta untuk menghentikan sementara kegiatan pemanfaatan limbah B3 karena perusahaan tersebut masih terkait dengan perkara open dumping yang saat ini belum *incraht* dan lokasi kegiatan pemanfaatan limbah B3 oleh PT. Sonia Persada ternyata berbeda dengan ijin lokasi yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Bahwa ternyata CV Sonia Persada telah membangun rumah dengan memanfaatkan limbah B3 sebagaimana testimoni pada harian online Bandung Raya tanggal 28 Januari 2016, maka pengadu memberikan tanggapan karena pihak BLHD ternyata belum mencabut SK Penghentian Kegiatan CV Sonia Persada sehingga apa yang dilakukan CV Sonia Persada sebagaimana testimoni tersebut tidak sesuai dengan prosedur.

Bahwa atas tanggapan tersebut, kami dilaporkan oleh CV Sonia Persada dan telah memohon penjelasan kepada BLHD Kab. Bandung terkait tuduhan melakukan pencemaran nama baik.

Lulu Hakim, Bandung, Jawa Barat

PILKADA SERENTAK

SEMARAK BERDEMOKRASI

Indonesia negeri beragam etnis, budaya, dan agama. Ini jadi kekayaan Nusantara. Keragaman tersebut harus tetap terjaga di tengah kompetisi politik yang memanas. Beragam warna politik juga sangat kentara di Republik ini. Perhelatan pilkada serentak kloter kedua di 101 daerah, telah memperlihatkan heterogenya bangsa ini.



Rabu, 15 Februari lalu, televisi nasional tiada henti menayangkan hasil hitung cepat perolehan suara sementara para kontestan pilkada di sejumlah daerah. Hiruk pikuk komentar dan analisis para peneliti juga politisi bersahutan sejak pagi hingga larut malam. Sempat ada kekhawatiran terjadi konflik horizontal di beberapa daerah yang dianggap rawan. Tapi, pesta demokrasi daerah berjalan mulus, semarak, dan aman.

Dan yang paling menyita perhatian publik adalah pilkada di DKI Jakarta. Ini wilayah khusus, karena jadi ajang pertarungan para petinggi partai. Pilkada Jakarta, kata Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian, jadi barometer politik nasional. Sempat diterpa sentimen agama sebelum pilkada digelar, namun akhirnya pilkada Jakarta berlangsung aman. Hasilnya, dua kandidat bersaing ketat antara Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan hingga ke putaran kedua.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyerukan, supaya masyarakat tidak terpecah belah dengan pilkada, maka pilkada harus demokratis, jujur, adil, dan bersih. "Kalau tidak jujur, tidak bersih, tidak adil, tidak demokratis, bahkan ada campur tangan oknum-oknum aparat, pasti ada gejolak." Pilkada yang dihelat secara massal, memang, kerap menimbulkan gesekan di daerah. Itu sudah risiko berdemokrasi yang harus dihadapi.

Pilkada serentak 2017 ini merupakan kedua kali setelah yang pertama sukses digelar pada Desember 2015. Masih ada satu kali lagi pilkada serentak yang akan digelar pada 2018. Dengan pilkada massal ini diharapkan menghemat waktu dan anggaran. Waktu bisa dihemat. Tapi, anggaran tak sehemat yang diperkirakan. Di beberapa daerah, pilkada serentak tetap menelan anggaran yang mahal.

Di Kupang, misalnya, anggaran pilkada lebih dari Rp30 miliar. Cukup mahal, kata Hetifah. Di Jakarta lebih mahal lagi. Untuk dua putaran menelan anggaran Rp478 miliar lebih. Kita memang menginginkan anggaran pilkada serentak bisa dihemat, tapi tak menurunkan kualitas demokrasi itu sendiri. Biaya kampanye para calon kepala daerah juga diupayakan lebih murah, agar tokoh-tokoh berkualitas

berani maju, bukan karena kekuatan modal.

UU No.10/2016 tentang Pilkada telah dirancang sebaik mungkin untuk menekan biaya penyelenggaraan, termasuk biaya kampanye para pasangan calon. Bahkan, segala bentuk kecurangan dalam pilkada juga sudah diantisipasi dengan sanksi yang jelas. Lalu, apa pelajaran yang bisa kita petik dari perhelatan pilkada serentak ini, karena kita harus menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Apalagi, pasca-pilkada energi kita juga masih terkurasi dengan pengaduan kecurangan dan gugatan ke MK. Belum lagi, masih ada putaran kedua pilkada Jakarta.

Bob Ronaldi Randilawe dalam opininya di majalah ini, menulis, pola relasi masyarakat mengalami perubahan, dari relasi *patron-client* menjadi relasi kepentingan. Pola relasi berdasarkan kepentingan pada akhirnya akan menuju kepada pola relasi sosial-politik transaksional dimana faktor-faktor fungsional dalam arti hubungan kepentingan antar individu, antar kelompok, antar komunitas, bahkan antar golongan tidak dapat dihindari.

Bob mengkhawatirkan, ada pergeseran formasi sosial politik dari pilkada serentak ini. Untuk itu, negara harus mengontrolnya agar fluktuasi sosial-politik tidak menjadi liar. "Kondisi *uncontrollable* dikuatkan akan memicu situasi *chaotic* yang selanjutnya akan menciptakan kondisi *failed-state* (negara gagal). Konsep antisipatif sebenarnya telah diciptakan oleh Presiden Jokowi dengan program Nawacita yaitu menghadirkan negara dalam berbagai sektor prioritas dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan," tulisnya.

Peneliti dari Universitas Indonesia Chusnul Mar'iyah menyorot sisi lain pilkada serentak atas dilema dinasti politik. Keputusan dan etika berpolitik mesti diperhatikan. Kasus pilkada Klaten dan Kediri menjadi ironi demokrasi. Di Klaten, bupati yang menjabat adalah istri bupati terdahulu. Kini, sang bupati mendekam dalam tahanan KPK, karena OTT kasus pengaturan jabatan. Suami istri mewarisi kekuasaan hanya untuk keluarganya sendiri.

Di Kediri lebih parah lagi. Istri pertama dan kedua sang bupati lama, diadu dalam kontestasi pilkada. Ironis sekali. Sepertinya bangsa ini kehabisan



Pilkada serentak 2017 ini merupakan kedua kali setelah yang pertama sukses digelar pada Desember 2015. Masih ada satu kali lagi pilkada serentak yang akan digelar pada 2018.

putra-putri terbaiknya untuk dijadikan kepala daerah. "Bangunan feodalisme dan dinasti masih kuat di Republik ini. Mereka mungkin menginginkan bisa berkuasa tanpa pemilu. Beberapa kasus dinasti perlu dipikirkan kembali. Kepatutannya sampai sejauh mana. Ini sudah tidak ada etika dan kepatutan.

Bahkan, dosen FISIP UI ini juga mengusulkan agar pemilihan bupati dan wali kota dikembalikan saja ke DPRD. Hanya gubernur dan wakil gubernur yang dipilih langsung. "Jadi, kita kembali lagi pada bangunan konstitusi. Dalam pilkada serentak, salah satu poin yang paling penting adalah Republik ini terfragmentasi luar biasa. Kosolidasi negara sulit, karena setelah pilkada ada banyak urusan dari hasil pilkada, seperti urusan ke MK, urusan ke KPK, dan urusan pidana pilkada," ungkapnya.

Pilkada serentak 2018 nanti harus lebih baik. Berbagai bentuk kecurangan dan hambatan pada pilkada serentak 2017 ini harus sudah diinventarisasi. Persoalan dinasti dan calon tunggal di sejumlah daerah perlu pula dipikirkan kembali untuk kebaikan demokrasi di daerah. Namun, kita patut mengapresiasi pilkada kali ini. Tingkat partisipasi pemilih meningkat dan pilkada berjalan sangat aman. ■

Menegakkan Wibawa Demokrasi dengan Kejujuran

Netralitas para penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi salah satu kunci kesuksesan pilkada serentak yang dihelat di 101 daerah.

Kualitas pilkada yang jujur, adil, demokratis, dan bersih harus menjadi jaminan, agar tak ada perpecahan pasca-pilkada. Dari pengalaman pilkada serentak 2015 dan kini 2017, banyak yang perlu diantisipasi dari berbagai kecurangan pilkada.

Sepekan sebelum pilkada serentak, Parlemntaria menemui Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon untuk sesi wawancara tentang pilkada serentak. Banyak isu diperbincangkan, dari soal UU pilkada, penggunaan KTP elektronik, cara penghitungan cepat, hingga penyelenggara pemilu, jadi isu krusial setiap kali pilkada digelar. Berikut petikan lengkap hasil wawancaranya.

Apa yang diamanatkan UU No.10/2016 terhadap pelaksanaan pilkada serentak?

Pilkada adalah amanat undang-undang (UU), yang ketika itu telah ditetapkan dengan mekanisme pilkada serentak. Saat ini dibagi dalam tiga gelombang, tahun 2015, 2017, dan 2018. Setelah itu, akan menjadi pilkada serentak di seluruh Indonesia. Diharapkan pilkada serentak ini bisa memberikan efisiensi dari sisi *budget* maupun usaha-usaha politik yang begitu masif. Dulu, kan, ada kritik, hampir tiap hari ada pilkada di Indonesia. Kini, saya kira dengan pengelompokan sudah lebih baik.

Apa evaluasi yang bisa disampaikan dari pilkada serentak?

Dari sisi penyelenggaraan masih tinggi biayanya. Ke depan, saya kira sambil mengikuti pilkada tahap kedua dan tahap ketiga, tentu bisa dilihat juga titik lemah dan titik kuatnya. Kelemahan dan kekuatannya ada di mana. Misalnya, dari sisi persiapan, pelaksanaan, dan kemudian pasca pelaksanaan. Dari sisi persiapan, saya kira tidak ada masalah, kita punya anggaran dan sebagainya.

Dari sisi pelaksanaan, dulu diduga ada keributan. Makanya, mudah-mudahan ini tidak akan terjadi. Dari sisi pasca-pelaksanaan, terutama sengketa-sengketa pasca pilkada yang ditangani MK (M a h k a m a h

Diharapkan pilkada serentak ini bisa memberikan efisiensi dari sisi *budget* maupun usaha-usaha politik yang begitu masif.

foto: Anief/iw

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon

Konstitusi). Kini, MK punya mekanisme. Di bawah dua persen, maka itu tidak akan ditangani MK, tidak akan diteruskan. Saya kira itu salah satu cara mekanisme untuk menyaring.

Apa yang paling urgen untuk diantisipasi dari pilkada Serentak?

Menurut saya yang paling penting sekarang ini adalah, bagaimana setiap orang yang memiliki hak pilih di daerah, jangan sampai tidak digunakan. Kalau tidak digunakan melanggar konstitusi. Misalnya, masalah administratif, tidak punya E-KTP. Padahal, E-KTP belum selesai. Atau tidak ada surat panggilan dan tidak mendapat surat keterangan. Ini yang seharusnya kita hindari.

Apalagi yang perlu diantisipasi?

Para pemilih siluman yang mau berbuat curang, yang kadang jumlahnya lumayan. Masalah ini berbeda-beda di setiap daerah. Lalu, kecurangan di TPS. Ini juga yang paling sering terjadi. Jumlah suara bisa berubah-ubah. Yang perlu disoroti dalam pilkada ini, bagaimana harus berjalan jujur, adil, demokratis, dan bersih, serta tidak ada kecurangan-kecurangan.

Apa harapan Anda untuk kemajuan pemungutan suara ke depan?

Ke depan yang harus kita garis bawahi, bagaimana menggunakan sistem yang mempercepat dan mempertajam (red-akurat) supaya tidak ada kecurangan. Di India ada *Electoral Voting Mechin* (EVM). Mereka kurang dari 24 jam sudah tahu hasil pemungutan suara. India



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon

Foto: Anief/iw

Yang perlu disoroti dalam pilkada ini, bagaimana harus berjalan jujur, adil, demokratis, dan bersih, serta tidak ada kecurangan-kecurangan.

ini, kan, negara demokrasi yang cukup besar jumlahnya. Pemilihnya berjumlah 844 juta. Mereka tidak ada sengketa pemilu. Karena mereka sistemnya perlementer.

Presiden dan Perdana Menteri dipilih parlemen, jadi tidak langsung. Tetapi dengan adanya EVM itu tidak ada sengketa, semua orang bisa menerima. Kita harus punya mekanisme seperti itu ke depan. Jangan lagi menggunakan kertas yang memakan banyak biaya. Kita harus punya sistem digital atau

elektronik untuk pemilu yang tidak bisa di *hack*.

Apakah itu membutuhkan basis IT yang kuat?

Kalau di India tidak menggunakan basis IT. Waktu saya ke India tahun 2015, saya ketemu dengan KPU India. Mereka mengungkapkan harga satu mesin 250 USD. Dan bisa dipakai untuk tiga kali pemilu. Termasuk dipakai untuk pilkada dan lain-lain. Usia mesinnya itu bisa sampai 15 tahun. Biayanya jauh lebih murah. Dilihat dari tingkat pendidikan, apakah masyarakat Indonesia sudah siap?

Di India itu masyarakatnya banyak yang buta huruf, tidak bisa baca tulis. Itu aja bisa. Tinggal bagaimana KPU menyosialisasikannya. Hampir sebagian negara-negara besar dan maju menggunakan sistem itu. Yang masih pakai paku, itu tinggal sedikit.

Apa yang perlu dilakukan pasca pilkada agar masyarakat tidak terpecah belah?

Ini adalah risiko demokrasi. Supaya masyarakat tidak terpecah belah, maka pilkada maupun pemilu harus demokratis, jujur, adil, bersih. Kalau masyarakat tahu, semua berlangsung jujur, bersih, adil, dan sebagainya, pasti akan terima. Tetapi begitu tidak jujur, tidak bersih, tidak adil, tidak demokratis, bahkan ada campur tangan oknum-oknum aparat, itu pasti marah.

Bagaimana dengan netralitas penyelenggara pemilu?

Ya terus terang saja, kadang-kadang tidak sesuai harapan kita. Kadang ada keberpihakan. Mudah-mudahan ke depan penyelenggara pemilu dan pilkada ini harus orang-orang yang netral. Bukan bagian dari tim kampanye calon-calon tertentu. ■

(dep.sfi), (eko)

Calon Perempuan Masih Minim

Dari 101 daerah yang menggelar Pilkada serentak 2017, calon kepala daerah perempuan masih minim partisipasi. Kaum hawa yang berani mencalonkan dalam pilkada serentak tahun ini hanya 7,17 persen. Butuh keberanian untuk tampil menjadi kepala daerah.

Siang itu, sepekan menjelang pilkada serentak, Parlemen bertandang ke ruang Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian. Banyak isu yang diperbincangkan seputar pilkada serentak kali ini. Di antaranya yang mengemuka adalah minimnya partisipasi perempuan dalam pemilihan kepala daerah. Ia berharap, para perempuan terbaik tampil di setiap daerah yang menggelar pilkada.

Politisi Partai Golkar ini, mengungkap data terkini pilkada serentak 2017. Ada 44 calon kepala daerah perempuan yang berpartisipasi dari 614 calon dalam pilkada. Dari 44 calon itu, 2 calon untuk gubernur, 6 calon wali kota, 15 calon bupati, 2 calon wakil gubernur, 4 calon wakil wali kota, dan 15 calon wakil bupati. Partisipasi 7,17 persen perempuan terlalu minim dari banyaknya daerah yang menggelar pilkada serentak tahun ini.

"Kita sayangkan calon-calon perempuan masih belum sebanyak yang kita harapkan. Total calon kepala daerah perempuan baru 7,17 persen. Padahal, biaya pilkada sudah diupayakan murah bagi para calon. Harusnya calon-calon yang punya kompetensi dan calon perempuan bisa lebih berani maju. Kita ingin calon perempuan bisa mencapai 30 persen. Setidaknya, dalam suatu kontestasi di daerah ada perempuan yang mencalonkan diri," harap Hetifah.

Dia tidak menginginkan semua calon kepala daerah laki-laki.

Perempuan harus proaktif berpartisipasi dalam kontestasi politik daerah. Saat ini saja masih terlalu sedikit perempuan yang memimpin daerah. Dari 44 calon kepala daerah perempuan pada 2017 ini, tentu tidak semuanya terpilih. Jadi kepala daerah perempuan kian sedikit.

Ditambahkan Hetifah, para kepala daerah yang muncul diharapkan adalah tokoh-tokoh yang dianggap masyarakat mampu, bukan karena kekuatan modal. "Pilkada serentak ini, bukan semata-mata waktunya bersamaan, tapi pengaturannya pun bisa menghasilkan calon-calon yang baik," seru Hetifah lagi.

Dalam hal kampanye, UU No.10/2016 tentang Pilkada mengatur ketentuan biaya kampanye bagi para calon yang sebenarnya sudah ditekan. Mencetak baliho harusnya dibiayai negara. Dengan begitu, ada keadilan dalam proses sosialisasi para calon. "Yang tidak kaya pun bisa berani mencalonkan diri. Ke depan, kita harapkan pilkada bisa memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan tahu kapasitas para calonnya."

Menurut politisi dari dapil Kaltim dan Kaltara tersebut, pilkada yang dihelat serentak ini dimaksudkan untuk menggugah perhatian masyarakat luas agar mau memilih

"Pilkada serentak ini, bukan semata-mata waktunya bersamaan, tapi pengaturannya pun bisa menghasilkan calon-calon yang baik"



Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian

foto: Iwan/iw

Calon-calon perempuan masih belum sebanyak yang kita harapkan. Total calon kepala daerah perempuan baru 7,17 persen. Padahal, biaya pilkada sudah diupayakan murah bagi para calon.



<http://www.budi-usman.com>

pemimpinnya yang terbaik. Selain itu, dengan pilkada serentak, bisa menghemat waktu dan menyemarakkan pesta demokrasi di daerah.

Namun, pilkada serentak belum berbanding lurus dengan penghematan anggaran. Di beberapa daerah, anggaran pilkada ternyata tidak menurun, bahkan membengkak. "Kita ingin pilkada serentak ini bisa lebih efisien waktu dan anggaran. Tapi, praktiknya yang saya amati belum murah biaya pelaksanaannya. Di Kupang, misalnya, lebih dari Rp30 miliar. Cukup mahal," nilai Hetifah.

Pilkada mahal bukan saja dalam penyelenggaraannya, tapi setiap calon juga harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Ini memberi kesan, hanya orang-orang yang punya modal besar yang ikut kontestasi dalam pemilihan kepala daerah. "Itu tidak kita harapkan," komentar Hetifah, singkat.

Kecurangan dan E-KTP

Pilkada serentak 2017 sudah digelar di 101 daerah, yang terdiri dari 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Kecurangan berupa manipulasi suara dan E-KTP ganda masih mewarnai perhelatan pesta demokrasi di berbagai daerah. Praktik kecurangan, memang, harus terus dikurangi, bahkan ditiadakan.

Pilkada serentak 2015 telah memberi pengalaman berharga bagaimana harus mengantisipasi kecurangan pilkada sejak dini.

UU No.10/2016 yang ada sekarang merupakan revisi UU lama, hasil belajar dari pilkada serentak 2015. Dalam UU ini banyak sekali perubahan mendasar untuk merespon masalah kecurangan. UU ini juga memperkuat organisasi penyelenggara pemilu, khususnya pengawas. "Mereka diberi kewenangan yang jauh lebih besar. Dulu sengketa hasil pemilu banyak

dilempar ke MK. Saat ini Panwaslu bisa mendiskualifikasi calon bila melakukan politik uang. Sanksi-sanksi juga diperjelas," papar Hetifah.

Dengan sistem KTP elektronik, mestinya tidak ada lagi pemalsuan identitas para pemilih, karena semua data sudah terekam dengan baik. Hanya persoalannya, para pemilih yang kebetulan belum mendapat KTP elektronik, harus menggunakan surat keterangan (surket) dari Disdukcapil setempat untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Surket inilah yang rawan disalahgunakan.

"Untukantisipasi pemalsuan, surket harus cap basah dan digunakan hanya di RT/RW setempat. Dengan begitu, bisa dicek apakah pemilih merupakan penduduk asli setempat atau bukan," terang Hetifah. Ke depan, sambung Hetifah, UU Pilkada mengamanatkan, tahun 2018 perekaman data penduduk untuk KTP elektronik harus sudah rampung 100 persen. Jadi, pilkada maupun pemilu sudah harus menggunakan KTP elektronik.

Untukantisipasi pemalsuan, surket harus cap basah dan digunakan hanya di RT/RW setempat.

"Kami menemukan di Aceh ada 1.000 lebih narapidana penguni LP, ternyata belum direkam dan belum punya E-KTP. Padahal, mereka punya hak pilih. Kemudian di daerah perbatasan dan terpencil, kalau Disdukcapilnya tidak proaktif, masyarakat sulit mendapatkan E-KTP. Diharapkan KTP ganda tidak ada lagi, karena E-KTP sebenarnya sulit dipalsukan," ungkapnya. ■

(mh)

Data dan Fakta Pilkada Serentak 2017

Pilkada serentak jadi tumpuan melahirkan para kepala daerah berkualitas dan berintegritas. Perubahan rezim di daerah juga diharapkan banyak terjadi. Pilkada di 101 daerah memunculkan data dan fakta yang signifikan sebagai bahan analisa sosial-politik di Tanah Air. Berikut ini kami tampilkan sebagian data dan fakta hasil pilkada serentak Februari 2017 yang dihimpun dari berbagai sumber.

Pilkada Gubernur DKI Jakarta (hasil hitung cepat putaran I)

Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni	17,96%
Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat	42,27%
Anies Baswedan-Sandiaga Uno	39,77%

Pilkada Kota Cimahi (hasil hitung cepat)

Atty Suharti-Achmad Zulkarnain	29,22%
Asep Hadad Didjaya- RA Irma Indriyani	30,29%
Ajay Muhammad Priatna-Ngatiyana	40,49%

Pilkada Kab. Bekasi (hasil hitung cepat)

Meilina Kartika Kadir-Abdul Kholik	8,79%
Sa' duddin-Dhani Ahmad Prasetyo	24,03%
Obon Tabroni-Bambang Sumaryono	17,03%
Iin Farihin-Mahmud	7,92%
Neneng Hasanah Yasin-Eka S Atmaja	42,23%

Pilkada Kota Tasikmalaya (hasil hitung cepat)

R. Dicky Candranegara-Denny Ramdany	22,54%
Budi Budiman-Muhammad Yusuf	40,06%
Dede Sudrajat-Asep Hidayat Surdjo	37,40%

Pilkada Gubernur Banten (hasil hitung cepat)

Wahidin Halim-Andika Hazrumy	50,32%
Rano Karno-Embay Mulya Syarif	49,68%

Pilkada Gubernur Gorontalo (hasil hitung cepat)

Hana Hasanah Fadel-Tonny S Junus	25,86%
Rusli Habibie-Hi Idris Rahim	50,65%
Zainuddin Hasan-Adhan Dambea	23,49%

Pilkada Kab. Muaro Jambi (hasil hitung cepat)

Abun Yani-Suhariyanto	4,47%
Agustian Mahir-Suswiyanto	22,77%
Masnah-Bambang Bayu Suseno	40,09%
Ivan Wirata-Dodi Sularso	32,68%

Pilkada Kab. Sarolangun (hasil hitung cepat)

Muhammad Madel-Musharsyah	44,26%
Cek Endra-Hillalatil Badri	55,74%

Pilkada Kab. Mesuji (hasil hitung cepat)

Febrina Lesisie Tantina-M Adam Ishak	26,89%
Khamami-Saply Th	73,11%

Pilkada Kab. Payakumbuh (hasil hitung cepat)

Wendra Yunaldi-Ennaidi	19,34%
Riza Falepi-Erwin Yunaz	43,63%
Suwandel Muchtar-Fitrial Bachri	37,03%

Pilkada Kota Tebing Tinggi (hasil hitung cepat, calon tunggal)

Umar Zunaidi Hasibuan-Oki Doni Siregar	71,39%
--	--------

Pilkada Kab. Tebo (hasil hitung cepat)

Hamdi-Harmain	44,64%
Sukandar-Syahlan	55,36%

Pilkada Kab. Lampung Barat (hasil hitung cepat)

Parosil Mabsus-Mad Hasnurin	57,02%
Edy Irawan Arief-Ulul Azmi Soltiansa	42,98%

Pilkada Kab. Tulang Bawang Barat (hasil hitung cepat, calon tunggal)

Umar Ahmad-Fauzi Hasan	96,75%
------------------------	--------

Pilkada Kab. Musi Banyuasin (hasil hitung cepat)

Dodi Reza Alex Noerdin-Beni Hernedi	78,49%
Amiri Aripin-Ahmad Toha	21,51%

Pilkada Kab. Pringsewu (hasil hitung cepat)

Ardian Saputra-RA Dewi Arimbi	35,44%
Hi Sujadi-Fauzi	45,99%
Siti Rahma-Edi Agus Yanto	18,57%

Pilkada Kab. Bengkulu Selatan (hasil hitung cepat)

Medio Yulistio-Abdu Rani	4,67%
Ferry Ramli dan Septi Peryadi	55,02%
M Sabri dan Naspian	40,31%

Pilkada Kab. Batang (hasil hitung cepat)

Wihaji-Suyono	56,61%
Lafran Pancaputranto- Nurhaji Slamet Urip	26,94%
AS Burhan-Acara Ariani	14,59%
Akhmad Faizin-Erna Yuniwati	1,87%

Pilkada Kab. Jepara (hasil hitung cepat)

Subroto-Nur Yahman	48,75%
Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi	51,25%

Pilkada Kab. Banjarnegara (hasil hitung cepat)

Hadi Supeno-Nur Heni Widayanti	20,09%
Wahyu Kristianto-Saeful Muzad	25,70%
Budhi Sarwono-Syamsudin	54,21%

Pilkada Kota Salatiga (hasil hitung cepat)

Agus Rudianto-Dance Ishak Palit	49,41%
Yuliyanto-Muh Haris	50,59%

Pilkada Kab. Kulon Progo (hasil hitung cepat)

Zuhadmono Azhari-BRAy Iriani Pramastuti	14,38%
Hasto Wardoyo-Sutedjo	85,62%

Pilkada Kota Tasikmalaya (hasil hitung cepat)

R Dicky Candranegara dan Denny Romdony	22,54%
Budi Budiman dan Muhammad Yusuf	40,06%
Dede Sudrajat dan Asep Hidayat Surdjo	37,40%



Pilkada Kota Batu (hasil hitung cepat)

Rudi-Sujono	20,82%
Dewanti Rumpoko-Punjul Santoso	44,46%
Hairuddin-Hendra Angga Sonatha	17,62%
Abdul Majid-HA Kasmiri Idris	17,10%

Pilkada Kab. Buleleng (hasil hitung cepat)

Dewa Nyoman Sukrawan-I Gede Dharma Wijaya	31,80%
Putu Agus Suradnyana-I Nyoman Sutjindra	68,20%

Pilkada Kota Singkawang (hasil hitung cepat)

Tjhai Nyit Khim-Suriyadi	13,50%
Tjhai Chui Mie-Irwan	42,60%
Abdul Mutalib-Muhammadin	26,78%
Andi Syarif TUW-Nurmansyah	17,13%

Pilkada Kab. Buton (hasil hitung cepat, calon tunggal)

Samsu Umar Abdul Samiun-La Bakry	55,08%
----------------------------------	--------

Pilkada Kab. Lembata (hasil hitung cepat)

Herman Yosef Loli Wutun-Yohanes Viary K Burin	26,18%
Viktor Mado Watun-Muhamad Nasir	23,35%
Lukas Lipataman-Ferdinandus Leu	7,77%
Tarsisia Hani Chandra-Linus Beseng	4,39%
Elaser Yentji Sunur-Thomas Ola	38,31%

Pilkada Kab. Landak (hasil hitung cepat, calon tunggal)

Karolin Margret Natasa dan Herculanus Heriadi	96,62%
---	--------

Pilkada Kab. Kotawaringin Barat (hasil hitung cepat)

Bambang Purwanto-Said H Syamsuddin Noor	15,43%
Indrawan Sakti-Norhanuddin AR	5,20%
Nurhidayah-Ahmadi Rihsyah	52,43%
Desi Hercules-Gusti Moch Awaludin M	18,94%
Eko Soemarno-Yudie	8,01%

Pilkada Kab. Barito Kuala (hasil hitung cepat)

Noormiliyani AS-Rahmadian Noor	48,81%
Bahriannoor-Suwandi	16,96%
Hasan Ismail-Fahrin Nizar	34,22%

Pilkada Kab. Barito Selatan (hasil hitung cepat)

Muhammad Farid Yusran-Sukanto	48,62%
Eddy Raya Samsuri-Satya Titiek Atyani Djoedir	51,38%

Pilkada Kab. Banggai Kepulauan (hasil hitung cepat)

Delmard Siako-Nadjib Bangunan	12,01%
Hery Ludong-Adjumain Lumbon	15,77%
Zainal Mus-Rais D Adam	39,33%
Irianto Malingong-Hesmon Firatoni VL Pandili	32,89%

Pilkada Kab. Boalemo (hasil hitung cepat)

Darwis Moridu-Anas Jusuf	60,30%
Uwes Amir Abubakar-Buyung J Puluhulawa	39,70%

Pilkada Kab. Hulu Sungai Utara (hasil hitung cepat)

Abdul Wahid HK-Husairi Abdi	68,84%
Mukhsin Haita-Abd Hasib Salim	31,16%

Pilkada Kab. Bolaang Mongondow (hasil hitung cepat)

Yasti Soepredjo Mokoagow-Yanny Ronny Tuuk	64,88%
Hi Saihi Mokodongan-Jefri Tumelap	35,12%

Pilkada Kab. Takalar (hasil hitung cepat)

Burhanuddin B-M Natsir Ibrahim	49,42%
Syamsari-Achmad Dg Se're	50,58%

Pilkada Kota Kendari (hasil hitung cepat)

Abdul Rasak-Haris Andi Surahman	36,86%
Adriatma Dwi Putra-Sulkarnain	41,00%
Mohammad Zayat Kaimoeddin-Suri Syahriah Mahmud	22,14%

Pilkada Gubernur Papua Barat (hasil hitung cepat)

Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani	69,0%
Irene Manibuy-Abdullah Manaray	24,73%
Stepanus Malak-Ali Hindom	6,93%

Pilkada Gubernur Bangka Belitung (hasil hitung cepat)

Yusron Ihza-Yusroni Yazid	17,84%
Rustam Effendi-M. Irwansyah	22,90%
Hidayat Arsani-Sukirman	18,19%
Erzaldi Rosman-Abdul Fattah	41,70%

Pilkada Kab. Jepara (hasil hitung cepat)

Subroto-Nur Yahman	48,75%
Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi	51,25%

*Rangkuman dari beberapa macam sumber



Penyebar *Hoax* Harus Dihukum Tegas

Pelaksanaan pilkada serentak pada Februari 2017 yang lalu di 101 daerah menjadi sorotan banyak pihak. Hiruk pikuk pilkada tak terhindarkan, baik di dunia nyata dan dunia maya. Masyarakat pun berlomba-lomba mengkampanyekan calon yang diusungnya. Bahkan, di beberapa daerah seperti Papua Barat, Sulawesi, dan Maluku sempat didefinisikan sebagai daerah rawan konflik akibat Pilkada.

Di tengah kesibukannya, Parlemenaria berkesempatan menemui Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria, sepekan sebelum pilkada dihelat. Ia mengimbau masyarakat agar tenang dan tidak terprovokasi atas kegaduhan yang terjadi selama proses dan pasca-pilkada. Hal ini guna menjaga keharmonisan antarmasyarakat. Mengingat, Indonesia memiliki beragam suku, agama dan ras. Meskipun berbeda posisi politik, namun semangat persatuan dan persaudaraan tidak boleh terpecah belah.

"Kita imbau masyarakat untuk tenang dan tidak terprovokasi. Apapun harus dicermati dan diteliti. Jangan mudah tersulut dan terprovokasi. Semua saudara sebangsa dan setanah air. Kita perlu mengedepankan perstauan, kesatuan, dan kebhinekaan," ujar Ariza, sapaan akrabnya saat ditemui di Gedung DPR RI, sepekan sebelum perhelatan pilkada serentak.

Imbauan agar masyarakat tenang tidak lepas dari beberapa persoalan yang dihadapi, seperti daftar pemilih tetap (DPT), persoalan E-KTP, *money politics*, serta informasi bohong atau *hoax* yang beredar di media sosial. "Ya pilkada ini menjadi konsensus Pemerintah dengan DPR RI melalui tiga tahapan. Kita bersyukur bahwa pilkada 2015 telah berhasil, sekarang masuk tahap kedua yakni 2017 di 101 daerah di Indonesia," tuturnya.

Mengenai politik uang, Politisi Gerindra ini berharap, siapapun yang melakukannya dapat diberikan efek jera. Tak hanya sanksi yang tegas, tetapi juga diperlukan sanksi yang berat. "Yang masih signifikan yakni *money politics*. Kita berharap dengan adanya UU baru ini, memberi sanksi tidak hanya lebih tegas tapi juga lebih berat. Pada pasangan calon peserta, parpol, dan masyarakat yang menerima itu dapat pidana," tandas Ariza.



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria

Foto: arief/iw

Imbauan agar masyarakat tenang tidak lepas dari beberapa persoalan yang dihadapi, seperti daftar pemilih tetap (DPT), persoalan E-KTP, *money politics*, serta informasi bohong atau *hoax* yang beredar di media sosial.

melakukan penyebaran berita fitnah dan *hoax* harus segera diproses hukum. Pemerintah dan masyarakat pun diminta aktif untuk menghadapi persoalan ini. "Sudah jelas di UU ITE. Kita minta pemerintah dan masyarakat aktif. Meskipun sejauh ini belum terlihat optimal," tuturnya.

"Kita minta," tambah Ariza lagi, "Semua optimal dan tidak ada yang pilih kasih. Setiap yang dilaporkan harus ditindaklanjuti sesuai UU yang ada agar memberikan efek jera bagi semua. Persoalan berita *hoax* dan fitnah ini memang berbahaya. Bangsa kita heterogen bahasanya, suku, agama, dan ras. Jadi, mudah disulut oleh orang yang tidak baik. Oleh karena itu, kita harus sama-sama sadar akan kebersamaan kita," jelas Ariza.

Terhadap hasil pilkada yang nantinya akan diumumkan, Ariza pun mengimbau kepada semua pihak untuk tetap tenang terhadap hasil Pilkada. Kepada para pemimpin juga agar tetap memberikan kontribusi

dalam menjalin perdamaian di antara masyarakat, bukan justru memprovokasi masyarakatnya. "Tugas pemimpin itu memberi contoh, menenangkan, dan selalu berada di lingkungan masyarakatnya, supaya bisa terjangkau dan terkendali," ucapnya.

"Jangan sampai seorang pemimpin tidak ada di lingkungannya. Nanti masyarakat bisa berbuat sesuai apa yang dikehendaknya, karena tidak ada yang mengontrol dan mengawasi. Pemimpin harus ada di lingkungannya untuk memberikan contoh teladan dan mengawasi serta mengarahkan pada hal-hal yang baik," jelas Ariza.

Indonesia sebagai negara demokratis yang cukup diakui dunia tentu menginginkan demokrasi mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Oleh karena itu, semua pihak tidak ingin fitnah atau *hoax* menjadi penghalang untuk mencapai tujuan demokrasi tersebut. ■ (hs)

Mengenai hiruk pikuk dan maraknya berita *hoax*, Ariza pun berharap hal ini segera disudahi, pasca-pilkada pun diharapkan seluruh elemen masyarakat bisa kembali bersatu dan kehidupan masyarakat kembali normal seperti semula. "Bahkan terjadi rekayasa dan pemalsuan di medsos. Yang demikian dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab. Ini sudah terjadi *hoax* yang memprovokasi. Setelah pilkada selesai, semua diharapkan normal pada kehidupan masing-masing dalam membangun bangsa ke depan," harap Ariza.

Legislator dari dapil Jawa Barat III ini pun berharap, siapapun yang



Pilkada Berintegritas Demokrasi Berkualitas

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak penting bagi proses demokratisasi di Indonesia. Pilkada ini juga bisa jadi tolok ukur sekaligus bekal partai politik dalam kontestasi pemilu serentak 2019. Penyelenggara pilkada, KPUD dan Bawaslu dinilai sudah maksimal bekerja, walau masih ditemukan masalah di beberapa daerah.

Lima hari sebelum pilkada serentak dihelat, ada diskusi penting menyangkut perkembangan politik mutakhir di Tanah Air. Bertempat di *Option Room*, DPR RI, hadir para pembicara penting yang menduduki jabatan strategis sebagai penyelenggara pemilu. Komisioner KPUD, Bawaslu, akademisi, hingga Pimpinan DPR RI urun rembuk membincang pesta demokrasi daerah.

Komisioner KPUD DKI Betty Epsilon Idroos mengaku, sudah maksimal melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait teknis aturan pilkada. Profesional, independen, dan mandiri adalah nilai dasar para komisioner dalam menjalankan tugasnya. "Tolong ingatkan kami, tolong kalau ada temuan disampaikan kepada KPU Jakarta. Kami akan menerima masukan usulan dengan tangan terbuka," papar Betty saat acara diskusi bertajuk "Menyongsong Pilkada Serentak 2017 Jujur dan Damai".

Sosialisasi mengenai mekanisme pelayanan terhadap ketiga kategori pemilih yang hendak menyoblos, telah dijelaskan oleh KPU, yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), dan Daftar

Pemilih Tambahan (DPTb). Mengenai pelayanan terhadap DPT, dijelaskan bahwa pemilih perlu menyerahkan form C6-KWK, atau jika tidak punya bisa menunjukkan e-KTP, KTP, atau paspor.

Selain saksi dari pasangan calon, pemungutan suara di tiap TPS juga telah diawasi oleh pengawas TPS yang merupakan bagian dari Bawaslu DKI Jakarta. Pemungutan dan penghitungan suara juga dilakukan secara terbuka. Masyarakat bisa turut mengawasi dari luar TPS.

Betty mengatakan, upaya pencegahan kecurangan telah dilakukan dengan mengadakan bimbingan teknis kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemungutan suara (PPS), hingga panitia pemilihan kecamatan (PPK). Selain itu, seluruh penyelenggara pemilu juga membuat dan menandatangani surat pernyataan bahwa dirinya imparial, independen, dan akan menjalankan tugas secara profesional. Apabila ada dugaan kecurangan yang ditemukan, lanjut Betty, siapa pun bisa melaporkannya ke Bawaslu atau KPU.

Di kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Muhammad, berhasrat ingin mempersembahkan kepada rakyat Indonesia kado terbaik berupa pilkada serentak 2017 yang berintegritas. "Saudara-saudara apa yang saya maksud ingin mempersembahkan kado

terindah untuk pemilu demokratis, pemilu berintegritas, pemilu inklusif adalah, kita terus membangun apa yang disebut dengan demam pengawasan pemilu," tandasnya.

Muhammad menjelaskan, yang dimaksud 'demam pengawasan pemilu' adalah tanggung jawab pengawasan pemilu tidak hanya dibebankan kepada aparat yang bertugas saja. Pengawasan partisipatif juga wujud dari masyarakat madani yang turut serta dalam mewujudkan demokrasi yang akuntable dan berkeadaban. Menurut Muhammad, jika kesadaran masyarakat pada pemilu yang adil dan suportif sudah tumbuh, maka masalah-masalah dalam proses berdemokrasi dapat diatasi dengan mudah.

"Itu bukan tanggung jawab panwas saja, tapi tanggung jawab



Foto: 22ka/iw

Ketua Bawaslu Muhammad



Foto: iaka/iw



Foto: iwan/iw

Aktivitas pencoblosan di TPS dalam Pilkada Serentak 2017

kita bersama. Kalau itu sudah terbangun apapun yang akan terjadi, apapun persoalan pengawasan pada pilkada dan pemilu ini, kita terpanggil berkontribusi sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita sebut sebagai pengawasan partisipatif," jelas Muhammad.

Dia juga memaparkan Bawaslu telah membuat sistem pengawasan berbasis information technology (IT). Bawaslu punya aplikasinya untuk itu. daya dukung ini sudah diterapkan dalam pilkada serentak Februari 2017 lalu. Secara umum penyelenggaraan pilkada berjalan lancar tanpa hambatan. Aparat keamanan pun tidak menemukan kerusakan yang mengganggu stabilitas. Pilkada lebih tertib dan aman. Apresiasi juga diberikan kepada penyelenggara pilkada.

Secara terpisah, Ketua DPR RI Setya Novanto, juga turut memberikan perhatian yang serius. Menurutnya, meski berbeda pilihan politik, kesatuan bangsa dan negara serta keutuhan sebagai sesama anak bangsa harus dikedepankan. Siapapun yang terpilih sebagai pemimpin tetap bagian dari rakyat Indonesia. Para pemimpin daerah yang terpilih harus memahami kebutuhan dan kepentingan rakyat. Dia juga mengemban amanah serta tanggung jawab dari rakyat.

Novanto menjelaskan, pilkada adalah ajang kontestasi yang menghasilkan para pemimpin yang betul-betul dipercaya mampu membenahi persoalan di daerahnya

masing-masing. Persoalan menyangkut hajat hidup rakyat dalam menggapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

"Sekali lagi, pilkada serentak adalah awal yang baik untuk meningkatkan kualitas demokrasi

kita. Mari mengisi ajang ini dengan semangat kerukunan dan kebersamaan. Perbedaan adalah sumber kekuatan. Sebaliknya, perpecahan hanya akan membuat tujuan berbangsa dan bernegara kita semakin jauh dari harapan," (eko) tegas Novanto. ■



Foto: andri/iw

Ketua DPR RI Setya Novanto

KTP Palsu Masalah Serius

Sejak ditemukannya 38 KTP elektronik palsu dari Kamboja yang dikirim lewat jasa ekspedisi di Bandara Soekarno-Hatta, dugaan kecurangan pun menguat. Palsunya, KTP palsu itu terbongkar beberapa hari sebelum pilkada serentak dihelat. Bea dan Cukai telah mengklarifikasi temuan penting tersebut.

Komisi II DPR RI telah mendapat informasi penting soal pergerakan KTP palsu tersebut di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu. Penjelasan Ditjen Bea Cukai, KTP palsu itu berjumlah 38, bukan 450 ribu seperti diisukan sebelumnya. KTP palsu dari Kamboja itu telah disita bersama buku tabungan dan kartu ATM. Temuan ini sempat memunculkan kecurigaan, karena khawatir digunakan untuk memobilisasi massa dalam pilkada.

Anggota Komisi II DPR RI Tamanuri yang ditemui Parleментарia di ruang kerjanya sepekan sebelum pilkada serentak, menjelaskan, bila jumlahnya tidak signifikan, KTP palsu tersebut kecil kemungkinan digunakan untuk pilkada. Atau kalau pun memang benar digunakan untuk pilkada, sangat kecil pengaruhnya. Bea Cukai sendiri

"Sekarang yang namanya hoax itu luar biasa, memutarbalikkan fakta. Kalau kita tidak dihadapi dengan pikiran yang jernih dan dingin, ini akan timbul masalah. Karena orang akan mudah terprovokasi"

menduga, KTP palsu itu akan digunakan untuk kejahatan ekonomi.

"Dari jumlahnya, kalau diarahkan ke pilkada sangat kecil pengaruhnya. Tapi, kan, ini hanya contoh yang ketahuan saja melalui pengiriman udara. Kita tidak tahu yang di laut. Kita tidak tahu, kan, ada banyak jalan tikus. Tak menutup kemungkinan juga ada di tempat lain. Itu yang kita khawatirkan," ungkap Anggota F-Nasdem ini.

Menurutnya, ini temuan serius untuk diselidiki hingga tuntas. Kewaspadaan harus terus dilakukan di semua daerah. Peredaran KTP palsu tidak menutup kemungkinan terjadi pula di tempat lain, selain Jakarta. Ini harus dideteksi sedini mungkin. "Persoalan KTP palsu ini merupakan hal serius. Bukan hanya kali ini, tapi juga harus diselesaikan di waktu yang akan datang," tegasnya.



Anggota Komisi II DPR RI Tamanuri

Foto: Jayadi/iw

Komisi II, sambung Tamanuri, terus mengawasi persoalan KTP palsu ini. Semua akses pintu masuk transportasi, baik bandara maupun pelabuhan harus mendapat perhatian. Peredaran KTP palsu lewat bandara dan pelabuhan harus dicegah, agar tak dimanfaatkan untuk perhelatan pilkada serentak. "Ini perlu perhatian semua pihak. Jangan hanya terlihat di permukaan, tapi yang di bawah kita tak tahu. Ini akan seperti gunung es," imbuhnya.

KEMBALI BERSATU

Usai perhelatan pilkada serentak ini, semua peserta yang berkontestasi dan masyarakat pemilih diimbau untuk kembali bersatu. Aksi demonstrasi dan kegaduhan politik yang sempat mewarnai pesta demokrasi, harus segera disudahi. Kebersamaan di tengah masyarakat perlu kembali dibangun, setelah sempat terpolarisasi akibat perbedaan pilihan politik dalam Pilkada.

"Jadi kita jangan hanya melihat Pilkada di DKI, tetapi harus melihat di 101 pilkada serentak di seluruh Indonesia. Apapun hasilnya, marilah kita terima. Ini kerja maksimal dari perangkat negara. Jangan sampai pasca-pilkada malah jadi tidak kondusif," tutur Tamanuri.

Pesan harmoni ini harus ditunjukkan kepada masyarakat untuk sama-sama menerima hasil pilkada dan kembali membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Pilkada 2017 ini kelanjutan dari pilkada 2015. Harapannya, tentu pilkada Februari 2017 lebih baik daripada pilkada Desember 2015, baik dari sisi pengaturan, pelaksanaan, maupun pengawasannya. Masalah sengketa pilkada juga diharapkan berkurang dan hasilnya jadi lebih maksimal.

Di lain sisi, legislator dari dapil Lampung II ini menyayangkan maraknya berita bohong atau *hoax* di tengah penyelenggaraan pilkada. Ia mengimbau agar masyarakat tak terprovokasi *hoax*. "Sekarang yang namanya *hoax* itu luar biasa, memutarbalikkan fakta. Kalau kita tidak dihadapi dengan pikiran yang jernih dan dingin, ini akan timbul masalah. Karena orang akan mudah terprovokasi," ujar Tamanuri.

Dia berpesan kepada seluruh masyarakat untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun cita-cita Indonesia melalui pilkada serentak. Salah satu tanggung jawab itu adalah dengan menggunakan hak pilih dan berdamai menerima hasil pilkada. Indonesia milik bersama yang harus dijaga keamanan dan keragamannya. Setelah sempat terbelah berdasarkan pilihan politik, kini saatnya

Dari jumlahnya, kalau diarahkan ke pilkada sangat kecil pengaruhnya. Tapi, kan, ini hanya contoh yang ketahuan saja melalui pengiriman udara. Kita tidak tahu yang di laut. Kita tidak tahu, kan, ada banyak jalan tikus. Tak menutup kemungkinan juga ada di tempat lain. Itu yang kita khawatirkan



<http://news.rakyatku.com>

merajut kembali kebersamaan dan kedamaian.

Setelah hasil pilkada diumumkan, Tamanuri menyerukan agar masyarakat tidak membuat kegaduhan. Masyarakat harus dididik pula untuk mempunyai rasa memiliki terhadap pelaksanaan pilkada, agar pilkada menghasilkan pemimpin berkualitas. "Oleh karena itu, saya mengimbau, mari bersama-sama ciptakan rasa memiliki, kedamaian, ikut bertanggung jawab pada negara dan bangsa ke depan melalui pilkada ini," tutup Tamanuri. ■

(S)

Politik Dinasti Hambat Perubahan Rezim

Perubahan rezim kekuasaan di daerah diharapkan terjadi. Apalagi, bila rezimnya terus menerus dikuasai satu keluarga saja. Politik dinasti, memang, banyak menghambat perubahan yang diharapkan. Dari 101 daerah yang menggelar pilkada serentak tahun ini, dinasti politik masih bermunculan di beberapa daerah. Partai politik jadi lembaga yang paling bertanggung jawab soal ini.

Sepekan sebelum pilkada serentak dihelat, Parlemenaria menemui peneliti dari Universitas Indonesia di ruang kerjanya di kawasan Depok, Jawa Barat. Adalah Chusnul Mar'iyah yang selalu keras menyuarakan kritiknya soal kepatutan para kepala daerah yang terpilih dari satu garis keturunan. Feodalisme dan dinasti masih terlalu kuat di Republik ini, katanya. Berikut petikan wawancara lengkapnya kepada reporter M. Husen dan fotografer Jayadi Maulana.

Secara sosial politik perubahan apa yang terjadi di tengah masyarakat dengan pilkada serentak?

Yang kita sebut dengan perubahan itu adalah perubahan rezim melalui pemilihan. Kalau di daerah, ya lewat pemilihan kepala daerah. Dalam konstruksi bangsa kita, pemilihan kepala daerah melalui Pemilu. Dan pemilu itu selalu diartikan pemilu langsung. Kita harus pelajari konstitusi kita dengan baik, mana yang perlu dipilih rakyat langsung, mana yang tidak.

Menurut saya, kalau bicara tata negara, walau kelak harus merubah konstitusi, sistem yang kita anut presidensial. Desentralisasi itu mestinya di provinsi bukan di kabupaten/kota. Jadi, yang namanya pemilihan kepala daerah terutama untuk kabupaten/kota tidak perlu dipilih langsung, kecuali mungkin satu atau dua daerah saja seperti DKI. Tapi, kalau provinsi boleh

dipilih langsung, karena cuma ada 34. Sementara kabupaten ada 416 dan kota ada 98.

Jadi dengan pilkada itu diharapkan ada perubahan rezim. Cuma ada kasus yang menarik di pilkada, seperti kasus Klaten dan Kediri. Sejak reformasi cuma keluarga itu saja yang berkuasa. Kalau suaminya sudah selesai menjabat, istrinya yang dicalonkan. Di Kediri lain lagi, setelah suaminya selesai, istri pertama lawan istri kedua. Bangunan feodalisme dan dinasti masih kuat di Republik ini. Mereka mungkin menginginkan bisa berkuasa tanpa Pemilu.

Beberapa dinasti perlu dipikirkan kembali. Kepatutannya sampai sejauh mana. Ini sudah tidak ada etika dan kepatutan. Yang ada malah kerakusan berkuasa. Gimana mau bicara perubahan kalau kepatutan tidak diperhatikan. Mereka mengatasnamakan demokrasi, kebebasan, serta hak memilih dan dipilih. Kalau istri kedua dan ketiga kemudian diadu dalam kontestasi pilkada, itu tidak patut di tengah masyarakat yang beradab. Apa tidak ada orang lain di negeri ini untuk dijadikan pemimpin. Pilkada jadi ajang rebutan kekuasaan keluarga.

Dengan pilkada di 101 daerah, tentu akan ada pergantian rezim di daerah.

Ada banyak mudharatnya dengan pilkada ini. Sebaiknya untuk pilkada kabupaten/kota dikembalikan saja ke DPRD. Jadi kita kembali lagi pada bangunan konstitusi. Dalam pilkada serentak, salah satu poin yang paling penting adalah Republik ini terfragmentasi luar biasa. Konsolidasi negara sulit, karena setelah pilkada ada banyak urusan dari hasil pilkada, seperti urusan ke MK, urusan ke KPK, dan urusan pidana pilkada.

Apakah dinasti memang selalu menghambat perubahan dalam pilkada?

Saya tidak anti dinasti sepenuhnya. Tapi, patut tidak sih dinasti terus dipertahankan. Ada etika politik. Sumber etika, kan, agama. Jadi, tidak boleh rakus kekuasaan. Pantaskah anak kita jadi menteri atau kepala daerah. Kita harus bertanya pada diri sendiri. Jangan karena diminta jadi presiden oleh keluarga, lalu mau saja. Wah, bisa berantakan Republik ini.

Biasanya kalau bapaknya jadi ketua umum, anaknya yang diusung. Padahal, dalam UU dikatakan, proses rekrutmen itu harus demokratis. Sampai saat ini belum ada indikator pencalonan kepala daerah yang demokratis. Masalah besar bangsa ini adalah bagaimana



<https://smkampungceleg.files.wordpress.com>

membangun demokratisasi di internal parpol. Parpol sangat penting dalam kehidupan politik untuk mengusung presiden, bupati, wali kota, gubernur, dan anggota legislatif.

Ada tidak mekanisme rekrutmen secara demokratis. Misalnya, PDI Perjuangan yang mengusung Ahok-Djarot, Demokrat mengusung Anies-Sandi, dan Gerindra mengusung Agus-Silvy. Ada tidak mekanisme yang menyertakan rakyat untuk mengusung mereka. Inilah yang jadi persoalan, sehingga ada kasus seperti di Klaten dan Kediri. Kasus di Gowa, Sulsel, lain lagi. Semua calon satu keluarga, hanya partainya berbeda-beda. Selain dinasti, masalah lain adalah bandar politik yang membiayai para calon. Mereka mengijon kepentingan.

Lalu apa plusnya dengan pilkada serentak ini?

Kalau para kepala daerah yang terpilih itu sosok yang jujur, jadi plus. Tapi kalau tidak jujur, karena di balik mereka ada kekuatan mafia bisnis, maka atas nama demokrasi kita sudah tergadaikan. Partai politik sekali lagi paling bertanggung jawab dalam rekrutmen. Kalau Parpol sadar perannya yang sangat penting dalam mengemban konstitusi dan kedaulatan, dia pasti tidak main-main mencalonkan seseorang.

Ke depan, biaya pengeluaran calon harus dibatasi. Misalnya, biaya kampanye calon dibatasi sampai Rp25 miliar saja. Kalau tidak dibatasi bisa ada yang menghabiskan hingga Rp800 miliar. Ini jadi masalah, karena yang bicara adalah yang punya uang. Sayangnya, rakyat juga mudah dibeli suaranya dengan politik uang.

Apa yang istimewa dari Pilkada di DKI sehingga melupakan Pilkada di daerah lain?

Pertama, karena faktor sejarah Joko

Widodo yang pernah menjadi Gubernur. Dulu belum selesai di Solo, dia tinggalkan Solo. Lalu, baru setahun jadi gubernur di DKI, dia jadi presiden. Nah, model seperti ini tentu jadi perhatian. Siapa yang menguasai Jakarta, mungkin bisa menguasai Republik ini. Walau hal tersebut masih menjadi tesis.

Dulu saya pernah tanya pada Jokowi, '2014 akan ikut Pilpres tidak?'

Jawabnya, 'Belum jadi gubernur saja sudah ditanya begitu.' Saya katakan pada beliau, 'Anda sudah meninggalkan rakyat Solo untuk jadi gubernur di DKI. Lalu, nanti Anda tinggalkan lagi rakyat Jakarta untuk jadi presiden.' Dia bilang, tidak akan maju di Pilpres. Jadi, politis tidak bisa dipegang kata-katanya.



Peneliti UI Chusnul Maryah

Foto: jayadi/rw

Proses rekrutmen itu harus demokratis. Sampai saat ini belum ada indikator pencalonan kepala daerah yang demokratis.

Pilkada DKI banyak mengundang kerawanan sosial. Sensitivitas masyarakat dan para tokohnya begitu tinggi....

Selama belum ada kekerasan masih wajar. Sekarang masih konflik verbal. Menurut saya, itu biasa saja. Yang paling penting, demokrasi itu kompetisi, *excluding the use of force*. Tidak menggunakan kekerasan dan senjata. Sejauh ini, kan, tidak ada kekerasan. Kalau soal mobilisasi massa, itu biasa di Indonesia.

Dalam kasus Ahok yang dituduh menistakan agama di tengah pilkada DKI, harusnya polisi menangkap dan menahan. Biasanya memang begitu kepada para penista agama. Ada intervensi dari kekuasaan dalam kasus ini. Tinggal sekarang posisi parlemen di mana. Ini tantangan juga bagi DPR RI. Mestinya DPR RI bisa jadi pahlawan dalam kasus ini.

Bagaimana Anda menilai para kepala daerah yang bermunculan dari hasil pilkada 2015 dan 2017?

Munculnya Risma di Surabaya tidak bebas dari kongkalingkong para pengusaha. Kemunculan para kepala daerah tidak bisa lepas dari kepentingan para pengusaha. Di Bandung ada Ridwan Kamil. Bisa tidak dia menyelesaikan konflik antara FPI dan GMBI. Muncul tidak dia sebagai leader untuk manajemen konflik. Jadi, suatu saat muncul tokoh populis, tapi tidak serta merta kerjanya juga bagus. Di era kepala daerah dipilih DPRD juga ada yang bagus.

Pemilihan langsung para kepala daerah belum tentu demokratis. Yang tidak dipilih langsung rakyat bisa jadi demokratis. Bukannya DPRDnya juga sudah dipilih langsung oleh rakyat. Ini sesuai dengan konteks sila keempat. Ada memang kemunculan kepala daerah yang baik. Tapi kemunculannya tidak sebanding dengan perusakan rakyat melalui pilkada yang sarat politik uang. Pertarungan politik dalam pilkada tidak sehat. ■

(m)



Bob R. Randilawe*)

Pilkada serentak sudah menjadi kalender perpolitikan nasional. Eksistensinya dipayungi oleh UUD NRI 1945, UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Payung hukum lainnya adalah Perpres No.3 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara pilkada pada hari libur. Serta berbagai ketetapan KPU dan Bawaslu. Berbagai perangkat ini bertujuan untuk menjamin kelancaran dan netralitas birokrasi.

Bagaimana Dengan Kecurangan Massif?

Pilkada serentak yang pertama digelar di 264 daerah menyisakan beberapa catatan, yaitu masih banyaknya 'lubang hukum' dalam UU Pilkada. Komisi II DPR bersama Kemendagri siap merevisi UU itu untuk menghadapi pilkada serentak gelombang ke-2 pada 15 Februari 2017.

"Revisi UU Pilkada untuk menghadapi Pilkada serentak tahun 2017 yang tahapannya akan dimulai bulan April dan Mei 2016, harus bisa menjawab berbagai macam masalah teknis pelaksanaan pilkada serentak 2015 yang lalu. (Lukman Edy, Wakil Ketua Komisi II. 18/1/2016).

Revisi UU Pilkada itu menyangkut banyak hal. Pertama, menyempurnakan akurasi daftar pemilih, karena di beberapa daerah masih ditemukan perbedaan daftar pemilih yang ada di DP4, DPS, dan DPT. Soal alat peraga yang diselenggarakan oleh KPU terbukti tidak

Quo-Vadis Pilkada Serentak: Deposit atau Defisit Demokrasi?

efektif, perlu ada revisi karena berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih.

Kemudian mekanisme undangan memilih yang masih banyak mendapat pengaduan masyarakat. Perlu ada terobosan yang efektif sehingga hak warga negara mendapatkan jaminan untuk mengikuti pilkada. Masalah lainnya, ketidaknetralan penyelenggara pilkada di tingkat kab/kota, kecamatan, dan desa sehingga cara rekrutmennya harus ditata ulang. Termasuk ketidaknetralan PNS dan aparatur daerah lainnya. Harus ada sanksi yang tegas dan mempunyai efek jera.

Politik uang yang melibatkan pasangan calon, tim sukses dan penyelenggara pilkada yang masih banyak terjadi. Harus ada sanksi yang tegas dan mempunyai efek jera, serta ada regulasi yang signifikan dan substansi tentang antipolitik uang. Soal mekanisme pemungutan suara ulang, harus dibuat lebih detail. Kemudian soal membuka ruang lebih luas kepada kader-kader bangsa untuk ikut dalam pilkada. Perlu direvisi keharusan mundur bagi PNS, TNI, dan Anggota DPR/DPRD yang maju pilkada. Soal petahana yang mencalonkan kembali, perlu ada syarat-syarat untuk memberikan jaminan kualitas petahana. UU ini harus memberikan pembatasan kepada petahana yang gagal, dengan ukuran-ukuran yang objektif.

Regulasi menyangkut teknis implementasi di lapangan juga terus disempurnakan oleh kalangan legislator dan eksekutif. Bongkar pasang terus dilakukan demi mendapatkan formasi kelembagaan penyelenggara pemilu beserta SOP pilkada serentak juga terus terjadi. Dari aspek strategi anggaran (APBN), ada kesan bahwa terjadi

"pemborosan", *cost* tidak sebanding dengan benefit. *Cost* yang dikeluarkan negara seolah tak pernah cukup untuk "mengongkosi" pertambahan pembiayaan akibat kompleksitas permasalahan yang ada dan harus dipenuhi untuk mengawal perwujudan dari proses optimalisasi kualitas demokrasi di Indonesia.

Sebagai negara demokrasi terbesar kelima di dunia dan sebagai negara dengan densitas ekonomi dan demografis terbesar di kawasan Asia Tenggara, mau tidak mau Indonesia harus membuktikan kemampuan dan validitas sebagai negara demokrasi papan atas di dunia. Beberapa tahun belakangan ini, dunia internasional kerap menyoroti dinamika politik kita, pilpres, pileg, bahkan pilkada serentak, sudah mulai menjadi rujukan bangsa-bangsa lain di dunia tentang bagaimana proses demokrasi elektoral dikelola dan dikawal secara transparan, sistematis, inklusif, non-koruptif, modern, bersifat *entertaining*, dan secara normatif menjamin proses kohesi sosial (kerukunan dan harmoni sosial).

Pergeseran formasi Sosial-politik

Pemilu langsung akan mempengaruhi cara pandang masyarakat dalam arti wawasan demokrasinya. Pola relasi masyarakat mengalami perubahan, dari relasi *patron-client* menjadi relasi kepentingan. Pola relasi berdasarkan kepentingan pada akhirnya akan menuju kepada pola relasi sosial-politik transaksional dimana faktor-faktor fungsional dalam arti hubungan kepentingan antarindividu,



antarkelompok, antarkomunitas, bahkan antargolongan (suku; agama; ras) tidak dapat dihindari. Faktor-faktor di atas tentunya setahap demi setahap akan membentuk tatanan baru dalam masyarakat kita.

Situasi ini akan selaras dengan sistem kapitalisme dan perdagangan bebas. Perlahan tapi pasti tatanan masyarakat individualistik akan menguat dan memengaruhi nilai-nilai dalam masyarakat dimana kesadaran akan hak-hak individual (HAM). Hal ini pada akhirnya akan terjadi pergeseran formasi sosial dan politik. Pergeseran formasi sosial-politik tentunya tergantung kepada beberapa faktor seperti: perilaku elit politik (state actors/non-state actors), media massa (mainstream dan medsos), kondisi sosial-ekonomi, dan keamanan.

Pergeseran formasi sosial-politik seharusnya tetap dalam rentang kendali negara dalam artian jangan sampai fluktuasi sosial-politik berlangsung secara liar dan tak terkendali oleh negara. Kondisi *uncontrollable* dikuatirkan akan memicu situasi *chaotic* yang selanjutnya akan menciptakan kondisi *failed-state* (negara gagal). Konsep antisipatif sebenarnya telah diciptakan oleh Presiden Jokowi dengan program NAWACITA yaitu menghadirkan negara dalam berbagai sektor prioritas dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dengan demikian, konsep kehadiran negara harus terus dikelola dengan sungguh-sungguh demi menjaga proses kohesifitas (kerukunan, toleransi, dan keberagaman) sosial-politik dan ekonomi, Terjaminnya keberagaman dalam tatanan sosial yang dinamik namun damai (peaceful co-existence) merupakan parameter yang harus selalu dirujuk oleh para *stake holder* pilkada serentak: pimpinan parpol, KPU, DPR, maupun kalangan *civil-society*.

Kerukunan dan kohesi sosial akan menjamin sebuah hajatan politik seperti pilkada serentak untuk berlangsung damai dan selalu menolak potensi dan manifestasi perilaku radikalisme, fundamentalisme atas nama aliran dan

ideologi serta ekstremitas pandangan politik. Sikap ideologis adalah wajar dalam politik. Namun, ekstremitas adalah penyakit "kekanak-kanakan" yang harus ditolak secara mandatory maupun voluntary. Semua pihak harus sepakat untuk menolak setiap narasi politik yang bernafas ekstrim. Karena ekstremitas menolak dialog dan kompetisi secara fairness dan regulatif. Padahal fairness, inklusif, dan reguler adalah ciri pokok demokrasi elektoral.

Kerukunan dan Kohesi sosial dalam masyarakat ternyata sangat tergantung kepada "bagaimana sistem dan penyelenggara pilkada serentak bekerja". Moral dan etika serta integritas paslon pilkada serta komitmen penyelenggara pemilu ternyata sangat menentukan validitas dan kualitas pilkada serentak. Faktor penyelenggara pemilu (regulator/wasit) sangat signifikan perannya dalam menentukan tingkat keberhasilan.

Evaluasi Mendasar Pilkada Serentak

Dari pengalaman pilkada serentak gelombang pertama 2016, perlu dilakukan evaluasi mendasar agar kualitas demokrasi dapat menumbuhkan harapan dan optimisme bagi masyarakat. Masyarakat harus di edukasi terus-menerus oleh partai politik dan elit politik. Dalam hal ini pemerintah tidak bisa diharapkan terlalu banyak. Dengan pendidikan demokrasi yang baik maka masyarakat akan lebih memahami demokrasi substantif, bukan semata demokrasi prosedural. Selama ini masyarakat belum tereduksi dengan baik sehingga demokrasi prosedural hanya memapankan para "politikus kotor" yang fasih sebagai pemain demokrasi trasaksional. Uang dan materi menjadi utama dalam zona transaksional.

Akhirnya yang diperoleh adalah "kejenuhan demokrasi". Karena masyarakat hanya disuguhkan dengan etalase politik serba uang, pada titik ini berdampak kepada meluasnya kejenuhan dalam masyarakat terhadap proses demokrasi yang rendah kadar keterwakilan rakyatnya. Pada akhirnya terjadilah penggiringan hasrat politik untuk rindu kembali ke "era otoriter" (seperti zaman orba) akibat terjadinya stagnasi demokrasi yang diwarnai dengan proses

transaksional yang serba materi.

Tidak heran bila masyarakat menjadi muak dan jenuh melihat situasi quasi-chaotic seperti sekarang ini. Demokrasi transaksional juga diidentikkan dengan "demokrasi untuk pemilik modal" dan pengusaha kakap. Hampir sulit menemukan politisi formal yang tidak punya "tali-temali" dengan jaringan atau korelasi dengan salah satu konglomerat di Indonesia. Kasus Pilgub DKI juga diwarnai oleh kontroversi yang tidak ada ujung pangkalnya. Masing-masing pasangan calon (paslon) mempunyai argumen dan "strategi menyerang" yang sudah mengarah kepada konflik horizontal.

Merebaknya isu SARA dalam pilgub DKI menjadi kontra produktif dan justru memberi rekaman dalam memori kolektif publik bahwa beginilah cara bertarung dalam pilkada. Amat disesalkan para pendukung paslon, terutama dalam pilgub DKI yang cenderung irasional dan emosional sehingga telah mengarah kepada gejala "disintegrasi sosial" dimana sendi-sendi kohesifitas sosial budaya masyarakat-warga DKI Jakarta dan sekitarnya, bahkan masyarakat di luar Jakarta pun telah terseret-seret ke dalam arus pusaran konflik horizontal. Hanya gara-gara berbeda paslon yang didukung, banyak orang yang terganggu silaturahmi satu sama lain. Ketegangan antarkelompok, antargolongan, antarsuku, bahkan antarpolisi politik seolah tidak terjembatani dengan baik.

Inikah yang disebut "*entertainment politic*?", politik sebagai hiburan dan tontotan yang mendebarkan? Jika demikian, maka *setting* politik semacam *entertainment politics* ini berada dalam kendali sekelompok orang atau komunitas tertentu yang sangat kaya dan eksklusif. Demokrasi yang mengiringi pilkada serentak seperti ini yang jauh dari kaidah-kaidah demokrasi substantif, jauh dari apa yang dicita-cita para pendiri bangsa, dan yang lebih parah lagi pilkada serentak yang makin menjauhkan masyarakat dari sifat-sifat asli Nusantara, yaitu kerukunan dan keguyuban atau gotong-royong, maka akhirnya yang terjadi adalah defisit demokrasi dan agenda reformasi. ■

*) Dewan Pakar Persatuan Alumni GMNI



Pulau Kecil Terluar, Garda Terdepan Kedaulatan Negara

Indonesia adalah negara kepulauan, sebagaimana diteguhkan dalam Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Berdasarkan hukum laut internasional atau *United Nation Convention On the Law of the Sea* 1982 (Unclos'82), bahwa negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain (Gugusan pulau). Sedangkan yang dimaksud dengan pulau adalah daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air dan tidak hilang atau tenggelam ketika air sedang pasang.

Kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan (archipelagic state) yang memiliki 17.504 pulau, membentang dari Sabang hingga Merauke, serta dari Miangas hingga Dana Rote, dengan 92 Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT), diantaranya terdapat 12 pulau kecil terluar yang memiliki nilai sangat strategis karena batas negara ditentukan dari titik terluar pulau tersebut. Pulau-pulau ini sangat rawan baik ditinjau dari sisi keamanan maupun keberadaan fisik geografisnya, sebab pulau itu bisa saja hilang karena adanya ancaman baik secara politis maupun secara fisik.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menilai bahwa

keberadaan pulau-pulau itu semestinya mendapat perhatian dan pengawasan, serta harus dikelola secara serius agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. Pengelolaan PPKT bertujuan untuk menjaga keutuhan wilayah, keamanan dan pertahanan negara, pemanfaatan sumberdaya alam, dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan terpadu.

" Pada hakekatnya

Foto : Jay/iv

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar meliputi 5 bidang, yaitu: sumberdaya alam dan lingkungan hidup, infrastruktur dan perhubungan, pembinaan wilayah, pertahanan dan keamanan serta ekonomi, sosial, dan budaya. Perpres 78 tahun 2005 mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi dengan tugas mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar

pengaturan terhadap pulau-pulau itu tetap tidak menghilangkan state property atau kepemilikan negara. Pulau-pulau terluar harus menjadi zona eksklusif kepemilikan negara, karena terkait dengan masalah perbatasan negara dan sebagai sistem pertahanan negara," ucap Herman.

Ia mengatakan, semestinya pulau-pulau yang terluar harus menjadi potensi pertahanan negara yang dikelola oleh negara agar bisa menjaga secara utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdaulat.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sudah mempunyai beberapa peraturan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil, diantaranya adalah UU No. 1 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 27 tahun 2007 mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Peraturan Pemerintah No.62 tahun 2010 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar, Peraturan Presiden No.78 tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.20 tahun 2008 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di

sekitarnya, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No. 17 tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Harus di garis bawah, bahwa semua peraturan yang telah disebutkan di atas hanya mengatur pulau-pulau kecil yang luasnya sama dengan atau di bawah 2000 km².

"Akan menjadi sesuatu yang aneh bila hal-hal yang mempunyai potensi dan prospek baik selalu dikelola oleh asing. Bila memang hasil studinya adalah memberikan suatu kontribusi besar untuk pembangunan bangsa dan perekonomian rakyat Indonesia, maka prioritas pengelolaan pulau-pulau terluar harus dikelola dan dimanfaatkan oleh negara dengan melibatkan seluruh warga masyarakat, supaya apa yang menjadi hakekat dasar terhadap pembangunan pulau-pulau kecil diperbatasan itu menjadi nyata," ujar politisi F-Demokrat itu.

Bila merujuk pada UU No.1 tahun 2014, memang dijelaskan bahwa pihak asing dapat menanamkan modal untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dengan harus mengutamakan kepentingan nasional, namun semua itu harus berdasarkan izin Menteri Kelautan dan Perikanan. Selain itu, yang harus diingat adalah pembatasan penguasaan akan pulau-pulau kecil yang hanya boleh 70 persen dari luas pulau tersebut dan 30 persennya lagi harus digunakan atau dimanfaatkan untuk area publik, kepentingan masyarakat, dan kawasan lindung. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No.17 tahun 2016.

Prioritaskan Investor Lokal

Walaupun pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dapat dilakukan oleh investor asing, namun ada baiknya pemerintah

memprioritaskan investor lokal untuk berinvestasi dibanding dengan investor asing. Dari segi ekonomi keduanya memang menguntungkan, namun akan menjadi suatu ancaman jika regulasi mengenai pulau tidak matang.

"Semestinya investasi asing dilakukan dipulau-pulau yang secara prospek ekonomi agak sulit untuk dibangun, jangan pulau-pulau yang bernilai ekonomis yang sesungguhnya dapat mensejahterakan rakyat yang justru dikelola oleh asing, dengan jangka waktu yang sangat panjang tetapi kontribusi bagi negara kita kecil," tegasnya.

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar meliputi 5 bidang, yaitu: sumberdaya alam dan lingkungan hidup, infrastruktur dan perhubungan, pembinaan wilayah, pertahanan dan keamanan serta ekonomi, sosial, dan budaya. Perpres 78 tahun 2005 mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi dengan tugas mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil.

Sesuai dengan Perpres tersebut, untuk menghindari tumpang tindih kewenangan ditetapkan 2 Tim Kerja. Tim Kerja I membidangi sumberdaya alam, lingkungan hidup, infrastruktur dan perhubungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan Tim Kerja II membidangi wilayah, pertahanan, dan keamanan, serta Sekretariat Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.

"Optimalisasi pengelolaan PPKT dapat berjalan dengan baik apabila ada komitmen dan niat baik dari seluruh pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama membangun dan mengelola PPKT bagi kepentingan

bangsa negara dan kesejahteraan masyarakat," ungkap Herman.

Keberadaan pulau-pulau kecil terluar yang tidak berpenghuni, memang kurang memberikan kontribusi bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat di sekitar pulau tersebut, namun karena pulau-pulau itu merupakan pulau-pulau terluar dan memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka pulau-pulau tersebut memiliki nilai yang sangat strategis, sekaligus rawan terhadap sengketa kepemilikan di masa mendatang.

"Keberadaan pulau-pulau kecil terluar tersebut memiliki spektrum yang luas, bukan hanya sebatas aspek ekonomis, tetapi juga terkait aspek politis dan aspek pertahanan dalam rangka menjadi integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," tandasnya.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga saat ini ada sekitar 4.000 pulau di Indonesia yang belum memiliki nama. Sebanyak 55 pulau sudah dikelola pihak lain, 34 di antaranya asing.

Di saat pemerintah mulai agresif memetakan pulau-pulau kecil terluar sebagai komoditas penerimaan negara, masyarakat pesisir justru kian tersingkir. Privatisasi pulau-pulau kecil dan terluar dianggap tak memberikan kepastian hak masyarakat dalam mengakses sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Sejumlah persoalan dalam pengelolaan pulau kecil selalu memicu konflik dengan nelayan setempat. Padahal konstitusi telah mengamanatkan bahwa negaralah yang harus sepenuhnya menguasai kekayaan alam Indonesia dan harus menggunakannya untuk kemakmuran rakyat.

Investasi dan Kearifan Lokal

"Mengawinkan masalah investasi dengan kearifan lokal masyarakat menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan, mungkin saja sebagian pulau-pulau terluar itu kosong atau tidak berpenghuni. Dan bila harus berinvestasipun masyarakat biasa maupun individu nelayan sangatlah besar. Namun bila diinvestasikan oleh

negara maka sangat lebih memungkinkan, karena negara memiliki kapasitas untuk mempersiapkan anggaran," paparnya.

Menurutnya, kapitalisasi untuk APBN saat ini ada sekitar 2 ribu triliun rupiah lebih, dan itu merupakan potensi yang besar. Sebab pada akhirnya pembangunan juga akan masuk



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron

dikawasan terluar yang sesungguhnya berprospek dan bernilai ekonomis tinggi, serta menjadi bagian daya tarik terhadap masyarakat lainnya untuk hadir dan datang ke tempat tersebut.

"Hal inilah yang harus menjadi prospektif pembangunan kita, jangan kalau ada yang berpotensi baik terutama dipulau-pulau terluar, harus menggunakan investasi asing. Didalam membangun memang tidak bisa seutuhnya dibiayai oleh negara, tetapi harus ada prioritas-prioritas tertentu, yakni selain untuk meningkatkan nilai keekonomisan dari sebuah kawasan, harus pula diingat bahwa kawasan-kawasan terluar tersebut adalah kawasan-kawasan sebagai acuan perbatasan kita yang merupakan zona kedaulatan negara Republik Indonesia," tuturnya.

Kejelasan status pulau kecil terluar menjadikan kawasan tersebut sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara. Pengelolaan pulau kecil terluar oleh pihak asing sangat riskan karena kerap memunculkan masalah, pihak asing yang mengelola pulau kecil biasanya menutup akses pulau tersebut dari nelayan setempat, dan

memunculkan eksklusif dalam pengelolaannya.

"Bila satu kawasan itu dikuasai oleh asing, maka nelayan tidak lagi dapat singgah atau bersandar disitu. Nelayan yang mengambil hajat hidupnya di zona ekonomi eksklusif Indonesia yaitu diatas 12 mil sampai dengan 24 mil, seringkali menjadikan pulau-pulau terluar sebagai

pulau-pulau sementara untuk tempat transit atau tempat berlindung ketika cuaca sedang tidak memungkinkan untuk berlayar," kata Herman.

Herman menyatakan, pulau-pulau terluar itu sebaiknya dikelola oleh negara dan masyarakat ikut

dilibatkan didalamnya sesuai kearifan lokal yang ada di wilayah setempat. Sebab eksistensi negara dalam mempertahankan keutuhan NKRI harus dilihat dari berbagai aspek, bukan saja dari sisi militeristik tetapi juga sumber daya dari keberadaan pulau-pulau tersebut.

Terkait upaya pemerintah dalam menyertifikasi sejumlah pulau yang belum memiliki nama, Herman Khaeron mengatakan, semestinya sertifikasi dilakukan untuk semua pulau yang masuk dalam kedaulatan negara Indonesia, tidak hanya yang berjumlah ratusan pulau saja. Sementara itu, terkait masalah pemberian nama terhadap pulau-pulau yang belum mempunyai nama, hal itu adalah wewenang negara.

"Adanya gagasan bahwa pihak asing dapat memberikan nama bagi pulau-pulau itu, jelas hal itu tidak bisa dilakukan. Peraturan negara telah mengatur bahwa setiap nama-nama pulau itu adalah hasil identifikasi yang kajiannya diserahkan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), sebagai kawasan yang tidak terpisahkan dari NKRI. ■

Foto : jey/iw

(de)

Ketika "Oemar Bakrie" Melenggang Ke Senayan



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih

Foto: Andri/iv

Sempat menjadi "Oemar Bakrie", Guru Teladan III Tingkat SLTA se Kota Tegal Tahun 1988 ini pun akhirnya harus melenggang ke Senayan untuk lebih luas mengabdikan dirinya pada Negara dan masyarakat.

Nyong pengen ngelayani masyarakat selawase urip, begitulah ucapan Abdul Fikri Faqih yang menggambarkan tekadnya untuk terus bisa melayani masyarakat seumur hidupnya. Prinsip hidupnya itu memang bukan tanpa sebab, mengingat sebelum menjadi Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Fikri, begitu wartawan biasa menyapanya, terkenal sebagai tokoh pendidikan di kota Tegal, Jawa Tengah.

Sebelum bercerita ikhwal perubahan arah hidupnya dari seorang guru PNS menjadi seorang politisi dan anggota DPR RI, Fikri terlebih dahulu mengisahkan masa-masa kecilnya di kampung halamannya, Desa Jati Mulya, Kecamatan Lebak Sui, Kabupaten Tegal.

Terlahir di tengah-tengah kehidupan pesantren, dimana sang kakek, Kyai

Abdul Rouf, merupakan pendiri Roudlotul Islamiyah Mardiyah di Tegal. Begitupun dengan sang kakek dari ibu. Hal itu membuat Fikri "kenyang" dengan kehidupan dan berbagai aktivitas santri pesantren. Termasuk di dalamnya pelajaran tentang ilmu agama berupa tafsir Quran, hadist dan berbagai pelajaran fikih lainnya.

Bukan karena merasa sudah cukup tahu tentang ilmu agama, namun agar lebih tahu kehidupan di luar pesantren, maka sang ibu lebih memilih menyekolahkan Fikri kecil ke sekolah umum, yakni SDN 3 Slawi, yang dilanjutkan ke SMPN 1 Slawi, dan SMAN 1 Slawi. Di sekolah menengah pertama, ia mulai masuk dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII). Disinilah cikal bakal munculnya jiwa organisatoris dan aktivis Fikri.

"Mungkin ibu saya menganggap bahwa bekal agama sudah saya dapatkan dari rumah yang menyatu dengan kehidupan santri. Sehingga tidak perlu lagi pesantren. Selain itu juga sekolah pesantren jaman dulu tidak pakai ijazah, kalau sekarang ada. Jadi untuk dapat ijazah ya harus di sekolah umum. Ibu saya juga guru PGA (Pendidikan guru agama). Jadi ibu memang lebih memilihkan saya sekolah di sekolah umum, bukan sekolah agama," ujar Fikri.

Singkat cerita, lulus SMAN 1 Slawi sejatinya Fikri ingin melanjutkan kuliah di UGM (Universitas Gajah Mada) di Yogyakarta. Namun sang ibu memintanya untuk mengajarkan dan mendampingi anak dari kepala sekolahnya yang ingin melanjutkan kuliah di Semarang. Mulai dari persiapan awal mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri, hingga

test dan masa perkuliahan di Semarang. Maklum, sejak kelas 1 Sekolah Dasar, Fikri memang selalu menjadi bintang kelas. Alhasil, Fikri tidak perlu membayar biaya test masuk perguruan tinggi negeri. Bahkan semua biaya hidup selama di Semarang sudah ditanggung oleh kepala sekolah sang ibu.

Manusia boleh berencana, namun Tuhan jua yang menentukan. Meski telah berusaha sekuat tenaga untuk menuntun anak dari kepala sekolah tersebut agar dapat lulus dan diterima di perguruan tinggi yang diinginkan, sayangnya Tuhan berkata lain. Anak tersebut tidak lulus tes di IKIP Semarang (sekarang Universitas negeri Semarang-red), sedangkan Fikri dinyatakan lulus dan diterima masuk perguruan tinggi negeri tersebut.

"Kalau dikatakan kami berkompetisi tidak juga, karena walau sama-sama ikut test di IKIP Semarang, namun jurusan kami saat di SMA berbeda, dimana saya IPA sedangkan dia IPS, maka fakultas yang kami ambil di IKIP pun jelas sangat berbeda. Saya ambil fakultas teknik, sementara dia mengambil fakultas ekonomi," papar pria kelahiran Tegal, 17 Juli 1963.

Meskipun segala kebutuhan hidup selama di Semarang ikut dibiayai oleh kepala sekolah tersebut, namun kedua orangtua Fikri tetap mengirimkan uang saku bagi putranya tersebut. Senyamannya hidup dalam "asuhan" orang lain, tetap lebih nyaman hidup mandiri dari uang sendiri. Tak heran jika di tahun kedua perkuliahannya, Fikri memutuskan untuk tidak tinggal bersama anak kepala sekolah sang ibu lagi. Ia lebih memilih menyewa rumah tinggal atau indekost. Sejak saat itu otomatis pemasukan pun berkurang. Ia hanya mengandalkan kiriman dari kedua orangtuanya sebagai biaya hidup sehari-hari.

Tak ingin membebankan kedua orangtuanya, Fikri pun tak hilang akal. Bersama beberapa rekannya, Fikri yang sejak SMA sudah mengantongi ijazah kursus bahasa Inggris hingga tingkat *Advance* mulai berpikir untuk menggunakan keahliannya dalam bahasa Inggris tersebut. Ia membuka kursus bahasa Inggris untuk siswa-siswi SD, SMP dan SMA. Tidak hanya itu, ia juga mencoba berdikari lewat usaha di bidang *advertising* atau periklanan dengan

membuat papan reklame. Bahkan sebagai Ketua Remaja Masjid Al Huda yang berada di dekat kampus IKIP Semarang, ia juga kerap menggelar kegiatan ceramah dan kajian-kajian Islam dengan mengundang berbagai ulama dan tokoh Islami. Lewat usaha itulah Fikri bisa mencukupi segala kebutuhan hidupnya selama merantau di Semarang.

Jika sebagian besar aktivis kampus pernah menjadi "mahasiswa abadi" akibat kegiatannya di berbagai organisasi, namun hal itu tidak berlaku bagi Fikri. Meski banyak aktivitasnya, ia bertekad untuk bisa menyelesaikan perkuliahannya tepat waktu.

"Saya masuk kuliah tahun 1982. Seharusnya tahun 1986 sudah lulus kuliah, karena jumlah SKS, satuan kredit semester, saya sudah cukup dan nilai saya juga sudah cukup. Namun karena ada sedikit problematika dengan salah satu dosen, akhirnya saya tidak lulus mata kuliah tersebut, yang akhirnya saya tidak bisa menyelesaikan perkuliahan lulus tahun itu,"kisahnya.

Untuk sebuah prinsip hidup dan idealisme tidak ada yang pernah ia sesali. Meski gagal menyelesaikan perkuliahan pada tahun itu, namun Fikri tidak ingin mengulang perkuliahan untuk mata kuliah tersebut. Alhasil, ia memilih untuk kembali ke kampung halamannya tanpa mengantongi ijazah sarjana pendidikannya.

Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Gagal menyandang gelar sarjana pendidikan, bukan berarti tertutup kesempatannya untuk menjadi seorang guru. Berbekal transkrip nilai terakhirnya di kampus, ia berhasil menjadi seorang guru di beberapa sekolah, yakni SMA Muhammadiyah dan salah satu STM di Kota Tegal yang berafiliasi dengan NU (Nahdhatul Ulama).

Satu tahun berhasil menjadi guru, angin segar pun menghampiri Fikri. Pemerintah lewat dinas pendidikan mengeluarkan aturan baru, dimana mahasiswa yang telah berhasil melewati jumlah SKS yang ditentukan berhak lulus dan mengantongi gelar sarjana pendidikan. Sementara itu Fikri telah melewati jumlah SKS yang ditentukan. Alhasil, ia pun dinyatakan lulus oleh kampus dan berhak menyandang gelar

sarjana pendidikan.

Berhasil membawa pulang ijazah sarjana menjadi langkah awal bagi karir Fikri di dunia pendidikan. Saat itu ia diminta mengikuti test CPNS (Calon pegawai negeri sipil). Kendati pada awalnya enggan menjadi PNS, namun berkat dorongan dari keluarga dan teman-teman dekatnya, ia pun mengamini hal itu. Ia mengikuti test CPNS. Meski setengah hati mengikuti test tersebut, namun toh pada akhirnya ia dinyatakan lulus test tersebut. Pada tahun berikutnya secara resmi ia dinyatakan sebagai PNS lewat sebuah SK Menteri.

Dinamika kehidupannya muncul usai ia ditetapkan sebagai PNS. Pasalnya, ia diharuskan untuk mengajar di sebuah sekolah negeri. Semntara sejak awal ia hanya berminat mengajar di sekolah swasta yang notabene berafiliasi dengan berbagai organisasi keagamaan yang dekat dengan kehidupan sehari-harinya. Ya, ia menolak mengajar di sekolah negeri. Berkat loby dan penjelasannya, akhirnya Fikri pun diperkenankan untuk tetap mengajar di STM Muhammadiyah dengan status guru perbantuan. Bahkan ia pun kemudian diangkat menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut. Saat itu, Fikri pun sempat dinobatkan sebagai Guru Teladan III Tingkat SLTA se Kota Tegal tahun 1988.

"Awalnya STM tersebut merupakan STM dengan peringkat terendah. Namun berkat perjuangan semuanya, kini sekolah tersebut termasuk dalam sekolah favorit dengan jumlah siswa terbanyak di kota tersebut,"kisahnya.



Foto: Antri/Iw

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih

MASUK POLITIK PRAKTIS

Lebih dari sepuluh tahun berkecimpung dalam dunia pendidikan dengan menjadi guru dan kepala sekolah. Hingga kemudian tahun 1998 suhu politik Indonesia memanas hingga masuk era reformasi. Kran demokrasi pun terbuka lebar. Ditandai dengan munculnya partai politik-partai politik baru, salah satunya Partai Keadilan (saat ini PKS-red). Bersama beberapa rekan sesama aktivis kampusnya, ia ikut menginisiasi berdirinya PK cabang Tegal sehingga ia langsung terpilih menjadi Ketua DPD (dewan pimpinan daerah) PK Kabupaten Tegal. Ya, ketika itu belum ada aturan yang melarang PNS untuk ikut terlibat dalam politik praktis.

Tahun 1999 muncul peraturan presiden no 5 juncto PP No. 12 Tahun 1999 tentang PNS yang menjadi anggota Parpol. Intinya sebagai aparatur Negara PNS diharapkan bersikap netral dan menghindari penggunaan fasilitas negara untuk golongan tertentu. PNS yang masuk dalam Parpol otomatis akan keluar keanggotaannya sebagai PNS. Dan PNS yang mengajukan permohonan sebagai anggota/pengurus partai politik diberikan uang tunggu selama satu tahun. Apabila dalam satu tahun tetap ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak pensiun bagi yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).

Tekadnya untuk masuk dalam dunia parpol sudah bulat. Ia pun resmi mengundurkan diri dari PNS pada tahun 1999. Baginya hal itu sebagai sebuah konsekuensi pengabdian kepada masyarakat dan Negara. Menjadi guru memang ikut mencerdaskan masyarakat. Namun menjadi wakil rakyat juga berusaha memberikan pelayanan masyarakat yang lebih luas lagi.

"Saat itu saya masuk golongan III C dengan gaji pokok 720 ribu, sementara gaji DPR RI ketika itu 620 ribu. Belum lagi hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pensiun, karena masa bakti saya belum genap dua puluh tahun ketika itu. orangtua saya sempat melarang saya keluar dari PNS, tapi tekad saya sudah bulat. Saya harus mengabdikan diri pada Negara dengan

lingkup yang lebih luas lagi,"akunya.

Ketika itu untuk pertama kalinya berlangsung pemilihan legislative (pileg). Ia pun didapuk menjadi caleg DPRD kabupaten Tegal. Saat itu ia sengaja meletakkan namanya di paling bawah, dengan maksud memberikan kesempatan kader PK lainnya untuk bisa terlebih dahulu maju menjadi anggota dewan. Sementara ia bisa kembali menjadi PNS, karena ada peraturan yang mengatur bahwa PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS diberikan masa tunggu selama 1 tahun untuk kembali menjadi PNS. Namun karena tidak ada kader lainnya yang maju, akhirnya ia pun maju menjadi caleg nomer satu Partai Keadilan.

Singkat cerita, Fikri pun terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tegal. Ia menduduki komisi A yang membidangi pemerintahan. Bidang yang sejatinya bukan bidang yang ditekuninya. Namun ia berusaha untuk belajar baik dari berbagai literature maupun bertanya dengan seniorinya. Akhirnya dalam waktu beberapa bulan akhirnya Fikri bisa merasa nyaman sekaligus menguasai profesi barunya tersebut.

"Komisi E komisi yang tidak banyak peminatnya, jadi saya terus belajar dan bertanya dari sesama politisi dan senior-seniornya. Saya belajar melakukan advokasi pada masyarakat, termasuk bagaimana mengatasi aktivis-aktivis yang kerap melakukan demonstrasi. Dari sana saya sering menjadi narasumber media massa lokal," ujar suami dari Zubaedah ini.

Sebagaimana tugasnya melakukan pengawasan terhadap eksekutif, maka ia pun tak lelah dan tak takut mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang dianggapnya tidak berpihak pada rakyat. Dari sana tak heran jika Fikri pernah meraih penghargaan sebagai 10 anggota dewan ter vocal dari kelompok diskusi wartawan (KDW) Provinsi Jawa Tengah.

Tahun 2004 sejatinya ia ingin kembali menjadi "Oemar Bakrie" alias guru. Namun partainya (PKS) mendesaknya untuk ikut menyumbangkan suara dalam pileg tahun ini. Ia pun tak kuasa menampik permintaan itu. Hingga kemudian ia kembali mendulang suara dan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2009 ia pun

kembali terpilih menjadi anggota DPRD sekaligus dipercaya menjadi wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Pilkada Kabupaten Tegal 2013 lalu, ia sempat mencalonkan diri menjadi Bupati. Sayangnya takdir belum mengijinkannya untuk duduk dalam kursi eksekutif. Satu tahun berikutnya, ia obati kekecewaannya tersebut dengan berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilihan legislative (DPR RI). Sehingga sang oemar bakrie itupun berhasil melenggang ke Senayan, Jakarta sebagai wakil rakyat.

Di DPR RI awalnya ia dipercaya duduk di Komisi VIII DPR RI yang membidangi masalah social, agama, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, serta bencana alam. Salah satu hasil pemikirannya di Komisi ini ia berhasil menyetujui RUU Penyandang Disabilitas, yang didalamnya membuat aturan dan sanksi bagi pelanggaran atau pelecehan terhadap penyandang disabilitas.

Belum genap dua tahun lamanya ia menduduki Komisi tersebut, Fraksi PKS memberikan amanah kepadanya untuk ikut memimpin Komisi X DPR RI yang membidangi masalah pendidikan, budaya, pemuda dan olahraga. Ya, komisi yang sesuai dengan background pendidikan dan pengalamannya selama ini. Di DPR RI, "Oemar bakrie" asal kota Tegal ini pun ikut menyusun RUU Larangan Minuman Beralkohol. Pasalnya, tidak sedikit generasi muda yang mati sia-sia akibat alcohol.

Kini, sambil terus menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil Ketua Komisi X DPR RI, Fikri pun masih terus bertekad mengabdikan pada Negara. Tidak berusaha mengecilkan perannya di legislative, namun ia mengakui untuk melakukan pengabdian pada Negara yang lebih besar kontribusinya lewat jalur eksekutif. Mengingat segala program ke masyarakat, dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan ada di tangan eksekutif.

"Kalau secara pribadi, usia saya sekarang 54 tahun, kalau PNS tinggal beberapa tahun lagi masuk masa pensiun. Jadi saat ini saya hanya ingin menjalani apa yang sudah diamankan pada saya dengan sebaik-baiknya. Untuk ke depannya biarlah Allah SWT yang menentukan," pungkas ayah tujuh orang putra-putri ini. ■

(Ayu)

Perkuat Sistem Presidensial

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu merupakan salah satu RUU yang dinilai cukup krusial.

Diungkapkan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Penyelenggara Pemilu Benny K Harman, baik buruknya suatu pemerintahan sangat bergantung pada kualitas pemilu. Menurutnya, kualitas proses akan menentukan kualitas hasil.

"Kalau prosesnya berkualitas, maka kita yakin hasilnya juga berkualitas. Tercermin dari persaingan yang sehat, tidak boleh ada monopoli penguasaan media massa, sistem pengawasannya berjalan. Jadi, kualitas prosesnya maka kualitas hasilnya. Hasilnya yah presiden dan wakil presiden, Anggota DPR, DPRD hingga pejabat di tingkat kabupaten," ujar politisi dari F-Demokrat itu kepada diwawancarai Parlemen saat ditemui di Ruang Kerja Pimpinan Komisi III DPR RI.

Setidaknya, lanjut Benny, ada 18 isu strategis dari 543 pasal yang sedang digodok DPR bersama Pemerintah. Dari ke-18 isu tersebut, 5 diantaranya menjadi

sorotan utama, yakni sistem pemilu, ambang batas presiden (presidential threshold), ambang batas parlemen (parliamentary threshold), jumlah kursi di daerah pemilihan (dapil) serta metode konversi suara ke kursi.

Namun, sambungnya, terlepas dari kelima isu krusial tersebut, pada intinya tujuan penyelenggaraan pemilu ialah untuk memperkuat sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional. "Salah satu tujuan RUU Penyelenggaraan Pemilu yang kita bahas saat ini adalah untuk memperkuat sistem presidensial dan juga konsolidasi kepartaian," ungkap Benny.

Menurutnya, keadaan sistem pemerintahan kita yang presidensiil cenderung menciptakan fenomena pemerintahan yang terbelah atau *divided government*. Sebab, dalam bentuk pemerintahan yang presidensiil, kekuasaan eksekutif terpisah dari legislatif. Sedangkan, fenomena ini tidak akan ditemukan pada negara dengan sistem pemerintahan parlementer karena partai maupun koalisi partai yang menguasai parlemenlah yang

membentuk kabinet.

Lahirnya era reformasi, berimplikasi pada konsep multipartai. Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensiil memasuki era multi partai ditandai pada Pemilu yang digelar pada 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 48 Partai Politik (Parpol). Pada Pemilu tahun 2004, ada 24 parpol dan pada 2009 diikuti 32 parpol. Terakhir, pada Pemilu 2014 diikuti 10 Partai Politik yang menjadi peserta pemilu.

"Karena Multipartai, sistem presidensial kita rentan terhadap ketidak-efektifannya pemerintahan. Sangat mungkin terjadi pemerintah terancam akibat kuatnya kontrol di parlemen. Sehingga jika itu tidak ditata dengan baik maka akan menghasilkan apa yang disebut dengan *divided government*," jelasnya.

Lebih lanjut, Benny menjelaskan, jika hal itu terjadi, maka terbentuk pemerintahan yang minoritas. Artinya, pemerintahan dipimpin oleh presiden yang tidak menguasai *majority development*. Padahal, dukungan parlemen merupakan sebuah

Lahirnya era reformasi, berimplikasi pada konsep multipartai. Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensiil memasuki era multi partai ditandai pada Pemilu yang digelar pada 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 48 Partai Politik (Parpol)



Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto

Foto: Jayadi/Iw



48 Partai Politik peserta PEMILU Republik Indonesia Tahun 1999

Dari berbagai sumber

keniscayaan dalam sistem presidensial. "Tidak mungkin program presiden terpilih bisa dilaksanakan tanpa dukungan parlemen yang kuat," tuturnya.

Dengan demikian, dalam sebuah sistem pemerintahan presidensial yang multipartai, presiden harus berjalan seiring dengan parlemen. Dimana anggota parlemen sebagai peserta pemilu merupakan produk dari sistem kepartaian.

Ia melanjutkan, salah satu yang menjadi perdebatan hangat di antara fraksi-fraksi di DPR ialah ambang batas pencalonan presiden dan ambang batas parlemen atau *Parliamentary Threshold*. Sistem Proporsional dengan melibatkan banyak partai dinilai kurang efektif dan efisien. Oleh karenanya, muncul gagasan penyederhanaan jumlah partai politik.

Menurutnya, beberapa fraksi ingin meningkatkan ambang batas parlemen sebagai bentuk penguatan sistem presidensial. "Ini adalah suatu upaya untuk menyederhanakan sistem kepartaian, dengan meningkatnya *parliamentary threshold* maka peluang partai politik untuk masuk ke parlemen

semakin sedikit," ujar politisi dari F-Demokrat itu.

Selain itu, Benny menambahkan, besaran ambang batas parlemen turut mempengaruhi kompetisi antar partai politik dalam pemilu. Semakin tinggi ambang batas parlemen, maka semakin tinggi pula standar persaingan antar partai politik. Tujuannya, untuk menjamin persaingan sehat antar partai. "Kalau terjadi persaingan sehat, maka betul-betul anggota parlemen yang lolos itu adalah yang berkualitas," imbuhnya.

Sementara itu, terkait usulan pemerintah untuk menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas. Sejauh ini, Benny mengatakan mayoritas fraksi DPR menyetujui proporsional terbuka, hanya saja, jika berlaku sistem terbuka - terbatas, maka batasannya akan seperti apa masih menjadi perbincangan bersama pemerintah.

Dalam sistem proporsional terbuka, anggota legislatif yang memperoleh suara terbanyak dalam pileg akan mewakili partai. Sebaliknya, sistem tertutup, penetapan caleg terpilih berdasarkan nomor urut yang ditentukan partai.

Namun, tambahnya, yang perlu dibatasi ialah berkaitan dengan perolehan suara partai. Jika pada Pemilu 2014, suara yang diperoleh partai kemudian diberikan kepada caleg yang mendapatkan dukungan suara terbanyak di daerah pemilihan, maka dalam sistem pemilu ini suara yang diberikan kepada partai tidak otomatis diserahkan kepada caleg yang mendapatkan suara terbanyak, tetapi menjadi hak partai.

"Diserahkan kepada partai, tapi kita juga akan batasi supaya nantinya parpol tidak memperjual-belikan suara. Jadi, itu saja yang belum kita putuskan, apakah suara partai ini diberikan kepada caleg yang mendapatkan suara terbanyak ataukah suara partai politik itu diserahkan kepada peserta nomor urut 1. Setelah diserahkan kepada nomor urut 1, maka tetap yang berlaku itu adalah caleg yang mendapatkan suara terbanyak," tandasnya.

"Kombinasi seperti ini menghargai partai politik dan juga menghargai kompetisi sehat diantara para caleg di daerah pemilihan," pungkas politisi dari NTT itu. ■

Junjung Asas Keterwakilan di Parlemen

Di lain pihak, isu representasi atau keterwakilan di Parlemen juga turut menyedot perhatian. Diketahui, semua fraksi setuju usulan terhadap wacana penambahan kursi Anggota DPR RI. Penambahan Anggota DPR RI dirancang untuk menutupi kekurangan kursi di beberapa daerah pemilihan yang didasari sejumlah asumsi.

Diantaranya, penambahan penduduk Indonesia yang sudah mencapai jutaan serta pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Kurangnya kursi di dapil berdampak pada derajat proporsionalitas di daerah pemekaran seperti Kalimantan Utara (Kaltara), Madura dan Kepulauan Riau (Kepri).

"Penambahan kursi maupun dapil mau tidak mau harus terjadi, karena dalam UU tentang Mekanisme Penentuan Pemilihan, Anggota DPR RI tidak boleh lintas provinsi. Misalnya Kaltara dan Kaltim harus dipisah, harus ada kursi di Kaltara. Apakah diambil dari Kaltim atau menambah kursi baru tanpa mengurangi Kaltim, ini yang akan kita bahas," papar Pimpinan Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu Yandri Susanto saat ditemui Parlementaria di ruang kerjanya.

Di sisi lain, Yandri menambahkan, lonjakan pertumbuhan penduduk Indonesia selama 10 tahun terakhir cukup besar, sementara penambahan jumlah kursi di DPR RI belum pernah dilakukan. Padahal, negara kita menganut sistem keterwakilan.

Ia mencontohkan, seperti yang terjadi di Kepulauan Riau, harga kursi di Kepri cukup mahal. Kepri memiliki jumlah penduduk mencapai 2,5 juta penduduk, tetapi hanya mendapat



Foto: Rumi/ww

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy



Indonesia ini keberagamannya tinggi, terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa, penyebaran jumlah penduduknya juga variatif. Nah, kalau mau disederhanakan 2 partai, yah tidak bisa, karena sistem keterwakilan Indonesia beda dengan sistem wakil di negara lain

alokasi kursi sebanyak 3 kursi. Begitu pula, dengan sebaran kursi di wilayah yang padat penduduk, yakni Pulau Jawa. Alokasi kursi dinilai kurang memadai.

"Antara 570 - 580, artinya bisa nambah 10 - 20 kursi. Sebagian untuk penempatan daerah otonomi baru, daerah padat penduduk dan daerah dapil yang terlalu luas wilayahnya. Seperti yang terjadi di Sumatera Utara, ada satu dapil yang jumlah kabupaten / kotanya 19, bayangkan jika anggota dewan mau reses. Nah, ini mungkin mau kita pecah, sehingga ada penambahan kursi disitu," jelas politisi dari F-PAN itu.

Tak hanya itu, Pimpinan Pansus Penyelenggaraan Pemilu itu juga

menyoroti wacana penyederhanaan partai politik melalui peningkatan ambang batas parlemen. Menurutnya, perampingan parpol menjadi tiga hingga dua partai dinilai kurang pas dengan kondisi Indonesia yang pluralisme serta menganut asas keterwakilan.

"Indonesia ini keberagamannya tinggi, terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa, penyebaran jumlah penduduknya juga variatif. Nah, kalau mau disederhanakan 2 partai, yah tidak bisa, karena sistem keterwakilan Indonesia beda dengan sistem wakil di negara lain," tambah politisi dari dapil Banten II.

Kemerdekaan berserikat merupakan titik tolak lahirnya

organisasi partai politik dan selalu bertumbuh dari waktu ke waktu. Partai politik sebagai tonggak demokrasi merupakan wadah untuk menyampaikan berbagai aspirasi mereka.

Lebih lanjut, ia menuturkan, jika penyederhanaan partai politik tetap dipaksakan, maka akan berimplikasi kepada kelompok minoritas. Menurutnya, akan ada kelompok - kelompok tertentu yang tidak memiliki keterwakilan.

"Indonesia tetap Indonesia, tidak bisa disamakan dengan negara lain, kalau dipaksakan 2 atau 3 partai maka kelompok minoritas tidak ada wakilnya," imbuh Yandri.

Berbicara lebih lanjut mengenai representasi atau keterwakilan, sambungnya, Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu juga telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah pihak terkait hak politik penyandang disabilitas. Pansus menilai masih banyak praktek diskriminatif terhadap kaum difabel.

Beberapa poin lain yang diusulkan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufroni Sakaril mengusulkan ketentuan "sehat jasmani dan rohani" dalam pencalegan sebaiknya dihilangkan karena sifatnya yang multi - tafsir. Banyak publik dan bahkan dokter menganggap penyandang disabilitas sama dengan sakit, padahal berbeda. PPDI juga mengusulkan keterwakilan penyandang disabilitas sebesar 10 persen.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansus Lukman Edy mendorong dilakukan tindakan afirmatif sehingga kompetisi antara yang normal dan difabel berjalan seimbang, untuk mengakomodir keterwakilan penyandang disabilitas. Misalnya dengan memberikan diskon kursi.

"1 kursi anggota DPR RI normal itu 500 ribu, maka ada diskon kepada disabilitas, bisa kurang dari 25 persen. Sedangkan, untuk mencalonkan di DPD, syaratnya ada 2000 KTP, maka kaum disabilitas bisa dikurangi separuhnya, cukup 1000. Kemungkinan seperti itu pola-pola kita untuk mendorong afirmasi disabilitas," tandas politisi dari F-PKB itu. ■

Pengelolaan Keuangan Haji Harus Sesuai Hukum Islam

Pengelolaan dana haji selalu mendapat sorotan dari masyarakat. Jumlah Muslim Indonesia yang mendaftar haji setiap tahun terus bertambah, sementara kuota haji terbatas. Hal ini mengakibatkan daftar tunggu menjadi panjang. Peningkatan daftar tunggu berdampak pada dana (BPIH) dalam jumlah yang cukup besar.

Calon Jamaah haji dan masyarakat pada umumnya menuntut untuk mengetahui bagaimana dana tersebut diterima, dikembangkan, dan digunakan, baik untuk biaya operasional haji di tanah air maupun di Arab Saudi. Selain itu, apakah pengelolaan dana tersebut telah sesuai dengan hukum Islam ?

Menurut catatan setiap tahun, dana setoran haji dapat terkumpul minimal 10 Triliun. Jumlah dana yang terkumpul naik dari Rp 55 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 67 triliun pada tahun 2013. Pada tahun 2015 naik lebih besar hingga pencapaian Rp 83 triliun.

Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), yang sebelumnya telah disetujui Rapat Paripurna DPR-RI pada 29 September 2014.

Kementerian Agama tidak lagi mengelola keuangan haji karena segera terbentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Pada UU ini disebutkan, pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Foto : Iwan/Iw

Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Mari Astuti

Politisi Fraksi Partai Golkar ini, menegaskan sudah semestinya kesesuaian syariah menjadi landasan utama dalam pengelolaan dana tersebut, karena hasil dari pengelolaan tersebut kelak akan digunakan para jamaah haji dalam bentuk pemondokan, *living Cost*, dan generalisasi service free maupun pelayanan dalam negeri.

Tugas BPKH adalah pengelolaan dana BPIH Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.

BPIH diterima melalui bank syari'ah atau bank unit syari'ah. Namun pada daerah yang belum terdapat bank syari'ah atau bank unit syari'ah dapat diterima melalui bank transistor konvensional. Karena dalam keadaan darurat dan terdapat kebutuhan mendesak, maka hal tersebut dapat dibenarkan.

Tugas BPKH adalah pengelolaan dana BPIH Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.

Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Endang Maria Astuti mengutarakan bahwa pengelolaan dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) seyogyanya sesuai dengan hukum Islam karena dana hasil pengelolaan akan digunakan untuk melayani dan memfasilitasi jamaah haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi.

Menurutnya, pengelola sudah harus memperhatikan kesesuaian hukum Islam, semenjak dari penerimaan setoran awal dan lunas BPIH melalui bank penerima setoran

(BPS), kemudian pengembangan atau investasi di beberapa sektor untuk mengoptimalkan dana yang terkumpul, lalu mengenai pengeluaran dana untuk biaya penyelenggaraan.

"Pengelolaan keuangan haji harus memperhatikan kesesuaian pengelolaan dengan hukum Islam," kata Endang Maria Astuti.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini, menegaskan sudah semestinya kesesuaian syariah menjadi landasan utama dalam pengelolaan dana tersebut, karena hasil dari pengelolaan tersebut kelak akan digunakan para jamaah haji dalam bentuk pemondokan, *living Cost*, dan generalisasi service free maupun pelayanan dalam negeri. Apabila pengelolaan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, dan jamaah haji menerima fasilitas dari hasil pengelolaan tersebut, maka kemabruran haji setiap jamaah dapat diragukan.

"Apabila pengelolaan dana tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, dan jamaah haji menerima fasilitas dari hasil pengelolaan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dapat berakibat pada kemabruran individu jamaah," tegasnya.

Dalam perkembangannya, manfaat ibadah haji dalam bidang ekonomi tidak hanya dirasakan pada saat musim Haji, melainkan dapat diperoleh sepanjang tahun, yaitu dari setoran dana BPIH yang terkumpul dan mengendap di BPS sebelum digunakan untuk biaya riil perjalanan haji. Manfaat maksimal dari dana haji yang terkumpul tersebut, hanya dapat terwujud apabila dikelola melalui lembaga-lembaga yang dapat dipercaya dan mengembangkannya dengan menggunakan prinsip syariah.

Akumulasi dana yang terkumpul dari setoran BPIH cukup banyak jumlahnya, dan alangkah sia-sianya apabila dibiarkan tidak berkembang. Maka, pihak pengelola melakukan langkah-langkah konkret untuk mengembangkannya dan mengoptimalkannya dengan jalan-jalan yang dipandang tidak bertentangan dengan hukum Islam.



Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Mari Astuti

ditransformasikan menjadi dorongan dalam upaya meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat. Selain itu tentunya dapat meringankan beban biaya BPIH," ungkapnya.

Pengelolaan dana yang lebih baik membuahakan dana abadi umat (DAU), yakni sisa dari operasional dana BPIH yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara luas, dalam bentuk pendidikan, dakwah, sosial keagamaan, pembangunan tempat ibadah, kesehatan dan sebagainya.

"Jumlah setoran BPIH yang dibayarkan oleh jamaah haji memiliki andil dan kontribusi yang cukup besar untuk kemaslahatan umat dan memberi harapan

ke depan bahwa jumlah jamaah haji yang terus meningkat berbanding lurus dengan jumlah kesejahteraan umat secara ekonomi," katanya.

PERLU DIBENAIH

Endang Maria Astuti menerangkan untuk menunaikan Ibadah Haji, seorang muslim Indonesia harus membayar uang setoran awal sebesar Rp 25 juta melalui BPS BPIH, serta melunasinya pada tahun keberangkatan. Mengenai BPIH yang disetorkan pada bank syariah dan bank unit syariah tidak bermasalah karena memang tidak mengandung unsur ribawi.

Namun bagi yang menyetorkan melalui bank transitio konvensional sebagai konsekuensi akibat tidak ada bank syariah dan bank unit syariah pada daerah tertentu diperbolehkan dengan alasan kebutuhan yang mendesak dan dipandang darurat. Selain itu bank konvensional tersebut hanya bersifat sementara (transit) yang akan segera mengirimkan setoran BPIH tersebut pada bank syariah di akhir pekan.

Pengembangan dana BPIH yang dilaksanakan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pun dipandang

BPIH yang disetorkan pada bank syariah dan bank unit syariah tidak bermasalah karena memang tidak mengandung unsur ribawi

telah sesuai dengan hukum Islam, karena memang pengelolaan dan penerbitan SBSN berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Metode pembiayaan dalam SBSN mengikuti akad yang akan digunakan dalam transaksi syariah pada umumnya.

Namun pengembangan dana BPIH yang juga dilakukan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN), Endang Maria Astuti menjelaskan, penerbitan SUN didasarkan pada perjanjian utang piutang yang berbasis pada bunga dan tercatat sampai tahun 2014 bunga tersebut mencapai 93.800 USD.

"Pengembangan BPIH melalui SUN pun bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan oleh karena itu juga pengembangan dana BPIH pada setoran ini dinilai haram," katanya.

Selain SBSN dan SUN, dana BPIH juga dikembangkan melalui deposito berjangka. Ketentuannya ialah apabila pada suatu BPS-BPIH seseorang telah mencapai 20 miliar, maka 10 miliar akan didepositokan. BPS BPIH yang menerima setoran merupakan bank syariah maupun bank unit syariah maka pengembangan BPIH dalam setoran ini dipandang telah sesuai dengan prinsip syariah. Lebih jauh lagi penempatan dana BPIH dalam deposito di perbankan syariah dapat dibenarkan karena berdasarkan prinsip mudharabah.

Dana BPIH dari penerimaan dan hasil pengembangan di berbagai sektor usaha, digunakan untuk biaya

"BPKH sebagai lembaga negara yang bertugas untuk mengelola dana BPIH dalam setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Pihak pengelola dapat melaksanakan berbagai pengolahan terhadap dana BPIH dengan memandang sesuatu yang lebih membawa kemaslahatan," paparnya.

Tiap pengelola pun tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang mengurangi nilai maupun manfaat di bawah standar minimal. Apabila diprediksi akan merugikan atau diperkirakan pengembangan di sektor lainnya akan mampu menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar lagi, maka pengembangan harus dilakukan di sektor tersebut, kecuali jika mencapainya menghadapi berbagai kesulitan yang berat. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan pihak pengelola ialah bahwa kemaslahatan tersebut juga harus dapat dirasakan secara langsung oleh calon jamaah haji dan juga masyarakat secara umum.

"Kemaslahatan yang lahir dari pengelolaan dana BPIH menjadikan ibadah haji yang merupakan simbol spirit keberagaman yang kuat di kalangan umat, dapat

operasional penyelenggaraan ibadah haji. Dana tersebut apabila dilihat dari sumber pengembangan yang memasukkan hasil transaksi SUN, maka dipandang sebagai dana syubhat, karena bercampur antara halal dengan haram akibat unsur ribawi hasil pengembangan melalui SUN.

"Dana tersebut kemudian digunakan untuk pelayanan dan fasilitas jamaah haji baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Menerima pelayanan dan fasilitas dari dana yang telah terkontaminasi tersebut merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh jamaah haji," ungkapnya.

Mengenai pengelolaan dana BPIH merupakan tanggung jawab BPKH dan diluar tanggung jawab jamaah haji. selain untuk biaya operasional pengelolaan BPIH diantaranya juga digunakan untuk membayar jamaah yang batal berangkat akibat sakit maupun meninggal. Mereka hanya akan menerima sejumlah uang yang telah disetorkan tanpa mendapatkan hasil optimalisasi BPIH.

"Ini dirasa tidak adil karena seharusnya jamaah yang batal berangkat mendapatkan hasil optimalisasi sebagaimana juga yang jamaah yang berhasil berangkat," jelasnya.

Untuk itu, Endang Maria menyarankan mengenai penerimaan dana BPIH di beberapa daerah yang belum terjangkau oleh bank syariah atau bank unit Syariah BPKH dapat mengusulkan berdirinya bank syariah atau bank unit syariah untuk menerima setoran BPIH tanpa harus bertransaksi dengan bank transito konvensional.

Hal tersebut bertujuan agar mempermudah jamaah haji untuk menyetorkan BPIH tanpa harus bertransaksi dengan bank transito konvensional.

Mengenai pengembangan di sektor SUN hendaknya pihak Kementerian Agama mencabutnya atau menyudahi investasi di sektor tersebut, apabila jatuh tempo dan mengalokasikannya ke sektor lain, seperti SBSN maupun deposito. Mengenai bunga yang tercatat sampai tahun 2014 seperti 93.800 USD hendaknya ditasharrufkan untuk kepentingan umum dan bukan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji, karena khawatir akan mempengaruhi kemabruran Haji.

Mengenai pengeluaran dana BPIH, terkait pengembalian dana bagi yang batal berangkat hendaknya dikembalikan beserta nilai manfaatnya agar dirasa adil. Karena apabila dilihat dari segi pembatalannya maka sesungguhnya jamaah haji tidak menghendakinya namun akibat ada hal yang diluar dugaan seperti sakit yang tak kunjung sembuh ataupun meninggal maka dengan terpaksa dibatalkan.

Endang Maria menilai reformasi tata kelola haji bisa dimulai secepatnya dengan segera difungsikannya BPKH. Sejumlah masalah tata kelola haji yang terjadi menahun harus segera diselesaikan demi kenyamanan dan keselamatan jamaah haji.

Endang mengatakan, DPR sudah mendesak pemerintah agar BPKH bisa segera aktif. Menurutnya fungsi BPKH sudah sesuai dengan amanat undang-

Penerimaan dana BPIH di beberapa daerah yang belum terjangkau oleh bank syariah atau bank unit Syariah BPKH dapat mengusulkan berdirinya bank syariah atau bank unit syariah untuk menerima setoran BPIH tanpa harus bertransaksi dengan bank transito konvensional.

undang. Ia meyakini nantinya semua aspek keuangan dan pelayanan kepada jamaah haji dapat dilakukan BPKH. "Sehingga jamaah haji dapat memperoleh pelayanan prima dalam hal angkutan, pondokan, catering, tenda," ujarnya.

Dia menjelaskan dengan aktifnya BPKH untuk fokus memberikan pelayanan prima bagi jamaah maka Kementerian Agama harus fokus kepada dua aspek yang tidak kalah pentingnya yakni aspek bimbingan ibadah dan pemberian perlindungan dan keamanan. ■

(as)





KOMISI VI

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon, didampingi Anggota Komisi VI, Khilmi dan Fathulullah meninjau Pasar Senen yang terbakar dan berdialog dengan para pedagang dan pemilik kios yang menjadi Korban Kebakaran
Foto : Iwan/iw





KOMISI III

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatya didampingi sejumlah Anggota Komisi menemui para pendemo Aksi Damai 212 di depan Halaman Gedung DPR RI
Foto : Runi/iw





Tim Kunspek Komisi II DPR RI didampingi Ketua Komisi Zainudin Amali di wilayah DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan Pilkada di Provinsi DKI Jakarta
Foto : Iwan/iw





Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain didampingi sejumlah Anggota Komisi VIII menemui para pendemo yang tergabung dalam PGSI terkait tunjangan sertifikasi guru yang belum terbayarkan.
Foto : Runi/iw

KOMISI VIII





KUNSEK
KOMISI VIII

Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Deding Ishak meninjau Tanggul Sungai Togorara yang dilewati lahar dingin, di Maluku Utara. Kamis (02/02), Foto: Jaka/iw





Raja
Salman

Pimpinan DPR RI menerima
Kunjungan Kehormatan Raja Arab Saudi
Salman bin Abdulaziz Al Saud
di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara
Foto : doweih, kresno, arif, runi, rizka, odjie,
jayadi/iw





KUNKER
KOMISI III

Tim Kunker III DPR RI dipimpin
Wakil Ketua Trimedya Panjaitan
ke Provinsi Jawa Timur
Foto : andri/iw





**KUNKER
KOMISI IV**

Tim Kunker Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Herman Khaeron didampingi Kepala Badan karantina Pertanian Banun Harpini tinjau Karantina pertanian dan Kartina Ikan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta sekaligus memusnahkan produk-produk pertanian dan perikanan ilegal, selundupan, atau kadarluasa
Foto : iwan/iw



Wujudkan Jamkestama Prima, BURT Imbau Sinergi Jasindo dan RS Daerah *Provider*



Foto : Agung/iw

Tim Kunker BURT DPR RI melakukan pengawasan pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi Anggota DPR RI dan keluarganya di RS Bakti Timah, Kota Pangkal Pinang

Tim kunjungan kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mengunjungi beberapa Rumah Sakit (RS) rumah sakit *provider* Jasindo yang merupakan mitra kerja sekaligus institusi penjaminan kesehatan bagi 560 Anggota DPR RI dan keluarganya. Kunjungan dilaksanakan di 3 Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Gorontalo dan Kepulauan Bangka Belitung.

Kunjungan kerja spesifik di RS Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya Kalimantan Tengah dipimpin Wakil Ketua BURT Hasrul Azwar meninjau beberapa ruangan dan fasilitas RS tersebut sekaligus berkoordinasi

dengan PT Jasindo selaku *Provider* di Palangka Raya, Senin (16/01).

"Ini yang mau kita lihat. Karena dari berbagai tinjauan sebelumnya ada RS *Provider* yang belum sepenuhnya siap melayani anggota dewan yang berobat atau akan rawat inap," ungkap politisi Fraksi PPP ini.

RS Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya baru menyediakan 2 kamar VVIP dengan fasilitas yang masih minim. Pihak RS Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya berjanji akan membangun 8 kamar VVIP yang permanen dan memenuhi standar.

Sementara itu, Tim kunker BURT yang lain, dipimpin oleh Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso meninjau

RSIA Sitti Khadijah, Gorontalo, Kamis (19/01).

Di sini Tim kunker BURT memberi masukan Jasindo agar lebih memberikan perhatian pada faktor pendukung pelayanan selain kamar dan fasilitas di dalam rumah sakit.

"Tentunya kita ingin mendapatkan pelayanan prima, tetapi kalau di daerah itu tidak mempunyai peralatan yang cukup tentunya bisa melanjutkan perawatan itu di kota lain, pada situasi darurat seharusnya kita bisa meminta kepada Jasindo untuk memberikan fasilitas untuk mengantar pasien dibawa ke Jakarta atau daerah lain," tandas Agung.

Dijelaskan Direktur RSIA Sitta

Foto : Husen/iw



Tim Kunker BURT DPR RI meninjau RS Baiturrahim di Jambi

Foto : Iwan/iw



Tim Kunker BURT DPR RI memantau fasilitas Rs Islam PKU Muhammadiyah di Palangka Raya

Foto : Rizka/iw



Tim Kunker BURT DPR RI meninjau kamar VIP di RSIA Sissi Khadijah, Gorontalo

Ini yang mau kita lihat. Karena dari berbagai tinjauan sebelumnya ada RS *Provider* yang belum sepenuhnya siap melayani anggota dewan yang berobat atau akan rawat inap," ungkap politisi Fraksi PPP ini.

Khadijah Dr. Elson Djakaria, SPog, pihaknya memang sedang mengadakan pembangunan fisik rumah sakit dan berbagai penambahan fasilitas. Diharapkan dengan pembenahan itu maka anak dan isteri atau suami anggota dewan yang berasal dari Dapil Gorontalo maupun anggota dewan yang sedang kunjungan kerja di daerah tersebut bila memerlukan pelayanan kesehatan dapat dipenuhi oleh asuransi Jasindo.

Peninjauan selanjutnya dilakukan di RS. Bakti Timah, di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masih dipimpin Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso, tim menilai RS Bakti Timah cukup memenuhi syarat untuk dijadikan salah satu rumah sakit rujukan bagi anggota DPR dan keluarganya untuk memeriksakan kesehatan.

"Rumah sakit ini sudah memenuhi standar untuk pelayanan asuransi Jamkestama dan saya pikir tidak ada kendala Jamkestama di wilayah provinsi kepulauan Bangka Belitung ini," katanya usai BURT melakukan dialog dan meninjau fasilitas, Selasa (31/01).

Menurutnya hubungan dan kerjasama PT. Jasindo dengan rumah sakit sudah baik. SOP nya sudah ada dan telah dilakukan sosialisasi. Demikian dia mengimbau agar Jasindo tetap berbenah untuk memperbaiki kinerja dibanting tahun sebelumnya. ■ (iw/ry/as)

Keberagaman Adalah Realita Yang Harus Diperkokoh

Foto : Mastur/iw



Tim Pansus Wasantara DPR RI menyerahkan plakat kepada tokoh agama, tokoh adat dan pejabat di Sumbar

Rancangan Undang-undang Wawasan Nusantara (RUU Wasantara) disusun salah satu tujuannya untuk memperkuat keberagaman menuju persatuan. Keberagaman adalah realita dan itu harus diperkokoh dan dihargai untuk ditujukan kepada terciptanya persatuan nasional.

Rancangan Undang-undang ini juga sangat strategis bagi masa depan dan kelestarian bangsa. Pasalnya, begitu Indonesia masuk era modern dan keterbukaan, identitas kebangsaan terancam akibat pengaruh dari luar, tanpa mampu terseleksi.

Demikian antara lain benang merah yang bisa ditarik dari pernyataan Ketua Pansus RUU Wasantara Daryatmo Mardiyanto dan anggota Pansus Taufiq R. Abdullah usai mengikuti pertemuan dengan jajaran Pemda, Tokoh adat Ninik Mamak, Tokoh Agama, Akademisi dan Bunda Kandung di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Padang. Tim Pansus juga menghimpun masukan ke Provinsi Sulut dan Provinsi Bali.

Dipilihnya Sumbar, kata Daryatmo karena daerah ini memiliki kekhasan, spesifikasi dan peranan dalam memperkuat NKRI sejak merdeka hingga saat ini. Lebih lanjut Politisi F-PDI Perjuangan itu menyebutkan, Sumbar memiliki kekhasan pada ajaran Islam yang bersumber pada Al Quran yaitu matrilineal sebagai bagian yang sangat kuat memposisikan tanah dan air dalam menegakkan ke Indonesiaan serta keutuhan NKRI.

Selain itu, masih kata Daryatmo, kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Dwi Tunggal Bung Karno dan Bung Hatta adalah perpaduan ke tunggal ika yang berbasis pada kebhinekaan. "Jadi yang kita harapkan adalah keberagaman yang mengarah pada Bhineka Tunggal Ika, pada persatuan," tegasnya.

Taufiq R. Abdullah mengatakan, alasan Pansus menghimpun masukan ini karena DPR RI menyadari betapa pentingnya menjaga integritas khususnya generasi muda, sehingga dipandang perlu diwujudkan dalam

bentuk regulasi.

Setelah pertemuan dan berdiskusi selama hampir tiga jam, tergambar bahwa kebhinekaan itu harus tetap ada dan harus dijaga. Bahkan harus diusahakan bagaimana menciptakan daya rekat sebagaimana yang telah dirumuskan oleh pendiri bangsa, yaitu Pancasila. Namun dalam realisasinya masih ada 'jarak', karenanya perlu ada dialog terus menerus diantara komponen-komponen yang berbeda.

"Pansus menggali masukan, karena ingin mengetahui apa dan mana saja yang harus dipertemukan dan menemukan pemahaman yang sama," jelasnya, dengan menambahkan bahwa Pansus ingin mempersatukan, bukan menyatukan untuk penyeragaman, sehingga keberagaman itu tetap ada.

Sedangkan Ketua Tim Pansus RUU Wasantara Agun Gunanjar saat berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara menekankan para penyelenggara negara harus memahami betul pandangan wawasan nusantara (wasantara) yang sangat strategis. Praktik bernegara memang harus disesuaikan dengan wasantara. Untuk itu, pengambilan kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah mesti pula berwawasan nusantara.

Karakteristik Khusus

Wasantara yang dimaksud Agun adalah mampu memahami dan menjaga keragaman rakyat Indonesia yang sangat kaya. Adat istiadat, ras, bahasa, hingga busana masyarakat Indonesia beragam. Inilah yang perlu dijaga dengan UU Wasantara.

"Indonesia punya karakteristik khusus dibandingkan negara lain. Tidak saja keragaman rakyatnya, tapi juga kepulauannya sangat luas dengan ribuan pulau. Bahkan, sebagian pulaunya belum berpenghuni," jelas Agun dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Sulut Oly Dondokambey. RUU usul inisiatif DPD RI ini, ingin agar pemerintah pusat dan daerah tidak mengambil kebijakan berdasarkan ego wilayah.

Sementara itu, Gubernur Sulut berkomentar, ada banyak masukan yang bisa digali dari Sulut. Di sini ada

Foto : Husen/iw



Tim Pansus Wasantara berdialog dengan Gubernur Sulawesi Utara di Kantor Gubernur Sulut

pulaunya belum berpenghuni. Dan RUU Wasantara yang sedang dirumuskan ini harus pula menjangkau masyarakat di Pulau Miyangas yang berbatasan langsung dengan Philipina. Masyarakat di sana punya kekhasan sendiri sebagai entitas khusus dan unik.

Sementara itu Wakil Ketua Pansus Khatibul Umam Wiranu dalam kunjungannya ke Provinsi Bali menerima berbagai aspirasi dan dukungan dari berbagai pihak, antara lain tokoh dari Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Adat Setempat, Akademisi dan Pemprov Bali.

Mereka berharap RUU Wasantara menjadi payung berbagai Undang-undang induk yang menyangkut kebudayaan, kebangsaan, nasionalisme dan kenusantaraan. "Usulan bahwa RUU Wasantara ini harus terwujud dan menjadi UU induk merupakan dukungan masyarakat yang perlu kita pikirkan secara hati-hati. Karena menurut tata cara pembuatan UU, apakah memungkinkan kita memproduksi UU yang disebut UU induk," kata Khatibul menanggapi usulan dari Ketua Umum FKUB Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet.

Politisi F-PD itu tak menampik, dari jumlah 1.500 UU yang saat ini berlaku, masih ada UU yang tumpang tindih, bahkan *overlap*. "Hal inilah yang memang memerlukan payung yang lebih tinggi. Tinggal kita pelajari bagaimana teknis pembuatannya," imbuhnya.

banyak dilupakan, sehingga pembahasan RUU ini nantinya akan dijadikan sebuah pondasi dalam keseluruhan pengorganisasian, perundangan, maupun dari segi kebijakan. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI yang bersifat dinamis dan berkelanjutan. ■

(mp.hs,ray)



Foto : Mastur

Tim Pansus Wasantara dipimpin Ketuanya Daryatmo Mardiyanto bertukar cenderamata dengan tokoh masyarakat Sumbar

Komisi I DPR RI Ingin Rumah Sakit TNI Tingkatkan Mutu Pelayanan Bagi Prajurit

Beberapa waktu lalu Tim Kunjungan Spesifik Komisi I DPR RI mengunjungi beberapa Rumah Sakit (RS) yang dikelola oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), diantaranya RS TNI AD Dr. R. Hardjanto di Kalimantan Timur dan RS TNI AL Dr. Idris P Siregar di Jawa Timur. Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat sarana dan prasarana serta kualitas mutu pelayanan RS kepada Prajurit TNI dan Masyarakat.

Komisi I yang tergabung dalam Panitia Kerja Kesejahteraan Prajurit TNI ini menginginkan RS milik TNI meningkatkan mutu, sarana dan prasarana serta standar pelayannya, sehingga dapat optimal dalam

memberikan pelayanan terhadap Prajurit TNI khususnya dan masyarakat pada umumnya.

"Rumah sakit TNI rujukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di perbatasan dan ini bagian dari pengabdian TNI kepada negara dan masyarakat, harus menjadi prioritas dalam peningkatan pelayanan mutu dan standar pelayannya," kata Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi I Asril Hamzah Tanjung saat meninjau RS Dr. R. Hardjanto di Kota Balikpapan didampingi Pangdam VI/Mulawarman Johnny Luban Tobing dan Kepala RS TNI AD Dr. R. Hardjanto Azhari Ramdani, Kamis (02/02).

Selain memberikan pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada

prajurit dan keluarganya, RS Dr. Hardjanto juga memberikan dukungan kesehatan pada prajurit dalam pelaksanaan operasi tempur maupun latihan, juga memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat umum.

Asril menjelaskan, anggaran pelayanan kesehatan pada Kementerian Pertahanan RI sebesar Rp 750 milyar dan RS. Dr. R. Hardjanto harus menjadi prioritas. Untuk itu, Komisi I akan membicarakan hal ini dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

"Panja ini akan mendesak Menhan agar Rumah Sakit Hardjanto dan rumah sakit lainnya yang telah di kunjungi Komisi I untuk diprioritaskan mendapat anggaran peningkatan standar mutu



Tim Panja Kesra Prajurit Komisi I DPR RI foto bersama Pangamat Laksamana Muda TNI Darwanto

Foto : Iwan/Iw



Foto : Agung/iw

Tim Panja Kesra Prajurit Komisi I DPR RI meninjau RS. Dr. R Hardjanto di Kota Balikpapan

serta sarana dan prasarana," tegas politisi Gerindra ini.

Kepala RS Dr. R. Hardjanto Balikpapan Dr. Kol. Azhari Ramdani menjelaskan yang menjadi kendala rumah sakit ini adalah bangunan sebagian besar masih bangunan lama, pengelolaan limbah belum maksimal, penyesuaian pola keuangan PNPB, personel masih kurang, alat kesesahatan (Alkes) masih kurang, serta pelayanan kesehatan tertentu Non BPJS belum ada alokasi belanja modal.

Menurut Azhari, kebutuhan Alkes antara lain CT Scanner, MRI, Ventilator, Mobile Rontgen, C-ARM, Atroskopy, THT Unit, Endoscopy, Desa TENS, dan Diatermi. "Ini gambaran kondisi Rumah Sakit Dr. R. Hardjanto, sebagai masukan bagi Tim Komisi I dalam mengadakan evaluasi bagi peningkatan kinerja rumah sakit ini," katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi I yang juga Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi I ke Jawa Timur Abdul Kharis Almasyhari saat pertemuan Tim dengan Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Darwanto, di ruang rapat Diskes Koarmatim, Ujung Surabaya, Kamis (02/02/2017).

Menurut Politisi Partai Keadilan

Sejahtera ini, profesionalisme TNI belum dibarengi dengan tingkat kesejahteraan yang memadai. Kesejahteraan prajurit saat ini belum sesuai dengan standar minimum kebutuhan dasar yang layak mencakup sandang, pangan, papan, kebutuhan keluarga seperti pendidikan anak dan jaminan hari tua.

Terkait pengendalian mutu dan pelayanan RS TNI, lanjut dia, tidak hanya dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI, keluarga dan para PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, tetapi juga kepada masyarakat umum. Karena itu, mutu dan pelayanan yang diberikan harus dijaga dan ditingkatkan. Terutama, dengan semakin meningkatnya pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat. Maka sistem nilai dan orientasi dalam masyarakatpun mulai berubah.

Selain itu, kata Abdul Kharis, RS TNI dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, ramah dan bermutu. Makanya, fungsi RS TNI sebagai pemberi pelayanan kesehatan secara bertahap terus ditingkatkan agar menjadi efektif dan efisien serta memberi kepuasan terhadap pasien, keluarga dan masyarakat. "Berdasarkan hal itu, maka peningkatan mutu pelayanan kesehatan RS TNI mutlak

dilakukan," ungkap politisi PKS ini.

Harapannya, agar kesehatan prajurit dapat ditingkatkan maka kesejahteraan bukan hanya dari uang lauk-pauk tetapi juga jaminan kesehatan melalui RS TNI yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga kualitas dan kuantitas kesejahteraan dapat dirasakan prajurit beserta keluarga.

Sementara itu, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Darwanto dalam s a m b u t a n n y a mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Tim Panja Kesejahteraan Prajurit TNI

Komisi I atas kedatangan di Mako Koarmatim dalam rangka untuk mengetahui upaya RS TNI dalam meningkatkan pengelolaan keuangan, pengendalian mutu dan standar pelayanan serta sarana dan prasarana.

Pangarmatim mengatakan, RS TNI AL dr. Idris P Siregar sebagai salah satu fasilitas kesehatan Diskes Koarmatim, terus memberikan pelayanan terbaik untuk prajurit melalui uji pemeriksaan kesehatan yang rutin dilaksanakan, dan memanfaatkan waktu olahraga secara maksimal sehingga kesehatan prajurit tetap terpelihara.

Disamping itu, lanjut Pangarmatim, Koarmatim secara terus menerus melaksanakan bakti sosial pelayanan kesehatan dan donor darah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, PMI, Organisasi Kemasyarakatan dan pihak swasta.

Sementara Kepala Sub Dinas Kesehatan Umum (Kasubdis Kesum) Diskes Koarmatim Mayor Laut (K) dr. M Solikhin menyampaikan paparan tentang penyelenggaraan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk rawat jalan dan rawat inap. Tugas dan fungsi RS saat ini mengacu pada standar rumah sakit tingkat IV (PPK 1). ■

(as/iw)

Komisi V DPR RI Tinjau Infrastruktur Jalan dan Bandara di Pegunungan Hingga Abrasi Pantai



Foto : Nitar/iw

Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau infrastruktur di Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Awal Februari 2017, Komisi V DPR RI melakukan fungsi pengawasan dengan mengunjungi tiga provinsi yaitu Pegunungan Arfak Papua Barat, Tana Toraja Sulawesi Selatan dan Demak Jawa Tengah. Dari 13 kabupaten/kota yang ada di Papua Barat, tingkat kesulitan yang paling masif ada di Kabupaten Pegunungan Arfak. Kehadiran Komisi V DPR RI diharapkan bisa membantu persoalan kondisi infrastruktur dan transportasi yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat.

"Melihat infrastruktur dan transportasi yang begitu sulit dari Manokwari sampai ke Pegunungan Arfak, ada rasa keterpanggilan untuk membantu melalui APBN, khususnya ke Pegunungan Arfak," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena usai pertemuan dengan Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy beserta jajaran SKPD lainnya, di Pegunungan Arfak, baru-baru ini.

Ironisnya, karena Pegunungan Arfak merupakan daerah otonomi baru

sehingga belum masuk dalam 122 cluster kabupaten tertinggal sesuai Perpres No 131 Tahun 2015.

"Sudah ada surat dari Kementerian Bappenas. Ini hanya soal faktor koordinasi saja. Nanti dalam rapat dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat didiskusikan, dan kebetulan informasi ini baru kami dapatkan hari ini," ujar Wattimena.

Menyangkut masih kurang banyaknya gedung pemerintahan di Kabupaten Arfak, Politisi Demokrat ini mengatakan kewenangan itu ada di Komisi II DPR RI. Pihaknya juga akan mengkomunikasikan persoalan ini dengan Komisi II DPR RI.

Pembangunan Bandara Buntu Kunyi, Tana Toraja Majukan Pariwisata

Pembangunan Bandara Buntu Kunyi (BBK), Tana Toraja, terhenti akibat masih adanya berbagai kendala teknis yang belum terselesaikan. Hal ini diungkapkan Lasarus selaku Ketua Tim

Kunspek Komisi V DPR RI saat meninjau lokasi pembangunan bandara tersebut di Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja, belum lama ini.

Lebih lanjut, Lasarus mengingatkan bahwa pada studi awal yang dibuat Tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) sebelum proyek ini dilaksanakan, estimasi biaya yang dibutuhkan senilai Rp500 miliar. Namun masih perlu kajian mendalam oleh pihak Kemenhub dari sisi keselamatan penerbangan terkait kelayakan Bandara Buntu Kunyi agar proyek infrastruktur ini kelak mampu mendorong pengembangan kunjungan wisatawan ke berbagai tujuan wisata di Tana Toraja.

"Dua bukit yang mengapit menjadi persoalan yang harus dikaji ulang oleh Kemenhub, apakah cukup aman untuk keselamatan penerbangan. Selain itu, perlu perhitungan ulang anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi serta medan yang dihadapi," ungkap politisi PDI-P ini.

Dari pantauan Tim Kunspek Komisi V DPR RI didampingi Bupati Tana Toraja, masih banyak jalan provinsi dan jalan kabupaten yang rusak dan sempit, sebagian masih dalam tahap perbaikan dan pelebaran jalan.

"Masih ada peluang dalam pembahasan APBN-P 2017 untuk dimasukkan anggaran perbaikan infrastruktur di Tana Toraja yang cukup mendesak," ungkap Lasarus.

Sementara Dirjen Perhubungan Udara Dephub, Suprasetyo, mengatakan hingga kini pihaknya masih melakukan kajian mendalam terkait BBK, yaitu persoalan teknis yang meliputi pembiayaan dan struktur tanah. Selain itu, kata Suprasetyo, persoalan keselamatan penerbangan juga akan dikaji lebih mendalam.

"Kajian studi ini selama tiga bulan. Studinya selesai, baru kita akan tahu jenis pesawat apa yang memungkinkan bisa terbang di sini," pungkasnya.

Di lain pihak, Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae yang ikut mendampingi kunjungan kerja tersebut



Foto : Naefurociji/iw

Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau lahan Bandara Buntu Kunyi dan proyek infrastruktur jalan nasional Trans Sulawesi Palopo - Toraja di Sulawesi Selatan

meyakinkan kepada Anggota Komisi V DPR RI bahwa persoalan pembebasan lahan untuk Bandara Buntu Kunyi tidak ada masalah. "Saya jamin tidak ada penolakan maupun hambatan dari masyarakat terkait pembangunan Bandara Buntu Kunyi," tegas Nicodemus.

Oleh karenanya Pemda Tana Toraja pada kesempatan tersebut memohon dukungan politik anggaran dari jajaran Anggota Komisi V DPR RI, agar kelanjutan pembangunan Bandara Buntu Kunyi segera terealisasi dan perbaikan infrastruktur jalan juga mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, demikian Nicodemus

Jalan Tol Semarang - Demak Mendesak Untuk Cegah Abrasi

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia berharap pembangunan jalan Tol Semarang-Demak segera terealisasi. Pasalnya, Tol ini juga berfungsi sebagai tanggul pantai untuk menyelesaikan persoalan abrasi pantai. Hal tersebut diungkapkan Adia saat meninjau abrasi pantai di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, awal februari lalu.

Walau dirasa cukup terlambat, mengingat sejak tahun 1990 masyarakat sekitar sudah terendam air rob, dan baru dilakukan pemindahan pemukiman pada tahun 2001, politisi PKS ini

berharap pihak Kemen PUPR dan kementerian terkait lainnya dapat segera membuat desain perencanaan yang terpadu dan bersinergi secara komprehensif.

"Selama ini baik program kabupaten maupun program provinsi terkesan tambal sulam, berjalannya waktu terendam kembali oleh air laut. Saya kira harus ada bendungan raksasa yang sekaligus merupakan jalan tol. Dan nanti air baku yang dihasilkan juga bisa dimanfaatkan masyarakat," ungkap politisi PKS ini.

Yudi menjelaskan bahwa Kecamatan Sayung setiap tahun

mengalami penurunan struktur tanah sekitar 15-20%, sehingga daerah tersebut setiap harinya kerap terendam air rob. Penduduk di Desa Sriwulan ini jumlahnya sekitar 15-20 ribu sehingga pembangunan jalan Tol sebagai pencegah abrasi sekaligus pengurai kemacetan Semarang - Demak bisa menjadi solusi.

Selain memantau rencana pembangunan jalan tol Semarang-Demak, Tim Komisi V DPR RI juga meninjau lahan pembangunan terminal tipe A di wilayah Kabupaten Demak, serta meninjau jalan nasional Demak-Jepara. Saat ini kondisinya tidak lagi cukup memungkinkan untuk dilalui oleh kendaraan besar, karena jalan yang kecil, berlubang dan kerap terendam Air Rob.

Sementara Anggota Komisi V DPR RI Dapil Demak, Fathan menjelaskan, peninjauan Ke Kabupaten Demak berkat laporan Pemerintah Daerah dan masyarakat terkait dampak abrasi pantai. Menurut Fathan, Komisi V DPR RI dan Pemerintah akan hadir dalam menanggulangi dampak dari abrasi.

"Kita juga menginginkan satu terminal yang besar yaitu terminal A. Dua infrastruktur itu yang diharapkan masyarakat Demak sebab kalau membangun jalan tol saja maka itu kurang memberikan suatu manfaat yang besar bagi rakyat. Nah dengan sabuk pantai itu kita menanggulangi abrasi dan juga menghidupkan perekonomian rakyat." pungkas Fathan. ■

(Nita, Odjje, Nadya)



Foto : Nadya/iw

Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau Daerah Abrasi Pantai di Kabupaten Demak, Jateng.

Komisi VIII DPR RI Pertanyakan Pembangunan *Master Plan* Tsunami Kota Sabang



Foto : Chasbi/iw

Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI sedang berdialog dengan BPBD Sabang

dengan ketinggian mencapai 30 meter sedangkan Sabang hanya 2 meter.

Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan Kota Sabang perlu *didukung* pembangunan Master Plan Tsunami, mengingat posisi Sabang berada di daerah pinggiran terluar Indonesia yang berpotensi adanya Bencana Tsunami.

"Indonesia sangat berpotensi bencana tsunami yang luar biasa terkait kesiapan penanggulangan bencana dan perencanaannya harusnya sudah di implementasikan sejak

awal dan ternyata ini tidak masuk prioritas di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat," jelas Politisi PKS ini.

Sekedar informasi, Sabang adalah wajah Indonesia di pulau paling barat Negara Indonesia, berada di titik nol kilometer Indonesia. Pulau ini sangat berpotensi terkena bencana Tsunami karena dikelilingi oleh beberapa Samudera. Tsunami besar yang melanda Banda Aceh dan Kota Sabang pada tahun 2004 telah menewaskan banyak orang, ini merupakan peringatan dan ada kemungkinan dapat terulang kembali. Untuk itu pemerintah setempat supaya lekas membangun Master Plan Tsunami di Sabang.

"Pasalnya gempa sudah berulang kali terjadi di Aceh dan beberapa berpotensi tsunami. Mengapa pemerintah belum menjadikan Sabang sebagai prioritas pembangunan Master Plan Tsunami?. Ini yang menjadi pertanyaan saya," ungkapnya.

"Pemerintah yang katanya akan

Dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi DPR RI yaitu pengawasan sebagaimana ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, Komisi VIII DPR RI menurunkan dua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) ke Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam dan ke Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tim Kunspek Komisi VIII ke Kota Sabang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid, dan Tim Kunspek ke NTB dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain.

Di Kota Sabang, Sodik Mudjahid mempertanyakan belum adanya pembangunan Master Plan Tsunami di Kota Sabang, Daerah Istimewa Aceh, sedangkan diketahui Sabang merupakan daerah potensi Tsunami.

"Saat pertemuan, kami mendapati temuan bahwa Sabang belum membangun Master Plan. Untuk itu kami mempertanyakan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPB) Pusat, kenapa di sini belum ada pembangunan Master Plan Tsunami dan juga belum ada anggaran untuk pembangunan Master Plan tersebut," tanya Sodik saat pertemuan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Aceh dan BPBD Kota Sabang, perwakilan BPBD Pusat, Jum'at (27/01).

Terkait hal tersebut, politisi Gerindra ini menyatakan bahwa temuan ini akan Komisi VIII DPR RI perjuangkan anggarannya di APBN-P 2017. "Sambil menunggu APBN-P, BPBD Sabang diharapkan tetap melakukan kesiagaan apabila bencana Tsunami melanda," ujarnya.

Dari sisi pencegahan bencana, Sodik menerangkan, pemerintah belum menetapkan Kota Sabang menjadi prioritas dalam pembangunan Master Plan Tsunami yang menjadi prioritas adalah Kota Banda Aceh dan Lhouksemawe. Mengingat pada bencana Tsunami tahun 2004 Banda Aceh dan Lhouksemawe dilalap air

melakukan pembangunan dari daerah pinggiran harusnya mendahulukan kota seperti Sabang, ini yang menjadi hal besar untuk kita pertanyakan ke Pemerintah nanti dalam rapat berikutnya" tutupnya.

Memperbaiki Tata Ruang atasi banjir

Sementara, di Bima, NTB Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima untuk segera membuat program jangka panjang terkait penanggulangan banjir bandang yang menimpa masyarakat Bima pada akhir desember lalu.

"Penanggulangan banjir bandang ini tidak hanya memerlukan penanganan singkat atau cepat, tetapi jangka panjang. Program-program yang diusulkan BPBD pasti kita akan dorong," kata Abdul Malik Haramain dalam kunjungan spesifik komisi VIII DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis, (26/01).

Lebih lanjut, politisi F-PKB itu, banjir di kota Bima terjadi hampir setiap tahun, namun kali ini yang terparah karena curah hujan cukup tinggi selama dua hari. Menurutnya, kabupaten Bima sudah tidak mampu menampung debit air dikarenakan kondisi hutan yang gundul menjadi salah satu penyebab banjir.

"Saya kira Pemprov dan pemerintah pusat harus memikirkan bagaimana hutan itu harus terpelihara dengan baik. Karena ini sudah berulang-ulang, maka harus ada kebijakan khusus dari Pemprov menyangkut ini," tegasnya.

Ia juga mendorong agar Pemda kota dan kabupaten bekerja lebih keras untuk menertibkan dan mendisiplinkan warganya dari hal yang paling kecil seperti tidak membuang sampah disungai.

"Saya kira harus disosialisasikan dan jika perlu dipaksakan kepada masyarakat. Sebetulnya kan penyebab

banjir dimana-mana sama, hampir semua problem utamanya itu karena ketidakdisiplinan manusia. Tetapi itu bisa kita minimalisir kalau ada aturan main dan penegakkan hukum yang membuat kita dipaksa untuk disiplin," tandas Abdul Malik Haramain.

Seperti diketahui, banjir bandang terjadi dua kali pada tanggal 21 dan 23 Desember 2016 menimpa Kota dan Kabupaten Bima. Akibat banjir bandang tersebut, 86 persen wilayah kota Bima terdampak banjir, 8.491 jiwa mengungsi, 9.200 luka-luka, 138 rumah hanyut, 397 rumah rusak berat, 363 rumah rusak sedang, 421 rusak ringan, dan puluhan sekolah rusak. Tak hanya itu, jembatan dan fasilitas infrastruktur lainnya juga



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain

rusak.

Anggota Komisi VIII DPR RI Rachmat Hidayat mengatakan provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan daerah yang rawan terkena bencana alam. Menurutnya, hal itu terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh faktor alam tetapi juga penataan ruang kota maupun daerah yang kurang disiplin.

"Seluruh hutan di NTB ini tidak punya penyangga hutan. Tata ruang daerah itu harus disiplin ketika itu dilarang untuk dibangun, yah berarti tidak boleh. Ini jalur hijau tapi boleh dibangun, segala macam dibangun. Bukan saja di Bima, di kota Mataram pun banyak begitu. Rawan bencana karena tata ruangnya rusak," ujar Rachmat.

Lebih lanjut, politisi dari F-PDIP itu menegaskan penataan ruang harus dibenahi untuk mengantisipasi potensi bencana, seperti tanah longsor dan banjir bandang.

"Tata ruang kabupaten itu harus mengacu pada provinsi, semestinya begitu. Provinsi mengacuh pada pusat, ini semua ditabrak, jangankan penyangga, hutannya saja sudah habis. Itu persoalannya," kritisinya.

Tak hanya itu, politisi dari dapil NTB itu menghimbau pemerintah kabupaten untuk menertibkan masyarakat agar disiplin dalam menjaga kelestarian hutan.

"Ini barangkali perlu menjadi perhatian kita semua, sebagai bahan pertimbangan kita untuk membuat NTB ini lebih baik," imbuhnya.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Lutfi, persoalan yang ada di kabupaten Bima dari hulu hingga ke hilir akibat deforestasi atau penggundulan hutan.

"Tidak ada peraturan daerah tentang lahan yang terjal harus ditanami seperti apa, tidak ada perdanya sama sekali. Langkah-langkah seperti ini tidak ada dibuat pemerintah kota maupun kabupaten," ungkap politisi Golkar dapil NTB itu.

Lutfi melanjutkan harus ada penyelesaian secara holistik yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. "Kalau cuma secara parsial, percuma!," tandasnya.

Diketahui, luas lahan kritis di NTB mencapai 555.427 hektare dari total 1.071.722 juta hektare luas kawasan hutan. Lahan kritis di NTB setiap tahunnya meningkat akibat pembalakan liar dan illegal logging. ■

Foto: Anneli/w

(mh/sc/eka)

Komisi X DPR RI Minta Perbaikan Tata Kelola Lembaga Pendidikan Harus Diprioritaskan



Foto : Ekorfiw

Tim Kunspek Komisi X DPR RI meninjau miniatur pembangunan Institut Teknik Kalimantan di Balikpapan

Dalam rangka meninjau sarana dan prasarana lembaga pendidikan negeri, Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke tiga daerah terpilih. Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kepulauan Riau. Kegiatan pengawasan ini secara serentak berlangsung pada awal Februari 2017. Pada umumnya tiga lokasi yang dikunjungi Tim Kunspek Komisi X DPR RI ini menyoroiti soal tata kelola sarana dan parasaran lembaga pendidikan negeri, baik sarana fisik, administratif dan akademik.

Di Provinsi Kalimantan Timur, Tim Kunspek dipimpin Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra dan Anggota Dewan yang turut serta dalam kunjungan tersebut meninjau sarana dan prasarana di Institut Teknik Kalimantan (ITK) serta berdialog dengan jajaran Civitas Akademika Politeknik Negeri Kalimantan.

Ketua Tim, Sutan Adil Hendra menyampaikan ada dua permasalahan yang mendesak untuk diatasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yaitu kebutuhan

sarana dan prasarana kampus serta ketersediaan SDM dosen yang kompeten.

Sutan menjelaskan ITK dan Politeknik Negeri Kalimantan sebagai kampus baru belum diperhatikan secara serius oleh Kemenristek Dikti akibatnya tata kelola perguruan tinggi ini masih banyak kekurangan. "Masih kurang tata kelola dari perguruan tinggi yang baru ini. Tata Kelola ini menjadi skala prioritas," ujar Sutan di kampus ITK, Balikpapan.

Dosen dan tenaga kependidikan PTN Baru memang telah diatur dalam Perpres No. 10 tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN Baru, tinggal realisasinya belum terlaksana secara baik. Sedangkan untuk sarana dan prasarana (Sarpras) PTN Baru, masih belum menjadi perhatian.

Setelah meninjau langsung ke lapangan dan berdialog dengan jajaran civitas akademika kampus, Sutan menekankan pemerintah perlu melakukan pembenahan Sarpras yang signifikan serta ketersediaan dosen pengajar.

"Ternyata setelah kita melakukan

pertemuan dengan jajaran yang ada di ITK ini, perlu pembenahan yang signifikan, terutama sarana dan prasarananya. Yang kedua rasio dosen yang tidak memungkinkan. Telah kita lihat dari 10 prodi yang ada, ada tiga prodi yang belum ada dosen yang membidangi itu," jelas Sutan.

Alih Status PTS Jadi PTN Masi Menyisakan Sejumlah Persoalan

Di Batam, Kepulauan Riau, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dipimpin Ferdiansyah menemukan, alih status Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) masih menyisakan sejumlah persoalan. Misalnya status kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan PTS yang dinegerikan, hingga pengembangan sarana dan prasarana PTN baru masih sangat memprihatinkan.

"Memang masih ada kendala yang menjadi perhatian kita, mengenai keuangan dan kesetaraan jabatan dosen yang sedang diproses, namun secara prinsip dalam konteks alih status dari PTS ke PTN relatif sudah berjalan dengan baik," ujar Ferdiansyah saat tim mengunjungi Politeknik Negeri Batam.

Lebihlanjut Politisi F-PG itu mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemenristek dikti mengenai permasalahan yang ditemukan Komisi X DPR RI di Politeknik Negeri Batam itu, termasuk mengenai komposisi perbandingan antara dosen dan tenaga kependidikan.

"Kalau tadi dilihat dari laporan yang disampaikan oleh Universitas UMRH dan Politkenik Batam masih belum seimbang antara jumlah dosen dengan tenaga pendidikan lainnya sehingga Permasalahan ketersediaan dosen, tenaga kependidikan juga akan menjadi bahan kami saat rapat dengan Kemenristek dikti," katanya.

Politisi F-PG itu juga meminta pemerintah memperhatikan Politeknik Negeri Batam, sebab dirinya menilai



Foto : Ria/iw

Tim Kunspek Komisi X DPR RI meninjau Kampus Politeknik Negeri Batam

Batam merupakan daerah industri yang potensial. "Kampus ini harus diperhatikan, sisi anggaran harus disupport agar bisa bertumbuh dengan baik," ujarnya.

Dalam Pasal 41 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa perguruan tinggi menyediakan Sarpras untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa. Penyediaan Sarpras dalam rangka memenuhi fungsi dan peran perguruan tinggi sebagaimana amanat Pasal 58 UU Pendidikan Tinggi.

Banyak Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Tidak Memadai

Adapun di Kota Palangka Raya Tim Panja Sarana-Prasarana Komisi X DPR RI menemukan banyak sarpras pendidikan dasar dan menengah tak memadai. Kunspek ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih bersama 13 orang Anggota Dewan. Tim Kunspek meninjau Sekolah Dasar Negeri 1 Petuk Katimpun Kota Palangka Raya.

Ketua Tim, Abdul Fikri mengatakan, kunjungan timnya ke sekolah-sekolah untuk melihat langsung keadaan sekolah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. "Ini untuk memastikan, karena di

Indonesia dari ribuan bangunan sekolah masih banyak sarana dan prasarannya tidak memadai," paparnya.

Politisi PKS ini mengatakan, pihaknya ingin melihat langsung kondisi sekolah yang ada, terutama di SDN 1, tetapi setelah ditinjau langsung, ternyata ditemukan halamannya semua tergenang air. "Ini akan menjadi temuan dan catatan Panja Komisi X DPR RI," ungkap Fikri.

Sementara itu anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga putera daerah Kalteng Asdy Narang mengatakan, tujuan dari kunjungan ini merupakan inisiatifnya. "Kami dari Panja Sarpras ingin melihat langsung kondisi SDN 1 Petuk Katimpun Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ini cukup baik. Namun ada beberapa ruang kelas yang perlu mendapat perbaikan di mana halaman sekolahnya terendam banjir. Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi disini tetapi juga di daerah-daerah lainnya," jelasnya.

Tim Kunjungan Kerja Panja Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi X DPR RI juga berkesempatan meninjau sejumlah fasilitas sarana dan prasarana ke SMPN 11, SMAN 6 dan SMKN 5 serta berinteraksi langsung dengan guru guru dan siswa-siswi yang ada di empat sekolah tersebut.

Ketua Tim Panja Abdul Fikri mengatakan, kunjungan timnya ke sekolah-sekolah untuk melihat langsung keadaan sekolah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. "Ini untuk memastikan, karena di Indonesia dari ribuan bangunan sekolah masih banyak sarana dan prasarannya tidak memadai," paparnya. ■

(eko)



Foto : Eka/iw

Tim Kunspek Komisi X DPR RI meninjau SDN 1 Petuk Katimpun di Palangka Raya

DPR RI Dorong Pemerintah Terbitkan PP Prodi DLP

Undang-undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran mengamanatkan pembentukan Program Studi Dokter Layanan Primer (Prodi DLP). Namun, ketika Prodi DLP ini diwacanakan, muncul pro dan kontra di tengah masyarakat. Bahkan, masyarakat semakin dibuat bingung, karena belum adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk menjadi landasan hukum dalam mengimplementasikan UU yang telah disahkan pada tahun 2013 itu.

Melihat permasalahan yang terjadi, Komisi X DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Prodi DLP. Panja Prodi DLP pun telah memanggil sejumlah pihak, untuk menearing aspirasi mengenai Prodi DLP. Untuk mengetahui perkembangan dan pandangan mengenai Prodi DLP, Tim Parlemenaria telah mewawancarai Anggota Komisi X DPR RI sekaligus Anggota Panja Prodi DLP, Dadang Rusdiana (F-Hanura). Berikut petikan wawancara dengan Anggota Dewan asal daerah pemilihan Jawa Barat II ini di ruang kerjanya, baru-baru ini:

Bagaimana anda melihat dinamika terkait Prodi DLP?

Undang-undang No 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran telah disahkan pada tahun 2013, namun yang kami pertanyakan, kenapa kontranya muncul sekarang. Kenapa tidak dituntaskan ketika sedang melakukan penyusunan atau pembahasannya. Karena mulai dari penyusunan, pembahasan, sampai penetapan, pasti semua stakeholder terlibat. Namun mungkin ternyata, ada beberapa pihak yang merasa tidak diikutsertakan, sehingga muncul pro dan kontra.

Jadi, menurut pihak yang pro, program DLP adalah sebuah kebutuhan

mendasar, karena pendekatan kesehatan itu tidak cukup dengan pendekatan kuratif, tapi juga harus melalui pendekatan preventif. Dan pendekatan preventif itu dilakukan dengan manajemen kesehatan lingkungan, bagaimana kita mengatur lingkungan, sehingga masyarakat menyadari tentang makna kesehatan. Hal penting itu yang dianggap dokter mesti diberi pengetahuan yang memadai tentang persoalan kesehatan masyarakat, maka muncullah Prodi DLP.

Namun bagi pihak yang kontra, program DLP ini dinilai sangat tidak masuk akal, berlebihan, dan tidak menjawab realitas tantangan kesehatan

di Indonesia. Karena menurut mereka, dokter yang sekarang saja sudah cukup memadai, dengan masa studi mencapai tujuh tahun untuk menjadi seorang dokter, dari mulai mereka belajar di fakultas kedokteran, kemudian dilanjutkan dengan koas dan internship.

Jadi, pendidikan kedokteran selama tujuh tahun itu sudah memadai, dan ilmu-ilmu tentang kesehatan masyarakat sudah diberikan di dalamnya. Sehingga muncul pertanyaan, mata kuliah apa yang diberikan saat menjalani prodi DLP ini. Katanya, itu hanya pengulangan saja terhadap ilmu-ilmu kemasyarakatan yang pernah diberikan pada saat mahasiswa melakukan pembelajaran di tingkat sarjana kedokteran.

Lalu, apakah Prodi DLP wajib diselenggarakan?

Argumentasi yang disampaikan oleh Kemenristekdikti, bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan Indonesia, maka dokter primer itu adalah sesuatu yang mutlak dan harus diselenggarakan. Tapi kemudian muncul pihak kontra atas Prodi DLP itu, sehingga mereka pernah melakukan gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi, tetapi seluruh gugatan ditolak. Sehingga secara konstitutif UU No 20 tahun 2013 ini tidak ada persoalan, dan harus diimplementasikan. Tetapi kenyataannya, sampai sekarang peraturan pemerintah itu belum juga diterbitkan oleh Pemerintah. Artinya bahwa Pemerintah pun ragu-ragu dalam menyikapi kontroversi ini.

Sehingga, walaupun nanti pemerintah akan menerbitkan PP, tentu harus dilakukan dengan sangat hati-hati, mewedahi dan merespon semua aspirasi, baik yang pro maupun yang kontra terhadap DLP. Pemerintah harus menginventarisir apa saja yang menjadi keberatan pihak kontra, dan apa yang menjadi dasar-dasar sehingga mereka menolak prodi dari DLP. Termasuk persoalan-persoalan yang lebih besar ketika Prodi DLP ini dijalankan.

Seperti mengenai kesiapan sarana prasarana layanan primer yaitu puskesmas. Sebenarnya, ketika pemerintah menyelenggarakan Prodi DLP ini harus juga menstimultan penataan sarana prasarana puskesmas, pembiayaan di puskesmas, dan juga

**Panja Prodi DLP
Komisi juga sangat
hati-hati sekali
mengambil
kesimpulan dan
membuat rekomendasi**

kesadaran masyarakat. Jadi kalau ada yang menyatakan tingkat rujukan masih tinggi disebabkan oleh kompetensi dokter di tingkat layanan primer yang belum memadai, itu juga belum sepenuhnya benar. Karena bisa jadi masyarakat lebih senang untuk ke rumah sakit daripada ke puskesmas.

Menurut Anda, bagaimana Prodi DLP ke depannya?

Saya kira harus dikaji lagi, dan harus dilakukan segera kebijakan moratorium. Karena banyak sekali fakultas-fakultas kedokteran yang saya kira belum memenuhi standar nasional pendidikan, bahkan masih banyak fakultas kedokteran yang masih berakreditasi C, itu menjadi persoalan tersendiri, ini harus segera diselesaikan pemerintah. Artinya bukan sekedar penyelenggaraan Prodi DLP, tapi lebih bagaimana pemerintah menata FK yang ada. Jadi jangan sampai kita menjalankan program DLP, tapi output dari pendidikan FK yang ada sekarang saja itu tidak pernah kita kendalikan dengan baik.

Panja Prodi DLP Komisi juga sangat hati-hati sekali mengambil kesimpulan dan membuat rekomendasi. Panja pun ketika akan memutuskan masalah DLP ini, juga akan melihat tingkat mendesaknya

kebutuhan masyarakat. Karena DLP ini akan melayani masyarakat. Jadi tentu kita juga akan melihat secara langsung sebetulnya apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat saat ini. Apakah misalkan dokter spesialis atau dokter layanan primer. Kita harus melihat dulu ketersediaan sumber daya yang ada sekarang.

RPP belum ada, namun ada FK salah perguruan tinggi yang sudah menjalankan. Menurut anda?

Kalau dilihat dari UU Dikdok, pembentukan prodi itu harus berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi kalau ada perguruan tinggi yang ngotot mendirikan prodi DLP sebelum PP keluar, itu dianggap pelanggaran hukum. Hal-hal seperti ini harus kita jaga, jadi jangan sampai penyelenggaraan sebuah prodi ini, justru bermasalah secara hukum.

Panja mendorong Pemerintah terbitkan PP Prodi DLP?

Pemerintah menjanjikan PP akan diterbitkan awal April 2017. Tapi kami tekankan harus hati-hati dalam penyusunannya. Nanti kita lihat bagaimana RPP itu. Kami harapkan RPP itu juga mempertimbangkan rekomendasi dari Panja Prodi DLP. ■



Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana

DPR RI dan Masyarakat Harus Bersatu Kontrol Kerja Pemerintah

Himpitan ekonomi dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas di dalam negeri mendorong sebagian masyarakat mengadu nasib di luar negeri untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Peran pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak TKI yang tidak baik menyisakan sejumlah persoalan.

Adapun beberapa persoalan yang menjadi perhatian DPR RI adalah TKI yang diberangkatkan dengan menggunakan visa ziarah yang kemudian dipekerjakan secara rental di negara penempatan.

Hal ini bermula setelah keluar Surat Keputusan (SK) Menaker No.260 Tahun 2015 yang berisi tentang pelarang mengirim TKI ke 21 negara di kawasan timur tengah. Yaitu Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, UEA, Yaman, dan Jordania.

"Peraturan ini perlu diperbaiki, lantaran banyak TKI yang akhirnya berangkat secara ilegal. Dan hal itu menyebabkan 45 orang TKI di Arab Saudi terindikasi menjadi korban perdagangan manusia," kata Anggota

Tim Pengawas TKI Rieke Diah Pitaloka di Gedung Nusantara II, DPR, senayan, Jakarta baru-baru ini.

Berdasarkan informasi terbaru, puluhan buruh migran Indonesia tersebut saat ini berada di penampungan perusahaan Team Time Co (TTCo) yang berpusat di Jeddah. Maka dari itu DPR RI mengajak semua unsur melakukan gotong royong untuk menyelesaikan masalah dan memberikan perlindungan kepada TKI dengan mengontrol kerja Pemerintah.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan perlu menertibkan PJTKI yang mengambil biaya lebih dari aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Politisi partai PDI Perjuangan itu juga mendesak pemerintah untuk mampu mengadvokasi persoalan rakyat. Mulai dari perbaikan regulasi perlindungan TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT), serta perlindungan untuk buruh migran di sekitar kelautan seperti anak buah kapal (ABK). Pasalnya ABK juga sering mengalami diskriminasi, penyiksaan bahkan perdagangan manusia.

"Beberapa regulasi yang harus diperbaiki, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, harus segera diselesaikan saat ini kan masih nyangkut pembahasannya di Pemerintah," tegas Rieke.

TERTIBKAN PJTKI

Anggota Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR RI sekaligus Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani meminta pemerintah untuk menertibkan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Terutama kepada PJTKI yang melakukan overcharging atau biaya penempatan berlebih terhadap calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke luar negeri.

"Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan perlu menertibkan PJTKI yang mengambil biaya lebih dari aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Nah, kalau selama ini pemerintah tidak melakukan penertiban, artinya ada oknum yang 'bermain' juga di sini," tegas Irma



Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka

Foto : Rizka/iw



Foto : Rizka/iw

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani

Irma juga mengatakan beberapa regulasi justru disalahgunakan menjadi sarana pungutan liar, seperti pemungutan premi asuransi. Dijelaskannya, setiap TKI dikenakan biaya Rp 400 ribu dengan rincian, Rp 50 ribu saat perekrutan, Rp 300 ribu saat bekerja di luar

negeri dan Rp 50 ribu setelah purna penempatan. Termasuk, TKI yang melakukan perpanjangan kontrak di luar negeri wajib membayar 50 persen premi asuransi.

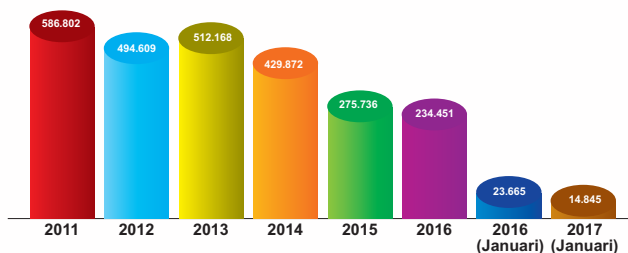
Menurut Irma, perolehan biaya asuransi TKI cukup besar namun TKI tidak mendapatkan manfaat apapun dari asuransi tersebut. "Perlu kita garisbawahi, uang yang cukup besar ini, larinya kemana," kata Irma seolah bertanya.

Tidak hanya itu, sambungnya, dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pribadi yang digunakan untuk membiayai keberangkatan TKI, sering dijadikan ladang pungli. "Harusnya pemerintah hadir disini, mampu mengambil alih agar TKI tidak terbebani dengan hal-hal yang kemudian menjadi ladang pungli," kritisi politisi asal dapil Sumatera Selatan itu.

Sementara perwakilan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengatakan bahwa banyak kasus overcharging terhadap tenaga kerja yang dilakukan PJTKI. Berdasarkan audit BPK pada tahun 2015 sebanyak Rp 1,6 triliun beban biaya yang berlebih.

Sementara, merujuk pada Kepmenaker beban biaya TKI hanya boleh maksimal adalah Rp 14 juta, namun faktanya mencapai Rp 24-36 juta dengan rincian biaya pendidikan, asuransi, dokumen, serta akomodasi perjalanan. Pada oktober 2016 lalu, pihaknya mengumpulkan 26 PJTKI di Hongkong, dan mengakui bahwa telah memungut biaya beban yang lebih. ■

(as)



PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI INDONESIA BERDASARKAN PROVINSI PERIODE 2017 (JANUARI)

NO	DAERAH	2016 JANUARI	2017 JANUARI
1	JAWA BARAT	5.308	3.403
2	JAWA TENGAH	5.225	3.424
3	JAWA TIMUR	4.432	2.379
4	NUSA TENGGARA BARAT	3.912	2.206
5	LAMPUNG	1.692	1.104
6	SUMATERA UTARA	1.123	915
7	BANTEN	325	161
8	BALI	197	215
9	DI YOGYAKARTA	216	121
10	KALIMANTAN BARAT	236	101
11	NUSA TENGGARA TIMUR	200	115
12	SUMATERA SELATAN	106	135
13	KALIMANTAN TIMUR	11	207
14	SULAWESI SELATAN	134	51
15	SUMATERA BARAT	95	37
16	DKI JAKARTA	78	45
17	JAMBI	78	22
18	KEPULAUAN RIAU	35	65
19	ACEH	68	31
20	RIAU	36	39
21	KALIMANTAN SELATAN	66	3
22	SULAWESI TENGAH	29	24
23	BENGKULU	37	14
24	SULAWESI UTARA	10	11
25	SULAWESI BARAT	3	7
26	SULAWESI TENGGARA	3	4
27	MALUKU	1	3
28	GORONTALO	3	0
29	KALIMANTAN TENGAH	2	1
30	BANGKA BELITUNG	1	1
31	PAPUA	1	1
32	MALUKU UTARA	1	0
33	PAPUA BARAT	1	0
TOTAL		23.665	14.845

PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

Tahun 2011 s.d 2017 (Januari)

NO	TAHUN	JUMLAH	TKI FORMAL	%	TKI INFORMAL	%
1	2011	586.802	266.191	45	320.611	55
2	2012	494.609	258.411	52	236.198	48
3	2013	512.168	285.297	56	226.871	44
4	2014	429.872	247.610	58	182.262	42
5	2015	275.736	152.394	55	123.342	45
6	2016	234.451	125.176	53	109.275	47
	2016 (Januari)	23.665	13.994	59	9.671	41
7	2017 (Januari)	14.845	7.779	52	7.066	48

Sumber data : PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI (PUSLITFO BNP2TKI)

25 NEGARA TERBESAR

PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI INDONESIA PERIODE 2017 (JANUARI)

NO	NEGARA	2016 Januari
1	MALAYSIA	8.411
2	TAIWAN	6.925
3	KOREA SELATAN	2.284
4	SAUDI ARABIA	1.669
5	HONGKONG	1.344
6	SINGAPORE	1.324
7	BRUNEI DARUSSALAM	843
8	UNITED ARAB EMIRATES	481
9	OMAN	73
10	QATAR	64
11	ITALY	46
12	BRAZIL	37
13	TURKEY	21
14	KUWAIT	19
15	MALDIVES	17
16	UNITED STATES	17
17	ZAMBIA	16
18	LIBERIA	10
19	SRI LANKA	8
20	INDIA	7
21	BAHRAIN	5
22	JAPAN	4
23	JORDAN	4
24	RUSSIA	4
25	CONGO	3
26	LAINNYA	29
TOTAL		23.665

NO	NEGARA	2017 Januari
1	MALAYSIA	5.688
2	TAIWAN	4.915
3	HONGKONG	1.347
4	SINGAPORE	1.077
5	SAUDI ARABIA	518
6	BRUNEI DARUSSALAM	457
7	KOREA SELATAN	274
8	UNITED ARAB EMIRATES	141
9	OMAN	82
10	QATAR	68
11	KUWAIT	55
12	BRAZIL	35
13	ITALY	29
14	UNITED STATES	21
15	JAPAN	20
16	SOUTH AFRICA	17
17	TURKEY	17
18	SOLOMON ISLANDS	13
19	CUBA	9
20	MYANMAR	8
21	SPAIN	6
22	ZAMBIA	6
23	JORDAN	5
24	MOROCCO	5
25	BAHRAIN	4
26	LAINNYA	28
TOTAL		14.845

DPR RI Dorong Pembentukan Kaukus Palestina di seluruh Negara PUIC



Foto : Dok BKSAP/iw

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi Munawar, Lc, menghadiri *The 7th Meeting Of The Standing Committee On Palestine* di Bamako Mali

Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berpartisipasi dalam Konferensi PUIC (Parliamentary Union of the OIC Member States/Parlemen Negara-negara OKI) ke 12 dari tanggal 21 - 28 Januari di Bamako, Mali.

Ketua Delegasi DPR RI yang juga Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Rofi' Munawar dalam konferensi tersebut menyerukan agar parlemen-parlemen negara muslim segera membentuk sebuah kaukus atau komisi khusus soal isu Palestina.

"Saya memandang pembentukan kaukus atau sejenisnya akan sangat

bermanfaat untuk mensosialisasikan isu Palestina ke masyarakat luas. Parlemen Indonesia sudah lama memiliki Kaukus Palestina. Kendati dasar dan kecenderungan politik di parlemen kami beragam, namun bagi kami masalah Palestina merupakan keprihatinan bersama, dan itu sudah menjadi sikap negara", kata Rofi' di Bamako, Mali, (23/01).

Dalam sesi sidang Komisi Palestina

ke-7, delegasi Indonesia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menekankan urgensi realisasi persatuan semua elemen dan faksi-faksi pejuang Palestina. "Kami meyakini bahwa persatuan merupakan senjata paling ampuh untuk menghadapi agresi Zionist Israel," tegas politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Mengambil inisiatif sebagai delegasi pertama yang memberikan pandangan

terkait isu Palestina, Rofi' juga menyambut baik atas disahkannya Resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2334 yang mendesak Israel segera menghentikan semua aktifitas pembangunan ilegal permukimanya di atas tanah Palestina.

Terkait resolusi tersebut, Rofi' mengingatkan ihwal implementasinya. "Kita semua harus mendesak untuk segera di laksanakan resolusi itu tersebut. Kami juga melihat lolosnya resolusi itu membuktikan semakin kuatnya kesadaran masyarakat



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi Munawar, Lc

Delegasi Indonesia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menekankan urgensi realisasi persatuan semua elemen dan faksi-faksi pejuang Palestina.



Foto : Dok BKSAP/iw

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi Munawar, Lc, menyampaikan *point of intervention* pada *7th meeting of the Standing Committee on Palestine*



Foto : Dok BKSAP/iw

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi Munawar, Lc, didampingi Saifullah Tamliha dan Syofwatillah Mohzaib menghadiri *5th meeting of the Standing Specialized Committee on Political and Foreign Relation* di Bamako, Mali



Foto : Dok BKSAP/iw

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi Munawar, Lc, bersama Hon. Mr. Haidara, *Vice President of National Assembly of Mali*



Foto : Dok BKSAP/iw

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Fahri Hamzah menyampaikan sambutan pada *General Assembly sidang the 12nd session of PUIC* di Bamako, Mali



Foto : Dok BKSAP/iw

Wakil ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah dalam kunjungan kerja menghadiri sidang *the 12nd session of PUIC and related meetings* di Bamako, Mali

internasional atas berbagai pelanggaran Israel," papar Rofi'.

Pada bagian lain, Anggota DPR RI dari dapil Jawa Timur VII tersebut menyambut baik keinginan Palestina untuk menjadikan tahun 2017 sebagai tahun kemerdekaan dan kedaulatan Palestina secara penuh.

"Indonesia menyerukan parlemen negara-negara muslim untuk mendukung keinginan Palestina menjadikan tahun 2017 sebagai tahun kemerdekaan penuh Palestina dengan cara membantu mendapatkan pengakuan lebih banyak lagi dari

negara-negara di dunia," tegas politisi asal Lamongan itu.

Delegasi Indonesia yang fasih berbahasa Arab tersebut mengingatkan juga ihwal bahaya dari rencana Donald Trump memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Al-Quds (Yerusalem). "Jelas rencana itu sangat berbahaya bagi perdamaian. Parlemen akan mendorong elemen-elemen pemerintahan dan lembaga-lembaga politik dan kemanusiaan internasional lainnya untuk mendesak Amerika Serikat agar membatalkan rencana provokatif tersebut," pungkas Rofi'. ■ (t.t)

Sirmadji Tinjau Penggunaan Dana Desa

Anggota Komisi II DPR RI Sirmadji dalam kunjungan kerja dapil meninjau penggunaan dana desa yang digunakan untuk perbaikan jalan di Desa Ngetal, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur pada Sabtu, (06/03). Dalam kunjungan kali ini, ia menemukan kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal penggunaan dana desa. Ia menjelaskan bahwa dana desa mampu membuat pembangunan desa menjadi lebih terprogram.

"Dari hasil pertemuan dengan kepala desa, LPM, dan kepala dusun, juga dihadiri oleh unsur Kapolsek dan Koramil di Desa Ngetal, Trenggalek. Mereka semua punya pandangan sama bahwa dana sosial itu memang sangat tepat, mereka apresiasi tinggi karena adanya dana desa itu mereka dapat membangun desanya secara lebih terprogram," jelas Sirmadji.



Foto: Dok/ww

Anggota Komisi II DPR RI Sirmadji meninjau rencana perbaikan jalan yg didanai oleh dana Desa tahun 2017 di Desa Ngetal, Jatim

Politisi PDIP ini juga memaparkan bahwa meskipun sudah ada dana desa, masyarakat Trenggalek tidak meninggalkan budaya gotong royong dalam membangun desa. Beberapa pembangunan yang bersumber dari dana desa pun sudah dirasakan bagi masyarakat setempat.

"Memang walaupun sudah ada dana desa, ternyata masyarakat juga tetap saja tidak meninggalkan budaya gotong

royong di dalam membangun desanya. Maka dalam beberapa hal yang sudah dilakukan di tahun 2016 dan 2015 dalam pembangunan jalan misalnya itu telah diperjelas jalan desanya," tutur Sirmadji.

Dana desa pun dapat dimanfaatkan secara baik, oleh karenanya masyarakat Trenggalek pun berharap bahwa dana desa ini untuk dapat ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan negara. "Yang kami lihat pembangunan jalan desa tahun 2016 yang semula hanya 1 meter menjadi 4 meter. Dengan demikian mereka berharap agar dana desa terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan negara," sambungnya.

Dalam kunjungan kerja dapil ini, Sirmadji pun akan meneruskan aspirasi ini dalam rapat kerja Komisi II dengan mitra kerja terkait. Sehingga diharapkan penggunaan dana desa ini dapat terus dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun Indonesia secara lebih merata. ■

(hs)

Menggugah Pemuda Menjadi *Entrepreneur*

Pemberdayaan kaum muda menjadi kebutuhan tersendiri untuk menyongsong persaingan global yang kian ketat. Kini, banyak wirausahawan muda bermunculan. Pemberdayaan para pemuda merupakan langkah antisipatif menghadapi bonus demografi. Inilah yang dilakukan oleh Anggota DPR RI Aditya Anugerah Moha saat berada di dapilnya, Sulawesi Utara.

Anggota Komisi XI DPR RI ini, giat memberikan mentorium sekaligus menumbuhkan semangat kaum muda untuk berusaha. Ketika kaum muda sudah mampu hidup mandiri, dampaknya ikut menularkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Acara bertajuk "Mari Jo Torang GenBI Sulut Jadi *Entrepreneur*" ini, mengundang para pemuda se-

Sulut untuk menjadi wirausahawan muda sekaligus pemula.

Acara yang bekerja sama dengan BI tersebut, mejadi ajang pilihan profesi bagi para pemuda Sulut. Dengan m e n j a d i wirausahawan muda berarti pula membuka lapangan kerja baru. "Kita harus mempunyai komitmen mensejahterakan rakyat, salah satunya dengan kemandirian ekonomi. Dengan kemandirian ekonomi yang digagas ini, roda perekonomian rakyat dapat bergerak sampai tingkat kota dan desa," ucap politisi Partai Golkar itu.

Dia menambahkan, "Ekonomi kuat, maka rakyat sejahtera. Mari kita berkarya demi kemakmuran dan



Foto: Dok/ww

Anggota Komisi XI DPR RI Aditya Anugerah Moha mengisi acara entrepreneur

kesejahteraan kita semua." Selain menggugah para pemuda untuk menjadi wirausahawan, Adit juga mensosialisasikan beredarnya uang baru yang dirilis BI. Sosialisasi dilakukan bersama Deputy Gubernur BI Sulawesi Utara dengan menghadirkan peserta dari seluruh Kepala Cabang Perbankan di Bolaang Mongondow Raya. ■

(tm)

Berhasil Perjuangkan Rp 38 Miliar Beasiswa Untuk Jambi



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menyerahkan dana PIP kepada siswa di Kab. Kerinci, Prov. Jambi

Kunjungan Kerja ke daerah pemilihan, selalu dimanfaatkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra untuk menyalurkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP). Selama tahun 2016, ia telah berhasil memperjuangkan kurang lebih Rp 38 miliar beasiswa PIP untuk 40 ribu siswa pada tingkat SD, SMP, SMU dan SMK di seluruh Provinsi Jambi.

"Jika dana Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta yang didapatkan dari PIP digunakan untuk membeli buku dan menunjang pembelajaran, Insya Allah beban orangtua akan sedikit terbantu," harap politisi F-Gerindra itu.

Politisi yang akrab dipanggil SAH itu menilai, penyaluran beasiswa PIP secara umum telah lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun kasus keterlambatan pencairan di bank penyalur juga masih sering terjadi, terutama kesiapan bank tingkat unit di kecamatan atau desa.

"Selain itu akses informasi terhadap data pelajar yang menerima PIP juga belum begitu baik, sehingga perlu disosialisasikan secara lebih intensif dan sistematis," nilai Sutan.

Untuk itu, ia menyarankan kedepannya agar diambil langkah simultan dimulai dari proses sosialisasi, pendataan dan pengumuman jadwal pencairan PIP. Termasuk daftar penerima PIP. Sehingga untuk memperbaiki ini perlu melibatkan sistem di banyak instansi, termasuk pemerintah daerah dan sekolah.

Beasiswa ini pun mendapat sambutan hangat dari masyarakat Jambi, yang merupakan daerah pemilihannya. Bahkan, beasiswa ini dinilai bukan hanya membantu pendidikan tapi juga memiliki dampak pada sektor lain, yakni memberi kontribusi pada ekonomi Jambi untuk lebih menggeliat.

Beasiswa PIP disebar ke beberapa daerah, diantaranya untuk Kabupaten Kerinci sebanyak 4000 siswa, Kota Jambi sebesar 6000 siswa, Kabupaten Merangin 7000 siswa, Kabupaten Muaro Jambi 3000 siswa, dan Kabupaten lainnya, yang totalnya mencapai 40 ribu siswa. ■

Masyarakat Sulsel Harus Berinovasi dan Manfaatkan Berbagai peluang

Masyarakat harus dapat menciptakan inovasi dan memanfaatkan peluang usaha yang ada, agar roda perekonomian masyarakat terus berputar. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Indira Cundha Thita Syahrul saat menemui konstituennya di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar dan masyarakat Kelurahan Kapasa, Kecamatan Biringkanaya.

"Manfaatkanlah peluang usaha yang ada, kita harus menjadi masyarakat yang inovatif, agar roda perekonomian bisa berjalan lebih baik lagi kedepan," ucap wanita yang akrab di sapa Thita itu

Kesempatan dialog dengan masyarakat Kota Makassar itu, sekaligus dimanfaatkannya untuk menyerap berbagai aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh warga konstituennya.

Dalam kunjungannya tersebut, Thita menyerahkan bantuan berupa kursi, meja, pakan udang, dan jaring ikan kepada masyarakat setempat yang berprofesi sebagai pembudidaya ikan. Politisi F-PAN dapil Sulawesi Selatan I itu berpesan agar masyarakat dapat selalu mengembangkan budidaya perikanan di wilayahnya.

"Mari kita sama-sama kembangkan budidaya perikanan, karena budidaya perikanan merupakan salah satu sektor penunjang perekonomian masyarakat," ujar Thita beberapa waktu lalu.

Thita berharap, dengan adanya pengembangan pembudidayaan perikanan serta usaha rumahan, maka pada waktu kedepan dapat ikut mendorong perputaran ekonomi di Sulsel, khususnya di kota Makassar. ■



Anggota Komisi IV DPR RI Indira Cundha Thita Syahrul menyerahkan bantuan kepada nelayan di Makassar

Kunjungi Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat Jawa Timur

Masa reses merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh Anggota DPR, tak terkecuali Dossy Iskandar. Betapa tidak, saat reses itu, ia bisa dengan leluasa bertemu langsung dengan masyarakat di daerah pemilihannya, khususnya konstituennya.

Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum ini mengawali masa resesnya dengan mengunjungi Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur.

Di sini Dossy melakukan pengawasan untuk melihat sejauh mana pelayanan dan pelaksanaan ujian teori dan praktek dalam memperoleh SIM (surat ijin mengemudi). Hal ini tentunya sekaligus untuk mengetahui ada tidaknya pungli atau pungutan liar dari kegiatan tersebut.

Dalam masa resesnya itu politisi dari fraksi Partai Hanura ini pun mengunjungi rumah tahanan



Anggota Komisi III DPR RI Dossy Iskandar berdialog dengan pegawai rutan di rumah tahanan Surabaya

langsung berdialog dengan petugas Rutan terkait pembinaan, jaminan kesehatan dan sistem pengawasan yang diterapkan selama tersangka atau terdakwa berada di rumah tahanan negara tersebut. Dossy juga menyempatkan diri untuk mengunjungi SMAN I Bangsa, di Mojokerto. Di sini Dossy menemui siswa-siswi yang terlihat sangat antusias bicara tentang kebangsaan dan ideologi bangsa yakni Pancasila dan UUD 1945.

Meski duduk di Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum, namun tidak tertutup kemungkinan ia mendapat masukan atau aspirasi dari masyarakat Dapilnya dalam bidang lainnya. Sebut saja ketika ia mengunjungi sebuah desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di sana ia berbincang dan berdialog langsung dengan para petani, pekerja dan perangkat desa. Di sini ia mendapat masukan terkait infrastruktur dan berbagai fasilitas pendukung yang dapat digunakan para petani dan masyarakat untuk meningkatkan produksi padi atau pendapatan para petani. Pada kesempatan itu Dossy berjanji akan menampung dan menyalurkan aspirasi tersebut ke fraksinya serta ke komisi yang menaungi bidang pertanian. ■

Foto: Dok/lu

(ayu)

Pembukaan Rute Jakarta - Tasikmalaya Disambut Positif

Beberapa waktu lalu, Anggota Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghadiri uji coba pendaratan perdana Pesawat Wings Air jenis ATR 72 500/600 di Pangkalan Lanud Wiradinata, Tasikmalaya. Uji coba tersebut merupakan bagian dari rencana pemerintah pusat untuk membuka penerbangan komersil di bandara milik TNI AU itu.

Menurut Nurhayati, pendaratan berjalan dengan mulus dan selanjutnya pesawat komersil ini akan menjalani rute



Anggota Komisi V DPR RI Nurhayati bersama Menhub, saat uji coba pendaratan perdana pesawat Wings Air jenis ATR 72 500/600

Foto: Dok/lu

penerbangan Tasikmalaya - Halim Perdana Kusuma, Jakarta. "Alhamdulillah, izin prinsip dari Kementerian Perhubungan sudah keluar, tinggal mengatur teknis pelaksanaan operasionalnya," ungkap politisi dari F-PPP itu.

Ia berharap dengan dibukanya penerbangan sipil tersebut, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Priangan Timur dengan titik sentralnya yang berada di Kota

Tasikmalaya. Penerbangan komersil dapat memfasilitasi arus barang produk-produk khas Tasikmalaya ke pasar nasional dan bahan ekspor. "Tinggal bagaimana pemda setempat bisa membantu pembenahan produksi, khususnya UMKM supaya produksinya bisa bersaing di era perdagangan bebas ini," tandas Nurhayati.

Walikota Tasikmalaya Budi Budiman menyambut baik kedatangan pesawat Wings Air. Jika waktu tempuh

Tasikmalaya - Jakarta melalui jalan darat saat ini sekitar 6 jam dalam kondisi normal, maka dengan pesawat terbang cukup ditempuh dengan 45 menit. "Ini resolusi kita untuk membangkitkan ekonomi di Kota Tasik dan Priangan Timur," ujarnya.

Menurut rencana, pesawat terbang Wings Air dari Lion Group akan terbang melayani rute Jakarta - Tasikmalaya dan sebaliknya dengan tarif tiket pesawat berkisar Rp500.000. ■ (enn)

Legislator Komit Sosialisasikan Program KB Pertahankan Laju Pertumbuhan Penduduk

Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat komit mensosialisasikan program Keluarga Berencana (KB) yang digagas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sebab Adang menyadari betul bahwa jika laju pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan akan berimplikasi langsung terhadap berbagai sektor pembangunan. Maka dari itu, saat reses Adang mengunjungi daerah pemilihannya di Jawa Barat II khususnya di Majalaya, Kabupaten Bandung untuk memberikan pengetahuan mengenai

program KB kepada konstituennya secara langsung dan insentif. Karena untuk mensukseskan program KB itu perlu keterlibatan masyarakat. "Permasalahan kependudukan merupakan permasalahan yang kompleks dan berimplikasi langsung terhadap berbagai sektor pembangunan lainnya. Untuk itu kami (DPR RI) dan pemerintah bersinergi memberikan solusi yang aplikatif dan langsung kepada masyarakat," kata Adang.

Tujuan utama Politisi fraksi PKS itu mensosialisasikan program KB yaitu agar dapat mempertahankan laju

pertumbuhan penduduk sebesar 1,17 persen tiap tahunnya, dan untuk mempertahankan laju pertumbuhan itu menurutnya harus diawali dengan pembenahan menyeluruh di bidang infrastruktur dan kelembagaan Keluarga Berencana nasional yang kokoh. "Pemerintah dengan dukungan DPR RI akan mengupayakan sekuat tenaga mempertahankan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,17% tiap tahunnya. Ini sudah menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan BKKBN sejak tahun 2015," pungkasnya. ■ (enn)



Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat bersama konstituen

Foto: Dok/Iw

Ke Dapil Menyelam Sambil Minum Air

Dalam kesempatan kunjungan masa reses, Anggota DPR RI selalu memanfaatkan momen ini untuk melakukan konsolidasi sebagai upaya penguatan konstituen. Menyelam sambil minum air, ungkapan itu sesuai dengan strategi yang dilakukan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana. Menemui konstituen sembari melakukan pengawasan realisasi program kerja pemerintah di daerah.

"Jadi kita ke penguatan konstituen. Baik konstituen baru atau lama yang harus dirawat. Kita datang membawa program yang sudah dialokasikan dari kementerian. Jadi kita lihat apakah sudah dilaksanakan atau sudah berhasil guna, atau tidak menyimpang dari yang sudah ditentukan, dan kita bicara dengan dinas juga," papar Azam kepada Parlemenaria di sela-sela persidangan Komisi VI DPR RI, di Gedung Nusantara

I DPR RI.

Dia menekankan, anggaran pemerintah untuk penguatan potensi daerah harus dijenjot. Karena kesejahteraan masyarakat daerah seringkali terabaikan dari perhatian

pemerintah pusat. "Oleh karena itu kita kawal, supaya anggaran-anggaran pemerintah yang memang untuk penguatan wilayah itu betul-betul sampai di daerah," ujar Azam.

Anggota Dewan dari dapil Jawa Timur III ini menjelaskan, bawah di tempatnya yang menjadi sektor ekonomi potensial adalah pertanian dan nelayan. "Harapan masyarakat untuk meningkatkan nelayan. Bagaimana meningkatkan pertanian, walaupun



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana bersama masyarakat nelayan di Jawa Timur

Foto: Dok/ww

bukan domain saya tapi akan saya perhatikan itu, dan kita akan carikan jalan keluarnya," ungkap Azam.

"Untuk penyimpanan ikan, itu kan kita dapat dari perdagangan. Ada bok, kemudian mikro kecil menengan kita ada bantuan tenda, kemudian ada bantuan gerobak. Jadi kita terkait dengan kepentingan rakyat kecil. Perbaiki warung, perbaiki jalannya, perbaiki-perbaiki mushola itu tidak pernah dapat dari pemerintah. Dan kemampuan masyarakat juga terbatas," imbuh Azam. ■

(eko)

Bisri Romly Dari Rakyat Untuk Kesejahteraan Rakyat

Bisri Romly terpilih sebagai Anggota DPR RI setelah meraih suara di tempat kelahirannya daerah pemilihan Jawa Tengah X yang meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kota Pekalongan. Ingin mewujudkan

Kesejahteraan tani dengan mengusahakan harga gabah yang menguntungkan dan harga pupuk yang bisa terjangkau, serta mengusahakan *home industry* kecil dan menengah sebagai sumber perekonomian masyarakat agar tetap berjalan baik dan semakin maju dengan mengusahakan pasokan bahan baku yang terjangkau.

Dalam Kesibukannya sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI turun bersama BNPB memberikan bantuan ke desa-desa di wilayah pesisir pantai Kabupaten Pekalongan. Bantuan ini untuk menangani sementara rob yang melanda kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan.

Lebih lanjut, Bisri menginginkan stimulus

pertanian di Dapilnya terutama Lebakbarang, Paninggaran, Kandangserang, Petungkriyono agar perekonomian makro di daerah tersebut dapat lebih meningkat dan merata.

Sebagai langkah untuk mendukung kegiatan ekonomi di Desa Wonoyoso, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan perbaikan jaringan listrik di desa tersebut. Kegunaan listrik bagi Desa Wonoyoso, Buaran dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, yaitu menjahit. Peralannya, warga di sini yang berprofesi sebagai buruh jahit lumayan banyak, sehingga listrik menjadi sesuatu yang penting.

Usulan perbaikan atau penambahan tiang listrik ini memang langsung disampaikan ke PLN. Masyarakat juga tidak dibebani biaya. "Saya hanya mengusulkan ke PLN dan Alhamdulillah direalisasi. Semoga ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat," katanya. ■

(eko)



Anggota Komisi VIII DPR RI Bisri Romly meninjau desa di Pesisir Pekalongan

Foto: Dok/ww

Reformasi Kelembagaan Menuju Parlemen Modern

Nama baru Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI telah diresmikan Ketua DPR RI Setya Novanto pada akhir Januari 2017 lalu. Novanto memastikan, hal ini sejalan dengan upaya DPR RI secara keseluruhan akan menjalankan program reformasi kelembagaan menuju parlemen yang modern.

Penataan kawasan agar kawasan parlemen benar menjadi simbol sejarah peradaban bangsa Indonesia.



Pimpinan DPR RI didampingi pejabat Setjen dan BKD

Foto : Azka/w

“ Sehingga, apa yang dimaksudkan dengan parlemen modern benar-benar bisa tercipta. Karena itu saya berharap agar semua jajaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan siap melakukan perubahan menuju DPR yang modern,” kata Novanto, dalam sambutan peresmian nama gedung baru, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Hadir juga dalam acara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Agus Hermanto, dan Fahri Hamzah, serta Ketua BURT Agung Budi Santoso. Dari jajaran Sekjen DPR, hadir Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen DPR Achmad Djuned dan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR Jhonson Rajagukguk.

Novanto mengatakan, Kesekjenan dan BKD memiliki posisi yang sama. Meskipun saat ini masih menempati gedung, namun dengan nama yang baru. Perubahan nama gedung ini merupakan momen penting dalam perkembangan kelembagaan sistem pendukung DPR. Peresmian ini sekaligus menandakan pengakuan terhadap keberadaan Badan Keahlian DPR yang baru dibentuk.

"Saya harap BKD dapat meningkatkan kinerja serta mutu pelayanan keahlian untuk mendukung tugas-tugas dewan, yakni legislasi, anggaran, serta pengawasan," imbuh politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Novanto menambahkan, walaupun tugas bidang teknis administrasi dapat dibedakan dengan tugas dukungan substansi, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan. Sehingga perlu dilakukan secara bersama-sama dan saling mendukung di antara unit kerja yang terkait.

"Karena pada akhirnya bagaimana membangun DPR sebagai lembaga negara yang dipercaya oleh rakyat. Serta dapat menjalankan fungsi dengan baik," harap Novanto.

Politisi asal daerah pemilihan Nusa



Pimpinan DPR RI didampingi pejabat Setjen dan BKD

Foto : Azka/iw

“ Perubahan nama gedung ini merupakan momen penting dalam perkembangan kelembagaan sistem pendukung DPR RI. Peresmian ini sekaligus menandakan pengakuan terhadap keberadaan Badan Keahlian DPR RI yang baru dibentuk. ”



Foto : Andri/iw

Ketua DPR RI Setya Novanto

Tenggara itu pun menilai, selama ini Plt. Sekjen dan Ketua BKD kompak dalam menjalankan tugasnya. Sehingga ia berharap kedepan, keduanya bisa melakukan koordinasi semakin baik.

Sinergi yang Kokoh

Dalam kesempatan yang sama, Plt Sekjen DPR Achmad Djuned menyampaikan, demi mendukung agenda dan fungsi Anggota Dewan, dibutuhkan Sekretariat Jenderal DPR yang kokoh dan BKD yang kuat.

"Kita perlu Setjen yang kokoh, kita juga perlu BKD yang kuat. Sinergitas itu nantinya akan menjadi penopang kegiatan DPR RI. Karena pada esensinya kegiatan kita sama, yaitu bagaimana caranya agar kita bisa mendukung DPR RI secara optimal dan efektif," papar Djuned.

Dia juga menyampaikan, Setjen

DPR dan BKD akan senantiasa menjaga semangat kebersamaan dan sinergitas, sebagai aparatur pendukung Anggota DPR. Menurutnya, jangan ada ego sektoral, yang justru malah menghambat support kepada dewan.

"Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian akan menjadi sinergitas yang kokoh dalam rangka mendukung kinerja DPR RI," ungkap Djuned.

Mengakhiri sambutan, dia mengajak seluruh jajaran pegawai Setjen DPR untuk bersama-sama secara cepat mewujudkan berbagai program dalam rangka merealisasikan agenda perubahan kelembagaan DPR, Setjen maupun BKD.

Sementara itu dalam kesempatan berbeda, Kepala BKD Jhonson Rajagukguk menjelaskan, tugas BKD adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dibidang keahlian.

Untuk itu, lanjut Jhonson, Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam memperkuat BKD, posisinya harus diisi oleh para ahli diberbagai bidang, seperti hukum, anggaran, dan juga pengawasan diberbagai sektor yang menjadi fungsi dari Komisi I hingga Komisi XI, dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya.

Di sisi lain, ia juga berharap kepada segenap elemen masyarakat, untuk dapat bersama-sama memberikan kontribusi dan solusi terbaik agar kinerja Dewan semakin meningkat, dan pengertian Dewan sebagai representasi rakyat bisa terwujud.

Sebagaimana diketahui, peresmian nama baru Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan (BKD) merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan. ■

(3)



Suasana Peresmian Gedung Setjen dan BKD

Foto : iwan/w

DANANG D'ACADEMY

POLITIK TIDAK KEJAM



Danang D'Academy

Foto: Runi/iw

Jika ada yang mengatakan politik kejam, namun tidak demikian halnya menurut Danang. Bahkan Penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat D'Academy 2 ini tak menampik anggapan jika kelak ia akan masuk dalam panggung perpolitikan tanah air. Berikut penjelasannya yang disampaikan pada Ayu dan Runi dari Parleментарia.

Saat masih berstatus sebagai mahasiswa IPB, Institut Pertanian Bogor, tiga bulan lamanya Danang menjalani praktik kerja (Magang) di bagian Humas DPR RI. Dari sana, tidak hanya nilai yang ia terima sebagai salah satu syarat kelulusan. Lebih dari itu, Danang mengaku melihat sendiri sekaligus mengerti berbagai tugas Anggota Dewan dalam kesehariannya. Menyusun undang-undang bersama pemerintah, mengawasi jalannya pemerintahan sebagaimana tugas yang diamanatkan Undang-Undang kepada DPR, dan memberikan persetujuan terkait anggaran yang diajukan pemerintah.

Tidak jarang juga, Anggota DPR RI menjalankan tugasnya tersebut hingga larut malam. Semua itu yang tidak ia ketahui dari media atau pihak lain. Dari sana Danang menganggap bahwa profesi sebagai Anggota DPR RI bukanlah pekerjaan yang mudah. Mengingat nasib dan masa depan bangsa sedikit banyak juga ada di tangan legislatif.

"Kalau dikatakan politik itu kejam, menurut saya tidak sepenuhnya demikian. Itu semua tergantung dari masing-masing individu dalam

menggunakan politik sebagai alat dalam berbakti dan membangun bangsa. DPR sebagai lembaga legislatif yang notabene merupakan wakil rakyat saya melihat sudah cukup banyak perannya dalam menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat. Dan saya pernah ada di dalam DPR sebagai mahasiswa magang. Saat itu saya melihat tugas DPR yang tidak mudah. Bahkan rapat pun tidak jarang hingga larut malam," papar pria bernama lengkap Danang Pradana Dieva saat dijumpai Parlemenaria di sebuah acara di JCC, Senayan Jakarta, beberapa waktu lalu.

Meski demikian, sebagai masyarakat awam, ia berharap DPR dapat meningkatkan kinerjanya. Terutama untuk hal-hal yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Sebut saja kenaikan tarif dasar listrik yang baru-baru ini dilakukan pemerintah, atau kenaikan harga cabai. Ia berharap agar DPR dapat ikut mengawasi pemerintah akan hal tersebut. Apapun alasannya, menurutnya, kebijakan menaikkan harga apapun, apalagi harga bahan pokok tetap akan membebani masyarakat. Oleh karena itu ia berharap DPR dapat lebih tegas mengawasi hal tersebut.

Pria kelahiran Banyuwangi, 23 April 1991 ini tak menampik jika kelak ia akan terjun langsung dalam panggung politik tanah air. Pasalnya, ilmu public speaking yang ia terimanya dari bangku kuliah, ditambah dengan kebiasaannya tampil di depan khalayak ramai, terutama setelah menjuarai ajang D'Academy 2 memudahkannya untuk mendapat "pinangan" dari berbagai partai politik yang ada.

"Saya sih tidak bisa memastikan apa-apa untuk saat ini, namun kalau memang saya dipercaya untuk menjalankan itu semua, kenapa tidak? Toh semua itu juga untuk bangsa dan negara," akunya.

Tinggalkan Seleksi CPNS Demi Karir Menyanyi

Bakat menyanyi putra dari Pasangan Achmadi dan Eva Trislianti ini sejatinya sudah terlihat sejak anak-anak. Bahkan Danang sempat mengikuti dan menjuarai berbagai

festival menyanyi. Tahun 2007 silam ia sempat menjadi juara dalam festival band pelajar se Jawa Timur, ia pun menjuarai berbagai festival menyanyi nasional antar mahasiswa. Bahkan, Danang sempat terpilih menjadi professional singer Mahasiswa Terpilih Bidang seni se-Indonesia, sekaligus menjadi *opening ASEAN University Games*, di Thailand oleh Menteri Pendidikan pada 2010 silam.



Kalau dikatakan politik itu kejam, menurut saya tidak sepenuhnya demikian. Itu semua tergantung dari masing-masing individu dalam menggunakan politik sebagai alat dalam berbakti dan membangun bangsa.



Ketika ikut menjadi mahasiswa Magang di Bagian Humas DPR pun bakat menyanyi Danang terlihat menonjol, sayangnya tidak banyak orang yang tahu tentang hal itu. Beberapa kali ia didaulat mengisi acara Parlemen Remaja yang merupakan program rutin tahunan dari bagian Humas DPR RI.

Ia sempat mengubur keinginannya menjadi penyanyi terkenal, sebelum akhirnya ia menjuarai ajang D'academy 2. Khusus untuk kesertaannya di ajang tersebut, diakui Danang hal itu bukan

tanpa usaha. Tujuh kali ia mengikuti ajang pencarian bakat penyanyi, namun semuanya gagal. Dangdut Academy 2 Indosiar merupakan ajang kedelapan sekaligus yang terakhir ia ikuti.

Ia sempat berjanji kepada sang ibu, kalau ajang tersebut gagal lagi maka ia tidak akan mengikuti ajang pencarian bakat lagi sekaligus mengubur dalam-dalam mimpinya menjadi seorang penyanyi. Ya, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Siapa sangka di ajang kali ini Danang terpilih menjadi finalis dan akhirnya menjadi juara satu ajang tersebut, mengalahkan Lesty.

"Aku sempat bilang, ini merupakan ajang terakhirku, setelah sebelumnya tujuh kali gagal seleksi. Tapi Alhamdulillah di D'Academy 2 Indosiar Aku lolos seleksi dan ikut dalam karantina. Padahal ketika itu Aku sedang mengikuti seleksi CPNS di Sekertariat Negara untuk jabatan Protokoler Kepresidenan. Saat itu aku sudah sampai pada tahap Pantuhir. Tapi semua itu aku tinggalkan demi D'Academy 2," kisahnya.

Saat itu dilanjutkannya, sempat timbul dilemma dalam dirinya. Sang ayah lebih menginginkan anaknya menjadi pekerja kantor seperti PNS, melarang Danang untuk melanjutkan kesertaannya di ajang D'Academy 2. Sebaliknya dengan sang ibu, yang lebih mendukung Danang untuk maju dalam dunia tarik suara tanah air. Sang ibu yakin bahwa itu adalah kesempatan bagi Danang untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang penyanyi terkenal.

Akhirnya, Danang pun mengikuti keinginan sang ibu. Dan akhirnya restu sang bunda itu pun menjadi doa sekaligus dukungan yang akhirnya mengantarkannya menjadi juara pertama ajang tersebut. Kini, wajah Danang tidak hanya selalu tampil di layar kaca, hari-harinya pun disibukkan dengan berbagai tawaran menyanyi dari satu panggung ke panggung lainnya, dari satu daerah ke daerah lainnya. Ia pun mengaku akan terus menekuni profesi tersebut hingga kelak Tuhan menunjukkan "jalan" lain yang harus dilakoninya. ■

(Ayu)

KOALISI PARTAI SUPERMAJORITY DI FILIPINA

Rodrigo Duterte terpilih menjadi Presiden Filipina pada Pemilu tahun 2016. Mantan Walikota Davao ini diusung Partai Philippine *Democratic Party-People's Power* (PDP-Laban), yang bukan merupakan partai dominan di Filipina. Duterte berhasil memperoleh enam juta suara lebih banyak dari saingan terdekatnya, Manuel Roxas.

Sejak pelantikannya pada Juni 2016, Duterte tengah menjadi sorotan dunia atas kebijakan perang melawan narkoba dengan cara membunuh setiap orang yang terlibat penyalahgunaan narkoba, baik pengguna maupun bandar.

Dalam Pemilu ke-16 yang dilaksanakan pada Senin, 9 Mei 2016, masyarakat tidak hanya memilih

Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga memilih Anggota DPR dan pemerintah lokal. Hal yang unik dalam Pemilu di Filipina adalah calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) tidak diajukan secara berpasangan.

Oleh karena itu, terdapat kemungkinan ketika Capres dan Cawapres terpilih tidak dari partai

pendukung yang sama, terlepas dari ada juga Capres dan Cawapres perseorangan. Dalam kasus Pemilu 2016, terdapat lima calon presiden dan lima calon wakil presiden.

Duterte, maju sebagai kandidat presiden dari Philippine *Democratic Party-People's Power* (PDP-Laban). Walaupun PDP-Laban hanya mendapat kursi 1,0 persen dan memiliki kursi di Senat, Duterte menang Pilpres dengan dukungan suara 39,01 persen atau lebih dari 6,2 juta suara.

Persentase dukungan tersebut jauh di atas pemenang kedua, Mer Roxas, yang berasal dari Liberal Party, yaitu 23,45 persen. Sementara secara terpisah, wakil presiden terpilih, Leni Robredo berasal dari Partai Liberal dengan perolehan lebih dari 14 juta suara atau 35,1 persen suara.

Partai Politik di Filipina memiliki

sistem multi partai. Partai-partai yang ada di Filipina tidak bisa memperoleh kekuasaan sendiri, tetapi harus bergabung dengan partai-partai lain untuk membentuk koalisi pemerintahan.

Namun, terdapat dua partai dominan di Filipina yaitu *Liberal Party* (LP) dan Partai *United Nationalist Alliance* (UNA). Pertama, LP merupakan partai politik tertua kedua di Filipina yang didirikan pada tahun 1946. Saat ini, LP memiliki 57 anggota di DPR dari total keseluruhan 292 anggota dan 5 Senator dari total keseluruhan 24 Senator.

LP berkoalisi dengan beberapa partai lainnya di DPR yang terdiri dari 51 anggota partai mayoritas, 1 anggota partai minoritas, dan 5 anggota partai independen minoritas. Sedangkan koalisi LP dalam senator terdiri dari 4 anggota partai mayoritas dan 1 anggota partai minoritas.

Beberapa presiden yang pernah memenangkan Pemilu dari Partai Liberal yaitu Manuel Roxas (1946), Elpidio Quirino (1949), Diosdado Macapagal (1961), dan Benigno Aquino III (2010). LP mengalami penurunan anggota partai pada masa kepemimpinan Gloria Arroyo (2001-2010) yang berasal dari PDP-Laban.

Pada saat itu, LP hanya memiliki 20 Anggota DPR. Akan tetapi,

LP tetap terus menjaga relevansi partainya selama bertahun-tahun dengan berkoalisi dengan partai-partai dominan. LP kembali membawa pengaruh baru di tahun 2010, yaitu ketika dibawah Pemerintahan Benigno Aquino III.

Kedua, Partai *United Nationalist Alliance* (UNA) merupakan partai yang didirikan dari koalisi *United Opposition* (UNO) pada pemilihan pertengahan masa jabatan tahun 2013. Hingga akhirnya pada 1 Juni 2015, Partai UNA menjadi partai politik tunggal. Saat ini, Partai UNA memiliki 3 anggota di DPR dari total keseluruhan 292 anggota dan 2 anggota Senator dari 24 Senator.

Partai UNA berkoalisi dengan beberapa partai lain di DPR yang terdiri dari 1 anggota partai mayoritas dan 2 anggota partai minoritas. Sedangkan koalisi UNA di Senat terdiri dari 2 anggota partai mayoritas.

Koalisi Supermajority - PDP-Laban ketika terjadi kekalahan dalam partai politik di Filipina, para politisi memiliki kecenderungan untuk pindah ke partai presiden terpilih. Seperti saat ini, pada masa kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte yang berasal dari Partindo Demokratiko Pilipino-Lakasng Bayan (PDP-Laban).

Keanggotaan PDP-Laban di DPR meningkat dari yang hanya memiliki 3 anggota menjadi 93 anggota di DPR.

Koalisi pemerintahan DPR dan Senat di Filipina pun mengalami perubahan drastic yang berdampak pada terjadinya 'supermajority'.

Koalisi 'supermajority' ini terdiri dari PDP-Laban, *Nacionalista Party*, *Lakas-CMD*, *Nationalist People's Coalition*, *National Unity Party*, *Centrist Democratic Party*, *PROMDI*, *Ang Kapatiran*, *Bangon Pilipinas*, *United Bangsamoro Justice Party*. Kemenangan

Partai Politik di Filipina memiliki sistem multi partai. Partai-partai yang ada di Filipina tidak bisa memperoleh kekuasaan sendiri, tetapi harus bergabung dengan partai-partai lain untuk membentuk koalisi pemerintahan.



Presiden di Filipina berdampak cukup besar pada koalisi partai politik.

Partai politik pengusung presiden terpilih menjadi partai politik yang berpengaruh, baik di legislatif maupun eksekutif. Anggota DPR dan Senat Filipina sering kali berpindah ke partai politik pemenang. Hal tersebut seperti yang terjadi pada kemenangan Rodrigo Duterte saat menjadi Presiden Filipina. PDP-Laban yang sebelumnya merupakan partai kecil berubah menjadi salah satu partai yang berkuasa di Filipina saat ini. ■

Oleh: Hilda Piska Randini (PI)
dan Larissa Amanda Indianti (LA)



Nacionalista Party - www.newsfash.org.jpg

Schizophrenia



Dito Anurogo *)

Mencegah Kanker Jiwa Merajalela

Istilah kanker jiwa [skizofrenia] berasal dari bahasa Jerman yaitu *schizo* (perpecahan) dan *phrenos* (pikiran/jiwa), sehingga berarti perpecahan pikiran/jiwa. Dahulunya, Emil Kraepelin menyebut skizofrenia sebagai demensia prekoks, lalu istilah schizophrenia dipopulerkan oleh Eugen Bleuler.

Studi epidemiologi menyatakan 1% penduduk dunia menderita skizofrenia. Prevalensi skizofrenia berkisar 2,7 per 1000 hingga 8,3 per 1000, atau sekitar 5 per 1000 jiwa. Insiden tahunan berkisar 0,11 per 1000 hingga 0,70 per 1000. Skizofrenia banyak dialami pria berusia 15-25 tahun dan wanita berusia 25-35 tahun. Taksiran kerugian di AS akibat skizofrenia lebih dari \$30 milyar juta per tahun.

Penyebab

Penyebab skizofrenia diduga multifaktor, seperti: rentan stres, tekanan (ekonomi, pekerjaan) yang dahsyat dan berkali-kali, gangguan metabolisme, kelainan susunan saraf pusat yang

mengganggu beberapa zat neurokimia di otak seperti: dopamin, serotonin, GABA, norepinefrin, neurotensin, glutamat.

Kelemahan ego, disharmoni jiwa, disorganisasi kepribadian, maladaptasi, sehingga penderita cenderung menjauhi realita dan mengasingkan diri.

Stres psikologis, seperti: kompetisi antarsaudara dan sahabat, ditinggal atau diputus pacar, konflik keluarga, ketidakharmonisan hubungan di dalam kehidupan.

Konflik politik-sosioekonomi, pengaruh agama, nilai moral, perbedaan budaya, berpengaruh pula terhadap kejadian skizofrenia.

Menurut riset biomolekuler, gen neuregulin-1 (NRG1) dan reseptornya (ErbB4) merupakan gen yang paling bertanggungjawab atas timbulnya skizofrenia. Selain itu, peristiwa mikrodeselesi (hilangnya) kromosom 22q11.2 penting pula untuk memahami fenomena skizofrenia. Selain itu, juga terdapat bukti kuat tentang perubahan

sinyal glutamatergik pada skizofrenia dan varian polimorfik dari GRIK3 glutamate receptor gene pada 1p34-33 sebelumnya telah terbukti berhubungan dengan gangguan psikotik ini. Sehingga ada kemungkinan keterlibatan GRIK3 pada perkembangan skizofrenia, setidaknya pada populasi Skandinavia.

Terdapat beberapa kandidat gen untuk skizofrenia, seperti: Neuregulin 1 (NRG1), Dysbindin (DTNBP1), Disrupted-in-Schizophrenia 1 (DISC1), Catechol-O-Methyl Transferase (COMT), D-amino acid oxidase activator (DAOA), Dopaminergic gene. Beberapa di antaranya tidak spesifik karena tumpang-tindih dengan gangguan psikotik lainnya, termasuk gangguan bipolar.

Beberapa faktor seperti: trauma masa kecil, kekerasan, permusuhan, hubungan interpersonal di masa anak yang kurang hangat, rendahnya tingkat religiusitas, pernah stres, juga menyebabkan rentan menderita skizofrenia.

Wanita hamil dengan asupan gizi rendah, trauma psikologis, atau terinfeksi virus selama kehamilan, maka anaknya berpotensi skizofrenia.

Potret Klinis

Kumpulan gejala berikut ini minimal berlangsung minimal satu bulan. Waham/delusi, yaitu keyakinan aneh, irasional, namun diyakini benar bahwa dirinya: dikendalikan kekuatan dari luar, tidak berdaya, pasrah, atau pernah merasakan pengalaman mistik. Merasa memiliki kemampuan supranatural yang bertentangan dengan adat, budaya, atau agama.

Halusinasi, mendengar jelas suara/bunyi tertentu (komentar orang tentang dirinya, bunyi gamelan, musik), mencium bau bunga, merasa ada racun di makanannya, melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada.

Gangguan isi pikiran, bergema meskipun tidak keras, berulang, diambil keluar, atau terpancar keluar (seperti siaran TV, radio) sehingga diketahui orang lain.

Gangguan ide, misalnya: terhambat, muncul bersamaan, atau malah berlimpah-ide, satu ide belum selesai dilakukan sudah muncul ide-ide lainnya.

Sulit berpikir abstrak. Arus pikiran terputus, berbicara tidak nyambung, suka menciptakan kosakata baru yang aneh dan hanya dapat dipahami dirinya sendiri.

Suka meniru kata-kata/perilaku orang lain. Menunjukkan perilaku katatonik, seperti: kurang luwes, kaku, terus bergerak, gaduh-gelisah, mematung, diam-membisu atau terus-menerus berbicara.

Gangguan kemauan, tidak dapat memutuskan, kurang cekatan, berkurangnya spontanitas. Gangguan konsentrasi/perhatian juga sering dialami.

Respon emosi terbatas/menumpul, tak peduli masa depan dirinya sendiri dan keluarganya, bersikap berlebihan seolah bermain sinetron. Ekspresi-emosinya terpecah, misalnya: mencintai sekaligus membenci seseorang di saat yang sama, terkadang hatinya berbahagia, namun malah menangis tersedu-sedu. Ini menyulitkan berempati kepada penderita.

Perilaku berubah menjadi lebih pasif dan sangat apatis. Uniknya, penderita memiliki kesadaran jernih dan kemampuan intelektual yang tetap terpelihara. Beberapa ber-IQ tinggi bahkan jenius namun tertutup, amat mandiri, dan penyendiri.

Perjalanan Penyakit

Ada tiga tahapan, dari ringan, berat, lalu stabil. Yakni tahap premorbid, fungsi penderita masih relatif normal. Tahap prodromal, yang berlangsung selama 2-5 tahun, ditandai dengan: konsentrasi

berkurang, mudah lelah dan curiga, gangguan tidur dan fungsi peran. Tahap psikotik, dimulai dengan fase akut, stabilisasi, lalu stabil.

Fase akut ditandai dengan pikiran kacau, waham/halusinasi, ketidakmampuan penderita mengurus dirinya sendiri. Fase stabilisasi berlangsung 6-18 bulan, dialami setelah terapi diberikan dokter. Setelah fase stabilisasi terlewati, gejala menghilang, namun beberapa penderita masih merasa sulit tidur, tegang, cemas, atau depresi. Diagnosis skizofrenia dipastikan dokter/psikiater menggunakan PPDGJ-III atau DSM-V.

Pencegahan

Diperlukan manajemen hati, jiwa, dan pikiran yang terpadu, seperti: rida menerima takdirNya, sepahit apapun, sebab inilah caraNya mendewasakan dan menempa diri kita. Berharaplah hanya kepada Allah. Hindari terlalu berambisi meraih duniawi, yakni semua hal yang menyebabkan kita melupakanNya. Jangan terlalu menyesali masa lalu.

Bersikaplah proaktif dalam hidup bermasyarakat, seperti: menjadi relawan kegiatan kemanusiaan. Hindari tebar-pesona, terlalu berharap atau memberi harapan saat menjalin asmara. Mentalitas menerabas perlu ditebas, nikmatilah proses, hindari KKN sebab uang haram memengaruhi kesehatan jiwa.

Kurang bijaksana bila keluarga dan masyarakat menjauhi atau mengucilkan penderita, sebaiknya segera membawanya ke dokter/psikiater sebelum terlambat. Dengan penatalaksanaan yang paripurna, diiringi doa dan Cintakasih, maka skizofrenia tentu teratasi dengan baik. ■

Dokter digital, pemerhati bencana, penulis 18 buku, pembina NPIC, Founder/CEO SLI [ILF], studi S-2 IKD Biomedis FK UGM, email : ditonurogo@gmail.com

“ Skizofrenia banyak dialami pria berusia 15-25 tahun dan wanita berusia 25-35 tahun. ”

Kalau Tanya Jangan Galak-galak

Suasana rapat Komisi IX DPR RI dengan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Yusuf Kalla yang juga Wakil Presiden, berlangsung berbeda dibanding rapat-rapat biasa.

Suasana rapat Komisi IX DPR dengan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Yusuf Kalla yang juga Wakil Presiden, berlangsung berbeda dibanding rapat-rapat biasa. Maklum karena yang hadir RI-2, maka keamanan menjadi factor utama. Pengamanan yang super ketat itu akibatnya berimbas pada suasana rapat yang membahas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepalangmerahan berlangsung agak tegang.

Namun Ketua Komisi IX DPR RUU Dede Yusuf Macan Effendy memiliki



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah didampingi sejumlah Anggota DPR bersama Ketua Umum PMI Jusuf Kalla

Foto: Rizka/iw

jurus jitu untuk mencairkan suasana "tegang" itu. Didampingi Wakil Ketua DPR Korkesra Fahri Hamzah dan jajaran Pimpinan Komisi IX lainnya, Dede mengatakan kalau rapat DPR

RI dengan Menteri namanya Rapat Kerja, dengan pejabat Eselon I Rapat Dengar Pendapat dan dengan masyarakat/swasta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Kalau dengan Menteri disebut Raker, Pak JK eselonnya diatas Menteri, tak mungkin RDP karena bukan pejabat eselon I makanya kita putuskan RDPU karena Pak JK hadir sebagai Ketua Umum PMI.

"Tapi ingat, walalupun beliau mewakili organisasi PMI, nanyanya jangan galak-galak," ucapnya disambut tawa hadirin. Dalam rapat-rapat biasanya Anggota Komisi IX DPR RI melontarkan tanggapan dan pertanyaan kritis terutama berkaitan dengan masalah tenaga kerja dan kesehatan.

Begitu pula saat masuk sesi tanya jawab, setelah anggota Dewi Asmara melontarkan pertanyaan, Dede Yusuf berkomentar "Bu Dewi ini biasanya kalau tanya agak tegas, namun hari ini sangat lembuuut sekali. Saya tidak mengerti kenapa begitu," ujarnya kembali disambut tawa sehingga suasana rapat menjadi cair. ■ (mm,mp)

Menteri Datang, Semuanya Selesai.....

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dipimpin Ketua Komisi Fary Djemy Francis secara khusus berkunjung ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 20 Februari 2017 lalu. Kunjungan ini sebagai respon atas kunjungan Bupati Sragen ke DPR RI terkait pembangunan infrastruktur khususnya jalan-jalan rusak di kabupaten tersebut.

Kedatangan Tim Komisi V ini ternyata bersamaan waktunya dengan jadwal Menteri PU-PR Basuki Hadimulyono dalam rangkaian inspeksi pembangunan jalan ton Solo-Kertosono yang juga melewati Sragen.

Di sela-sela acara rapat Tim Komisi V dengan Bupati Sragen Kusnidar Untung Yuni Sukowati, Fary Djemy mengatakan, momen kali ini merupakan kunjungan pertama kali ke Sragen dipimpin langsung Ketua Komisi dan hadir pula Menteri PU-PR. " Dengan kehadiran Menteri semua sudah selesai, tidak perlu lapor lagi semua sudah selesai. Tinggal kita amankan saja apa yang diamanatkan oleh Bupati Sragen," ujarnya disambut tepuk dan tawa hadirin

dalam rapat tersebut.

Selain membahas perbaikan jalan, juga pembangunan waduk serta pembangunan jalan lingkar Sragen. Untuk 2015-16 perhatian proyek ini diberi dukungan 30 M, tahun 2016 reservasi 10 km, Sragen-Tawangmangu, tahun 2017 reservasi dan pelebaran 3 km dan masih ada sekitar 12 km. Bupati Kusnidar secara khusus meminta dibangunnya jalan eksit tol di Sragen. Ada dampak negatif dibangunnya jalan tol Solo-Kertosono yakni kerusakan jalan di beberapa ruas di Kabupaten ini, diantaranya beberapa pengendara sepeda motor jatuh bahkan ada yang meninggal.

" Masyarakat tidak pahami apakah jalan nasional atau jalan provinsi tapi

kalau jatuh tanggungjawab Bupati. Kalau ada apa-apa Bupati yang diprotes. Jadi hampir 3 bulan terakhir banyak masyarakat protes masalah jalan," terang Kusnidar menambahkan. ■ (mp)



Tim Kunspek Komisi V DPR RI berkunjung ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah

foto : Mastur/iw



Selamat Atas Dilantiknya

Achmad Djuned, SH., M.Hum

sebagai

Sekretaris Jenderal DPR RI

*“Semoga Amanah dalam
Melaksanakan Tugas”*





STOP PEDOFIL

LINDUNGI ANAK BANGSA